



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi di daerah harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, persatuan bangsa, dan kemanusiaan guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah, peradaban, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis hasil riset dan inovasi sehingga diperlukan penguatan perencanaan pembangunan yang menggunakan landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan berbasis bukti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas selaku Kepala Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029 yang selanjutnya disebut RIPJ PID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
6. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II KEDUDUKAN RIPJ PID

Pasal 2

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RIPJ PID

Pasal 3

- (1) RIPJ PID disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Daerah;
 - c. bab III tantangan dan peluang riset dan inovasi di Daerah;
 - d. bab IV analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di Daerah;
 - e. bab V strategi kebijakan riset dan inovasi di Daerah;
 - f. bab VI peta jalan riset dan inovasi di Daerah;
 - g. bab VII rencana aksi riset dan inovasi di Daerah; dan
 - h. bab VIII Berisi penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RIPJ PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pembangunan daerah harus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dan perencanaan pembangunan.

Pembangunan nasional dan daerah saat ini menuntut basis pengetahuan yang kuat untuk mencapai daya saing dan kesejahteraan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memacu kreativitas daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Banyumas merupakan implementasi strategis dan mandat regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mewajibkan daerah untuk menyusun perencanaan riset dan inovasi yang terpadu.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan solusi masalah pembangunan. Perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional harus berlandaskan pada hasil, pengembangan, pengkajian serta penerapan penelitian. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based policy*) atau kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif yang memuat peran IPTEK atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen RIPJPID Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memberikan arahan pemanfaatan hasil riset dan inovasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah yang disusun berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Dokumen RIPJPID Kabupaten Banyumas akan memberikan arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah serta pemanfaatannya untuk mendukung target kinerja Bupati Banyumas dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029.

RIPJPID ini berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan, memastikan bahwa alokasi sumber daya daerah terfokus pada penelitian dan inovasi yang relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025). Secara fundamental, dokumen ini bertujuan untuk mentransformasi ekonomi lokal dari berbasis sumber daya menjadi berbasis pengetahuan, sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menempatkan inovasi sebagai motor utama pertumbuhan (Schumpeter, 1934).

Kabupaten Banyumas memiliki aset keunggulan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan pertanian. Banyumas merupakan sentra pendidikan di Jawa Tengah bagian selatan, ditandai dengan keberadaan Perguruan Tinggi (PT) besar yang menghasilkan potensi riset dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas (Tijssen, 2006). Sebagai daerah berbasis kegiatan pada sektor pertanian, banyak komoditas yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas. Beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan menjadi produk unggulan daerah Kabupaten Banyumas. Komoditas ini harus dikembangkan agar memiliki saing di pasar nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, analisis dan pemetaan produk unggulan daerah diperlukan agar kebijakan perekonomian yang direncanakan dapat mendukung efisiensi produksi dan mengoptimalisasi pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Banyumas.

Akan tetapi, terdapat kesenjangan (*gap*) yang memerlukan intervensi kebijakan. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi, produktivitas sektor pertanian dan tingkat hilirisasi hasil riset ke sektor industri, khususnya UM-IKM, masih rendah. Hal ini tecermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) yang memerlukan dorongan signifikan agar Banyumas mampu bersaing di tingkat regional dan nasional. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah 53,56 dengan kategori inovatif (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024).

Tabel 1. Isu Strategis Daerah, Program Unggulan TRILAS dan Ekosistem RID

Isu Strategis Daerah	Program Unggulan TRILAS	Ekosistem RID
1). Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah 2). Kemiskinan dan Pengangguran 3). Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter 4). Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi 5). Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Daerah 6). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Ketahanan Iklim dan Bencana	1). Program Pasti Sekolah 2). Insentif guru ngaji, pesantren, organisasi keagamaan, RT/RW dan BPD 3). Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas 4). Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di setiap Kecamatan 5). Pengembangan Desa Wisata dengan Melibatkan BUMDES 6). Percepatan Pengentasan Kemiskinan 7). Revitalisasi Pasar Tradisional yang Aman dan Nyaman 8). Layanan Puskesmas Rawat Inap di Setiap Kecamatan 9). Mewujudkan Swasembada Pangan Lokal Menuju Kesejahteraan Petani 10). Percepatan Pembangunan Kawasan Industri untuk	1) Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah 2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di daerah 3) Kemitraan riset dan inovasi di daerah 4) Budaya riset dan inovasi di daerah 5) Keterpaduan riset dan inovasi di daerah 6) Penyelarasan dengan perkembangan global

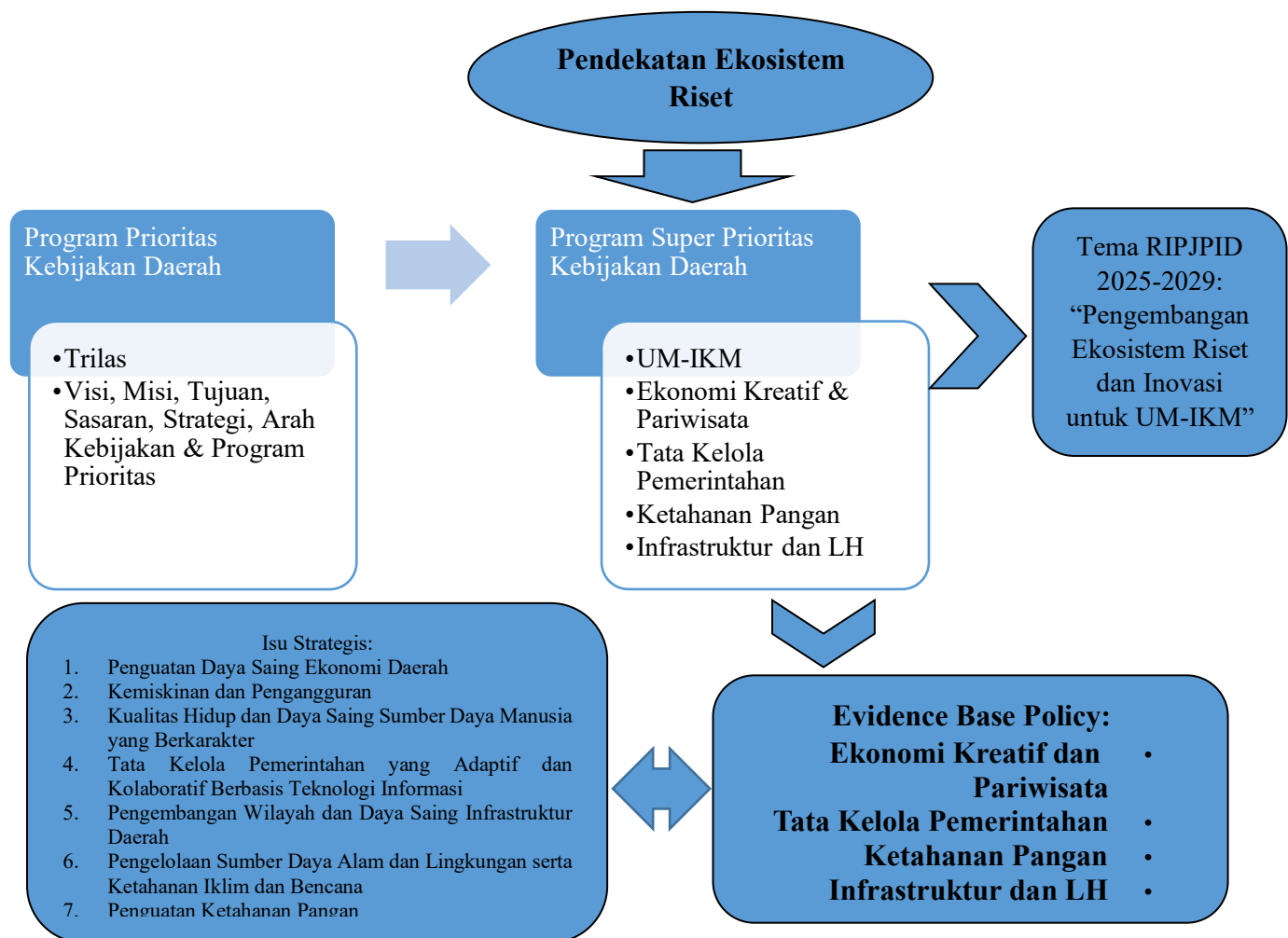
Isu Strategis Daerah	Program Unggulan TRILAS	Ekosistem RID
7). Penguatan Ketahanan Pangan	Menciptakan Lapangan Pekerjaan 11). Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota 12). Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat 13). Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan dan Solutif	

Dari sisi prioritas kebijakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas menetapkan program unggulan “TRILAS” yaitu 13 program unggulan Bupati (Tabel 1). Disisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas juga telah menetapkan enam produk unggulan daerah yaitu produk gula kelapa, produk durian, produk kopi, produk minyak atsiri, produk kambing perah, dan produk kayu olahan dimana untuk prioritas pengembangan untuk tahun 2025 -2029 diarahkan pada produk unggulan gula kelapa, durian, dan kopi. Oleh karena itu, sinkronisasi antara prioritas dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pengembangan produk unggulan diperlukan.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyumas, akselerasi program prioritas unggulan Bupati/ Wakil Bupati seyogyanya dapat diturunkan kedalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID). Upaya ini dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat dilakukan melalui pendekatan ekosistem riset. Harapannya adalah penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyumas berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based policy*) dan kebijakan yang akan dilakukan berbasis bukti (*evidence based policy*). Dengan demikian,

penyusunan RIPJPID ini merupakan langkah fundamental untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banyumas yang berbasis pengetahuan, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan IPTEK secara optimal.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”. Visi tersebut diturunkan dalam enam misi yaitu (i) meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, (ii) memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan, (iii) memperkuat ketahanan pangan, (iv) meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, (v) meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (vi) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.



Gambar 1. Sinkronisasi RIPJPID dengan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD, maka tema yang dapat diakselerasi untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi dalam mendukung RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah “Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM”. Tema tersebut menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029. Tujuan yang berusaha dijawab oleh tema tersebut yaitu meningkatnya daya saing ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah. Adapun sasaran

yang hendak dicapai oleh tema tersebut yaitu menguatnya lembaga ekonomi daerah dan pelaku usaha yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi, meningkatnya sumberdaya ekonomi dan nilai tambah produk sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tertanganinya kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatnya stabilitas dan inovasi daerah.

Selain pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM terhadap produk unggulan Gula Kelapa, Durian, dan Kopi, sinkronisasi antara RIPJPID dan prioritas kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan pada *Evidence Based Policy* (kebijakan berbasis riset). Kebijakan berbasis riset dalam RIPJPID ini melingkupi kebijakan terkait ekonomi kreatif dan pariwisata, infrastruktur dan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan berbasis riset terkait ekonomi kreatif dan pariwisata menjawab isu strategis terkait dengan penguatan daya saing ekonomi daerah, kemiskinan dan pengangguran serta kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter. Kebijakan berbasis riset terkait infrastruktur menjawab isu strategis terkait dengan pengembangan wilayah dan daya saing infrastruktur daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta ketahanan iklim dan bencana. Kebijakan berbasis riset terkait ketahanan pangan menjawab isu strategis terkait dengan penguatan ketahanan pangan. ketahanan pangan. Kebijakan berbasis riset terkait tata kelola pemerintahan menjawab isu strategis terkait dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi. Harapannya adalah kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas dan efektif, kebijakan yang diambil dapat mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif yang terukur, serta menggunakan sumber daya (anggaran, waktu, dll.) secara efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Banyumas adalah memberikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan rencana aksi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan arah kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029. Tujuan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis gambaran umum, kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas dalam mendukung Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM.
2. Untuk menganalisis tantangan dan peluang riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas dalam mendukung Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM serta Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*).
3. Untuk menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas dalam mendukung Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM serta Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*).
4. Untuk menentukan strategi kebijakan riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas dalam mendukung Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM serta Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*).
5. Untuk menentukan peta jalan riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas dalam mendukung Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM serta Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*).

6. Untuk menentukan rencana aksi riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas dalam mendukung Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM serta Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*).

C. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran jangka pendek, menyusun rencana aksi terkait riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas melalui pengembangan produk unggulan daerah;
- 2) Sasaran jangka panjang, sebagai dokumen yang menyelaraskan kebutuhan riset dan inovasi jangka panjang dengan arah pembangunan berkelanjutan di daerah.

D. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Banyumas dengan tema terkait dengan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148),
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192),
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah,
 11. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah,
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

E. Sistematika Penulisan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Banyumas berisi delapan Bab. Sistematika lengkap Dokumen RIPJPID Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar hukum, dan sistematika dokumen RIPJPID.

2. Bab II. Gambaran Umum, Kondisi Riset Dan Inovasi di Daerah

Bagian ini menguraikan gambaran umum daerah dan kondisi riset dan inovasi di daerah. Gambaran umum daerah meliputi kondisi aspek kependudukan, aspek ketenagakerjaan, aspek kesejahteraan, aspek daya saing daerah, produk unggulan daerah, permasalahan utama daerah, sumberdaya manusia Iptek daerah, kelembagaan Iptek daerah, dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah. Kondisi riset dan inovasi di daerah menguraikan kondisi ekosistem inovasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, permasalahan dan peluang inovasi daerah Kabupaten Banyumas, program – program riset dan inovasi yang pernah dilaksanakan, serta kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah saat ini pada setiap produk unggulan daerah dan permasalahan utama daerah yang diusulkan.

3. Bab III. Tantangan Dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini menyajikan tantangan yang akan dihadapi dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang, peluang dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa mendatang, serta kondisi umum ekosistem riset dan inovasi di daerah yang diharapkan untuk mengembangkan produk unggulan daerah dan kondisi umum ekosistem riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

4. Bab IV. Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini berisi tentang kebijakan infrastruktur IPTEK daerah, kebijakan kelembagaan dan daya dukung pemajuan IPTEK daerah, kebijakan kemitraan pemajuan IPTEK daerah,

kebijakan budaya pemajuan riset dan inovasi IPTEK daerah, keterpaduan riset dan inovasi IPTEK daerah, dan penyelarasan dengan perkembangan global.

5. Bab V. Strategi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini berisi tiga sub bab utama yaitu strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM melalui Produk Unggulan Daerah (PUD), strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*), serta kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah untuk UM-IKM.

6. Bab VI. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini menguraikan tentang peta jalan riset dan inovasi dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas, serta peta jalan riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*).

7. Bab VII. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini menjelaskan program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), dan program dan target tahunan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas.

8. Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya dan rekomendasi terkait dengan implementasi pelaksanaan dokumen RIPJPID ini.

BAB II. GAMBARAN UMUM, KONDISI RISET, DAN INOVASI DI DAERAH

A. Gambaran Umum Daerah

1. Aspek Geografis

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah Barat Daya Provinsi. Secara astronomis, $7^{\circ}14'46,640''$ - $7^{\circ}39'57,035''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}53'211,379''$ - $109^{\circ}26'46,943''$ Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang.

Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap.

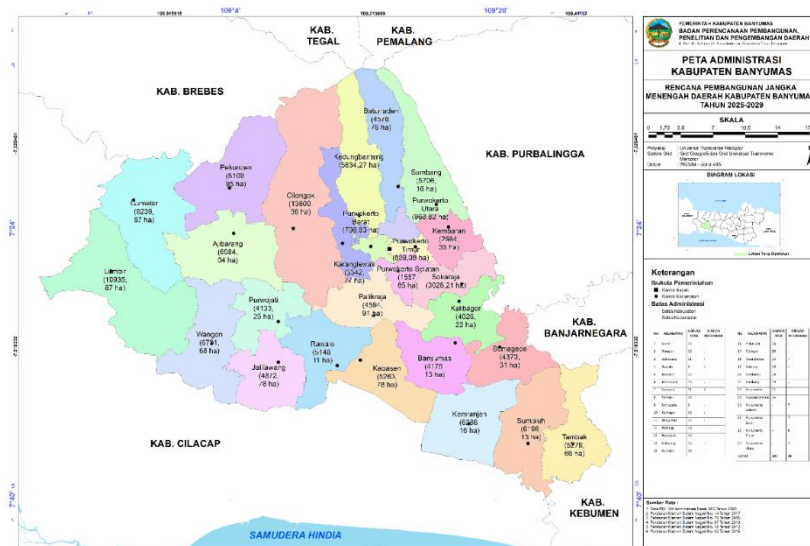
Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan, dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas berada di kota Purwokerto. Total luas wilayah Kabupaten Banyumas 139.115,30 hektar, sekitar 4,05 persen luas Provinsi Jawa Tengah. Luas dan persentase setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada peta berikut ini:



Sumber: Kebijakan Satu Peta Badan Informasi Geospasial, diolah 2024

Gambar 3. Peta Administrasi, dan Luas Wilayah serta Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah, Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Purwokerto sebagai sebagai PKW memiliki banyak fasilitas pelayanan, di antaranya 12 Perguruan Tinggi (negeri dan swasta), 16 rumah sakit, dan 26 kantor cabang Bank umum. Sebagai kota utama di wilayah

Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional Perkotaan Purwokerto merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, kawasan strategis provinsi di Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Strategis Provinsi Industri Prioritas dan Kawasan Agropolitan Slamet yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, serta Kawasan Gunung Slamet yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Selanjutnya Kabupaten Banyumas menjadi bagian dari Wilayah Pengembangan Cibalingmas (Cilacap, Purbalingga, Banyumas).

b. Potensi Sumber Daya Alam

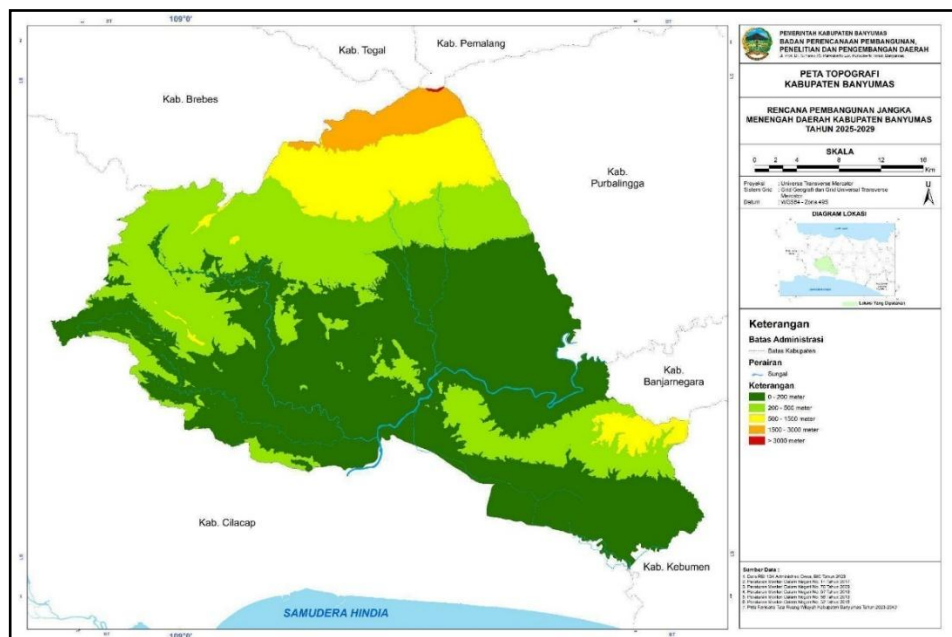
i. Topografi

Bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya di wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- 1) Daerah pegunungan di sebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang.
- 2) Dataran rendah terletak di antara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan dengan lebar rata-rata 15 km;
- 3) Dataran rendah di sebelah Selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah Barat sampai

dengan perbatasan Kabupaten Kebumen dengan lebar rata-rata 10 km.

Kelas topografi wilayah Kabupaten Banyumas memiliki rentang ketinggian -4,26 mdpl sampai dengan 3.112 mdpl (Badan Informasi Geospasial, 2018). Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas berada pada ketinggian 0-200 mdpl, yaitu seluas 75.641 ha atau sekitar 54,37%, dan wilayah terkecil berada pada ketinggian lebih dari 3.000 mdpl, yaitu sekitar 0,03% atau seluas 41,95 ha.

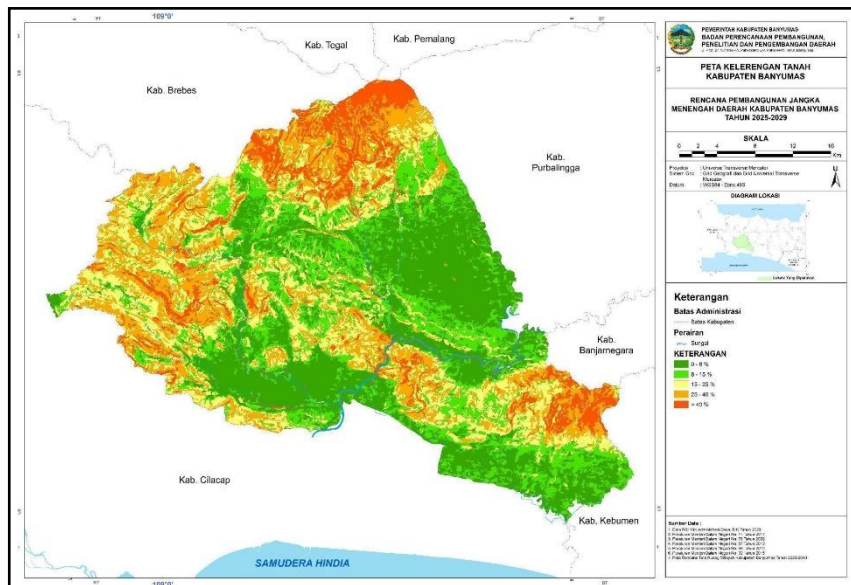


Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 4. Peta Topografi Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki kemiringan yang beragam dan hampir terdistribusi merata untuk setiap kelas lereng. Namun, sebagian besar memiliki kondisi yang datar dengan kemiringan 0%-8%. Berdasarkan kemiringan lahannya, wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) 0%–8% (datar) meliputi area seluas 37.856,9 Ha (27,21%) yang terdistribusi di wilayah bagian timur, tengah, selatan, dan sedikit di bagian barat. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi datar terluas adalah Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Sokaraja.
- 2) 8%–15% (landai) meliputi area seluas 30.156,4 Ha (21,68%) yang terdistribusi di wilayah bagian timur, tengah, selatan, dan sedikit di bagian barat. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi landai terluas adalah Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Pekuncen.
- 3) 15%–25% (agak curam) meliputi area seluas 30.778 Ha (22,12%) yang terdistribusi di wilayah bagian utara, selatan, dan timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi agak curam terluas adalah Kecamatan Lumir, Kecamatan Gumelar, dan Kecamatan Cilongok.
- 4) 25%-40% (curam) meliputi area seluas 28.086,2 Ha (20,19%) yang terdistribusi di wilayah utara, selatan, dan timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi curam terluas adalah Kecamatan Lumir, Kecamatan Gumelar, dan Kecamatan Cilongok.
- 5) Lebih dari 40% (sangat curam) meliputi area seluas 12.237,8 Ha (8,80%) yang sebagian besar terdistribusi di wilayah utara, selatan, dan timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi sangat curam terluas adalah Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Kedungbanteng.

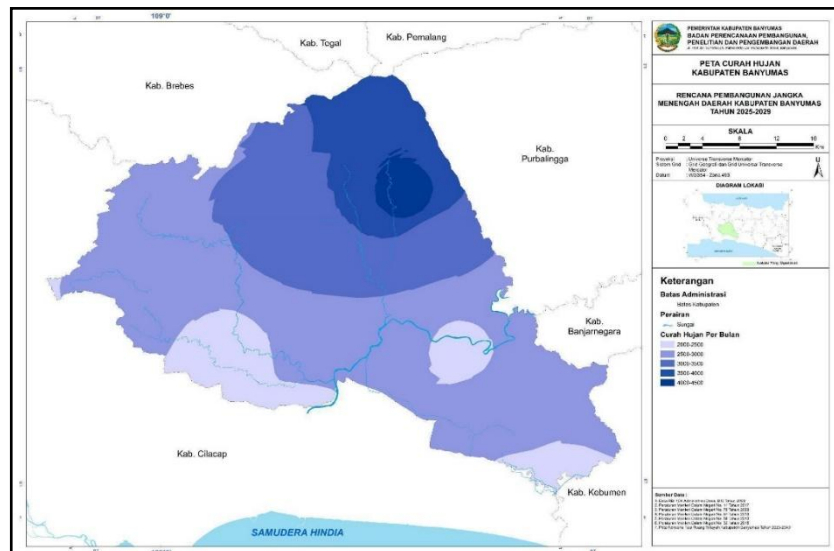


Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 5. Peta Kelereng Lahan Kabupaten Banyumas

ii. Klimatologi

Iklim Kabupaten Banyumas adalah tropis basah. Tekanan udara rata-rata antara 1.001 mbs, suhu udara berkisar antara 21,4⁰C-30,9⁰C. Wilayah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 5 kelas wilayah berdasarkan curah hujan tahunan yaitu wilayah dengan curah hujan 2.000-2.500 mm/tahun, 2.500-3.000 mm/tahun, 3.000-3.500 mm/tahun, 3.500-4.000 mm/tahun, 4.000-4.500 mm/tahun. (Badan Informasi Geospasial, 2024). Secara detail wilayah curah hujan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada peta berikut:



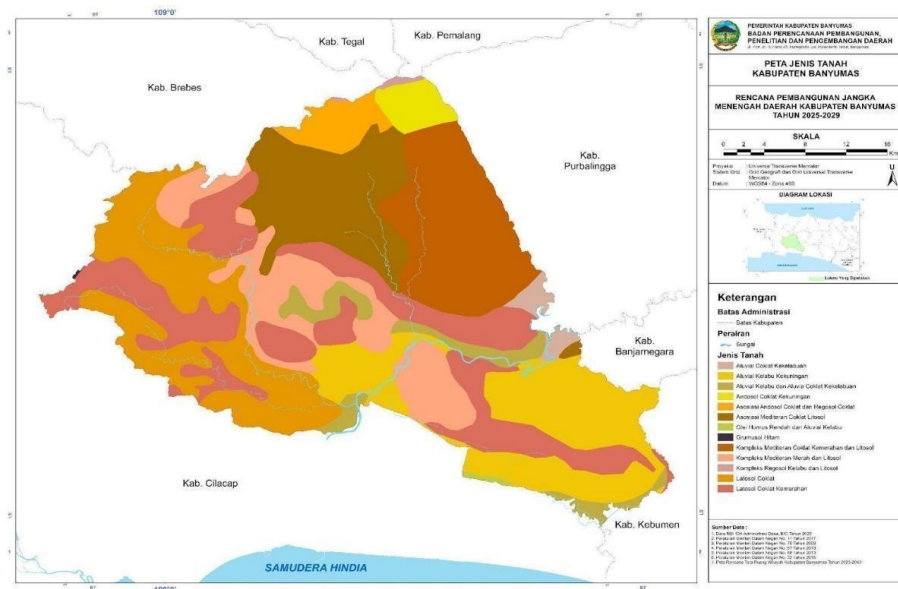
Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 6. Peta Curah Hujan Kabupaten Banyumas

iii. Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, yang sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet; Pegunungan Serayu Selatan yang pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam yang memanjang mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas; dan Zona Serayu Selatan yang terletak di antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur dan ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

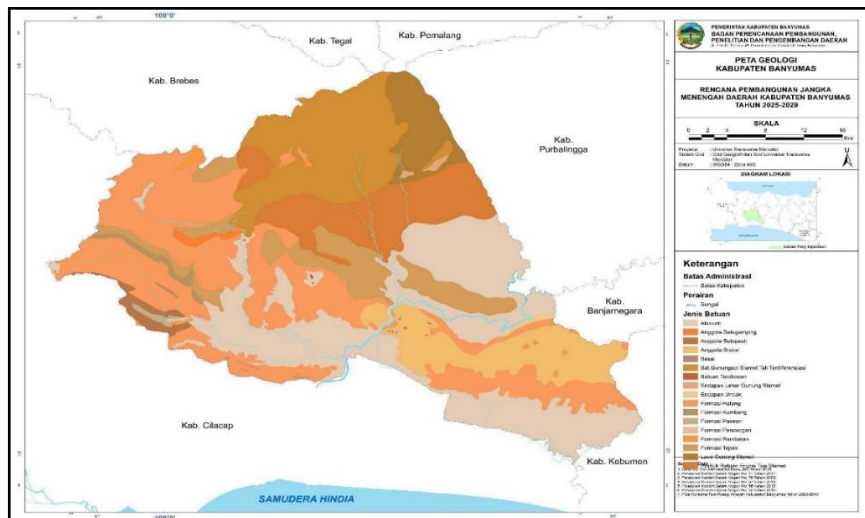
Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi 6 (enam) jenis tanah yaitu Aluvial, Glei Humus Rendah, Andosol, Litosol, Regosol dan Grumusol, dapat digambarkan pada peta berikut.



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Banyumas

Struktur geologi Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi: 1) Alluvium, 2) Basalt, 3) Gunung Slamet Lava, 4) Gunung Slamet Undifferentiated Volcanic Rock, 5) Halang Formation, 6) Intrusive Rock, 7) Kumbang Formation, 8) Laharic Deposit Of Gunung Slamet, 9) Old Eruption Product Of Slamet, 10) Pasean Formation, 11) Penosogan Formation, 12) Rambatan Formation, 13) Tapak Formation, 14) Terrace Deposit, yang digambarkan pada peta berikut.



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

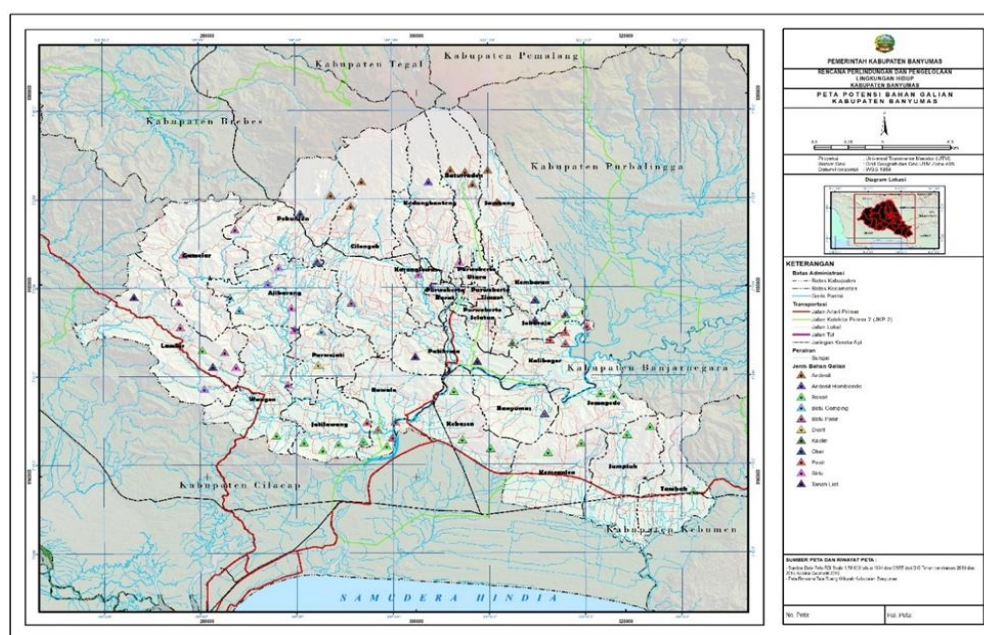
Gambar 8. Peta Geologi Kabupaten Banyumas

Kondisi geologi Kabupaten Banyumas ini menyimpan potensi bahan galian dengan nilai ekonomis cukup tinggi, yang tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi andesit, batu gamping, bentonit, sirtu, tanah liat, tras dan tanah urug. Menurut data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Kawasan Pertambangan (KP) Serayu Selatan yang membentang di wilayah Banyumas bagian Selatan sampai Timur, KP Gunung Slamet yang berada di bagian Utara, yang berdekatan wilayah Gunung Slamet dan KP Majenang – Bantarkawung, dan berada di bagian Barat di sekitar Lumbir. Sebaran dan potensi bahan galian yang telah dilakukan inventarisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Sebaran dan Cadangan Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

Jenis Bahan Mineral	Sebaran	Cadangan Terbukti (Ton)
Andesit	Baturraden, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Wangon, Pekuncen, Karanglewas, Patikraja, Kedungbanteng, Sumbang dan Cilongok	174.620.000
Andesit Hornblende	Kedungbanteng	201.388
Batu Tempel Andesit	Kedungbanteng dan Pekuncen	150.536
Basalt	Jatilawang, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Rawalo, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon	21.511.646
Batugamping	Ajibarang, Gumelar, Purwojati	482.200.000
Batupasir	Cilongok, Gumelar, Lumbir, Pekuncen	NA
Diorit	Purwojati dan Ajibarang	11.560.000
Granodiarit	Kedungbanteng	11.566
Kaolin	Sokaraja	535.505
Oker	Banyumas, Pekuncen	NA
Pasir	Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Rawalo	11.597.363
Sirtu	Ajibarang, Karanglewas, Kedungbanteng, Lumbir, Purwokerto Barat, Wangon	2.710.998
Tanah Liat	Kembaran, Lumbir, Patikraja, Pekuncen, Sokaraja	45.487.328
Tanah Urug	Patikraja, Purwokerto Selatan	2.348.814
Emas	Lumbir dan Gumelar	9.470.000

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011



Sumber: DLH Kabupaten Banyumas, 2024
Gambar 9. Peta Sebaran Potensi Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

iv. Lahan Sawah

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/Kepala BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan keputusan tersebut luas LSD di Kabupaten Banyumas adalah 30.316,84 Ha. Setelah dilakukan verifikasi faktual, telah disepakati untuk luasan LSD yang dipertahankan di Kabupaten Banyumas adalah seluas 28.559,76 Ha. LSD yang sudah disepakati tidak boleh dialihfungsikan dan harus tetap menjadi lahan sawah. Peta LSD selanjutnya diintegrasikan ke dalam revisi RTRW sebagai bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW.

v. Sumber Daya Hutan

Kawasan hutan di Kabupaten Banyumas mencapai 28.646,70 Ha dengan luasan terbesar berada di hutan produksi terbatas mencapai 12.823,41 Ha. Sementara itu di kabupaten Banyumas juga terdapat hutan rakyat seluas 39.671,11 Ha, sehingga total luas untuk Kawasan hutan dan hutan rakyat mencapai 68.317,81 Ha. Berikut ini ditampilkan rincian luasan hutan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Banyumas.

Tabel 3. Luasan Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Banyumas

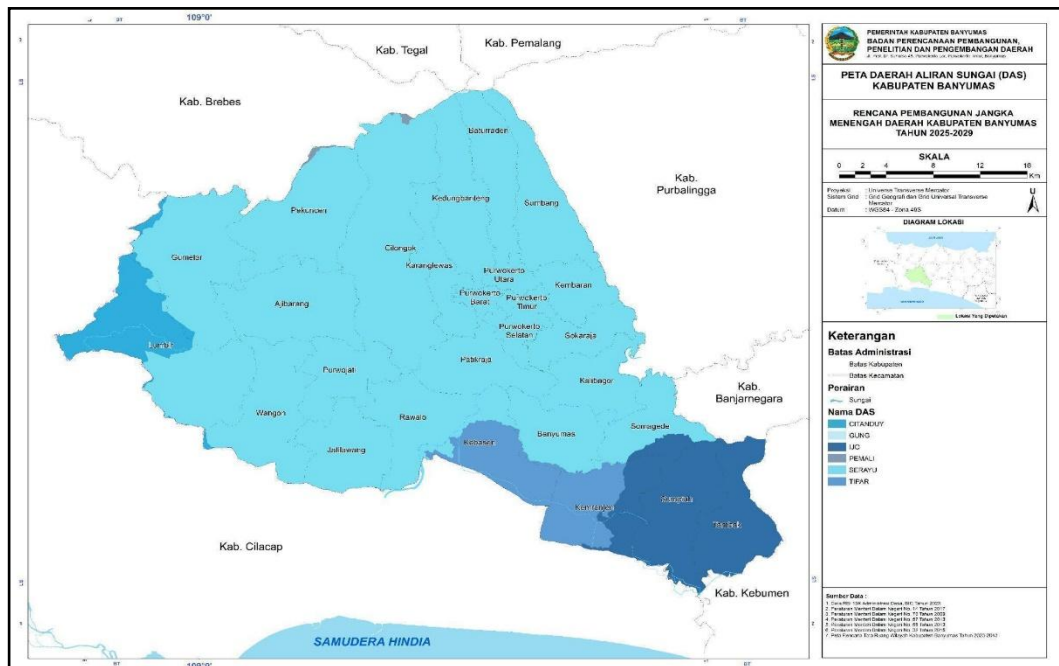
No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	10.530,71
2	Hutan Produksi	5.292,58
3	Hutan Produksi Terbatas	12.823,41
Jumlah Kawasan Hutan		28.646,70
4	Luas Hutan Rakyat	39.671,11
Total Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat		68.317,81

Sumber: SK MenLHK Nomor 6605 Tahun 2021

vi. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Banyumas menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan, dan kualitas sumber daya air di wilayah Kabupaten Banyumas, dan dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumber daya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah.

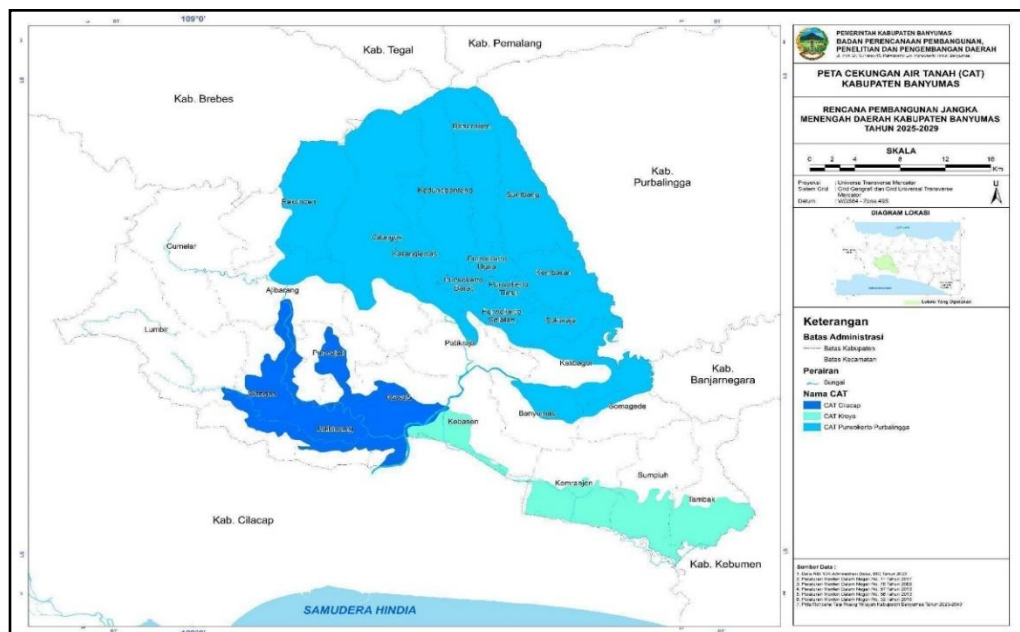
Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, Cimeneng, Serayu, Ijo, Tipar, Pemali, dan Gung. Ketujuh DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di antara tujuh DAS tersebut, DAS Serayu merupakan DAS dengan luasan paling besar. Sebagai daerah tengah-hilir Sungai Serayu, aktivitas di hulu sungai di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara akan sangat berpengaruh pada kondisi sungai di Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk sumber irigasi pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan.



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 10. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Banyumas

Air tanah yang telah dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah (CAT) Purwokerto–Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya, Cekungan Air Tanah Cilacap, Cekungan Air Tanah Lebaksiu, dan Cekungan Air Tanah Banyumudal. Cekungan air di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada peta berikut ini:



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 11. Peta Cekungan Air Tanah

Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima), yaitu:

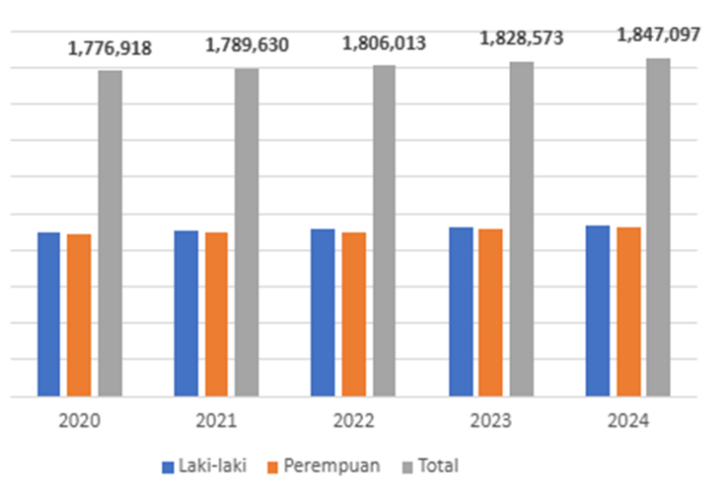
- 1). Potensi air bawah tanah tinggi, berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda), Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m³/hari/km, Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.
- 2). Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang, berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.
- 3). Potensi air bawah tanah sedang, berada pada kelulusan sedang, meliputi: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10

- liter/detik, dan 2) air tanah pada aluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m³/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.
- 4). Potensi air bawah tanah rendah, berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada aluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).
 - 5). Potensi air bawah tanah langka, berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

2. Aspek Kependudukan

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

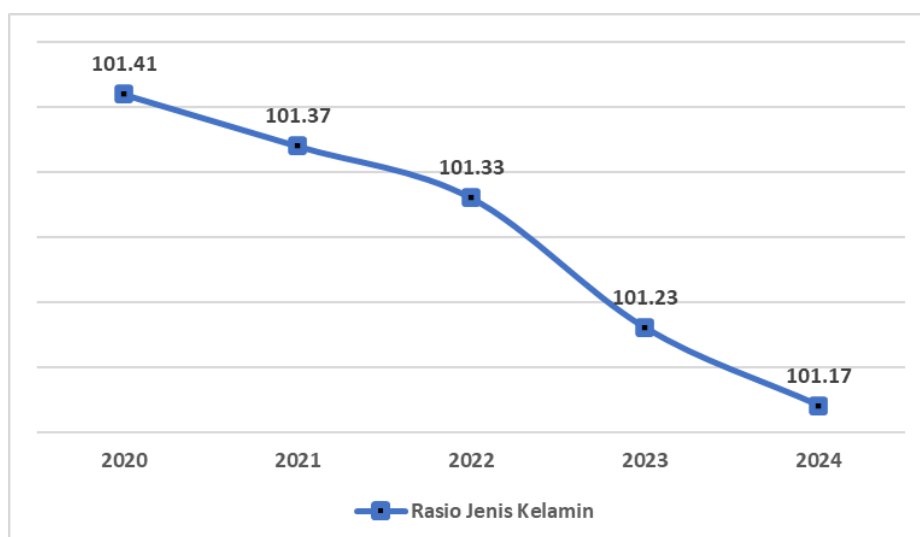
Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 70.179 jiwa, dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 1.847.097 jiwa, terdiri dari 928.905 laki-laki dan 918.192 perempuan. Berikut grafik jumlah penduduk Kabupaten Banyumas 2020-2024:



Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2025

Gambar 12. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

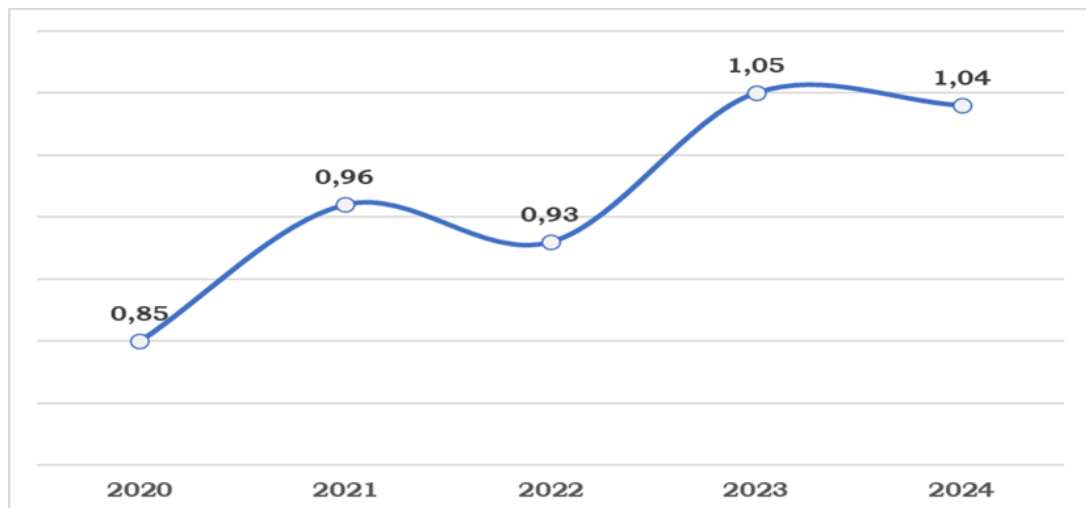
Dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tersebut dapat dihitung rasio jenis kelaminnya. Rasio jenis kelamin Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2020 sampai 2024 cenderung menurun, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah laki-laki relatif semakin sedikit terhadap jumlah perempuan. Nilai rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Gambar 13 di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Gambar 13. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Banyumas

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 1,05%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Kemudian di tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk sedikit menurun menjadi 1,04%. Sementara itu, sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata, dimana Cilongok menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan 128.614 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 38.846 jiwa.



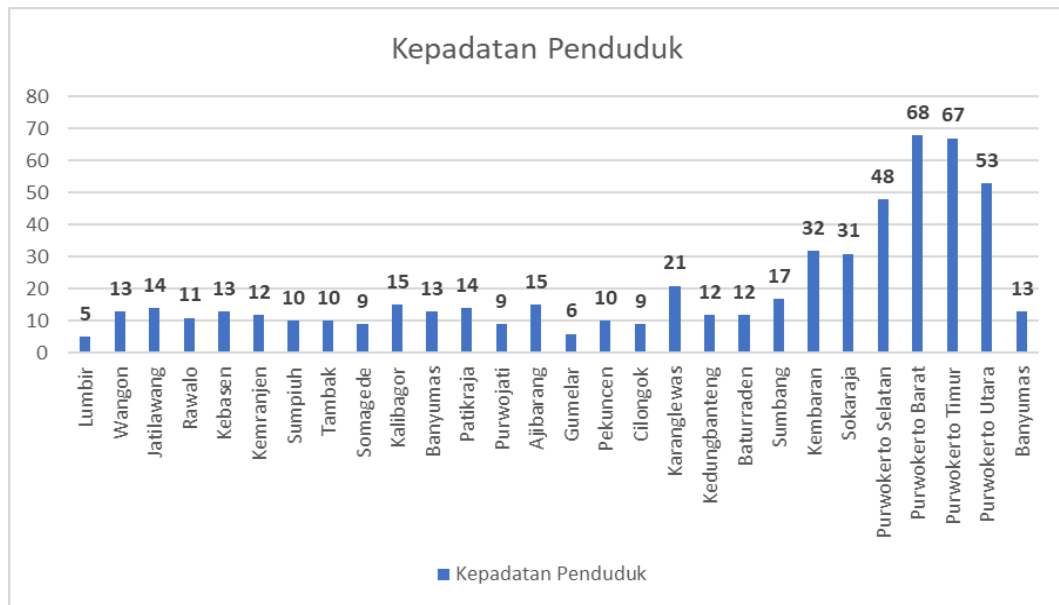
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Gambar 14. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banyumas

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas terpusat di perkotaan Purwokerto, yaitu di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara, dengan kepadatan penduduk rata-rata 13 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Banyumas terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 68 jiwa/Ha dan terendah berada di Kecamatan Lumbir dengan kepadatan 5 jiwa/Ha.

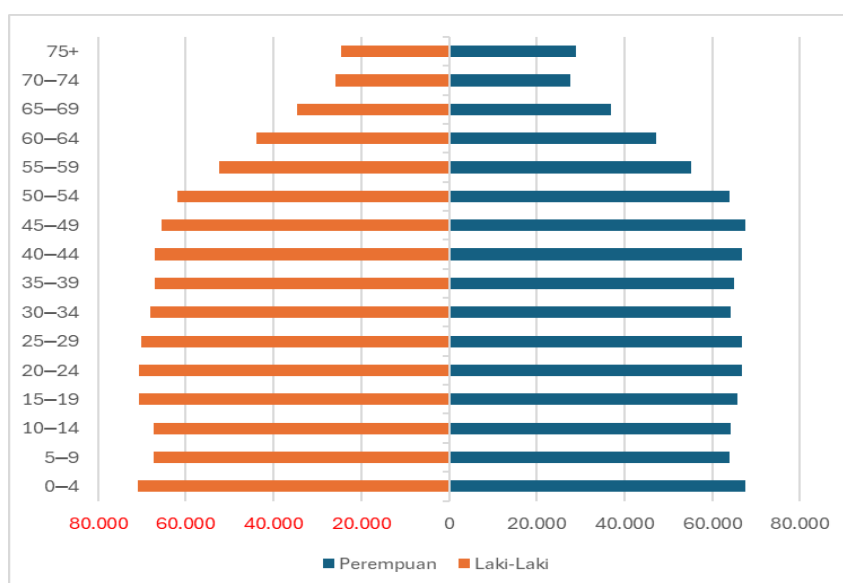
Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025, diolah

Gambar 15. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas

Mayoritas penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), yaitu sebesar 1.267.301 jiwa atau sebesar 68,61% dari total penduduk. Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebesar 45,75%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas sudah memasuki masa bonus demografi.

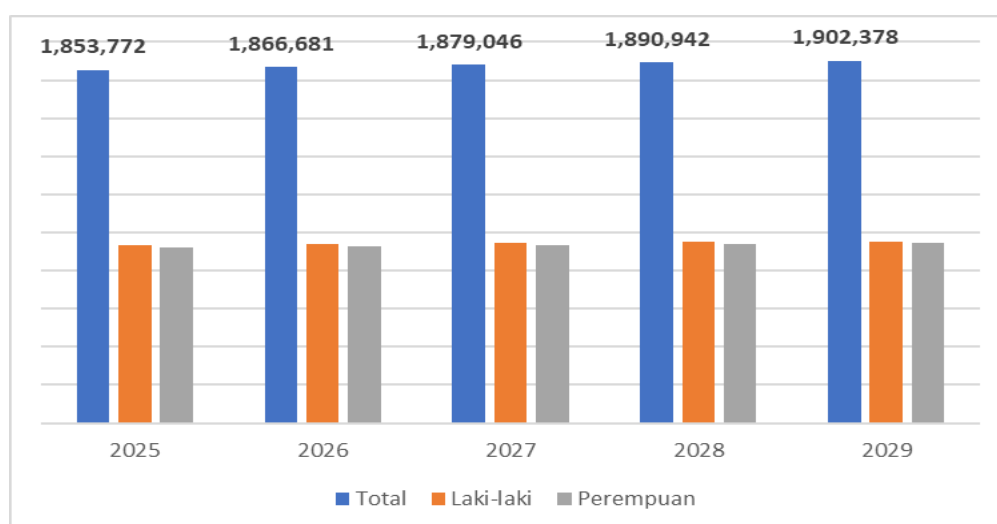


Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2025, diolah

Gambar 16. Piramida Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2024

c. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2025-2029 memiliki tren yang meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 1.853.772 jiwa diperkirakan meningkat menjadi 1.902.378 jiwa pada tahun 2029.

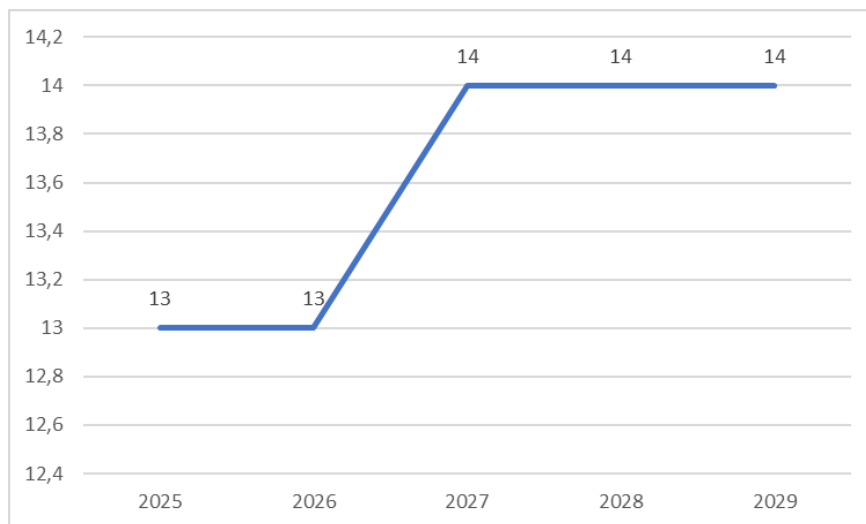


Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 17. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyumas

d. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Dengan asumsi tren kepadatan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas masih terpusat pada Kawasan Perkotaan Purwokerto. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada rentang tahun 2025–2029 diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat pada tahun 2023 sebesar 13,14 jiwa/Ha menjadi 13,67 jiwa/Ha di tahun 2029.

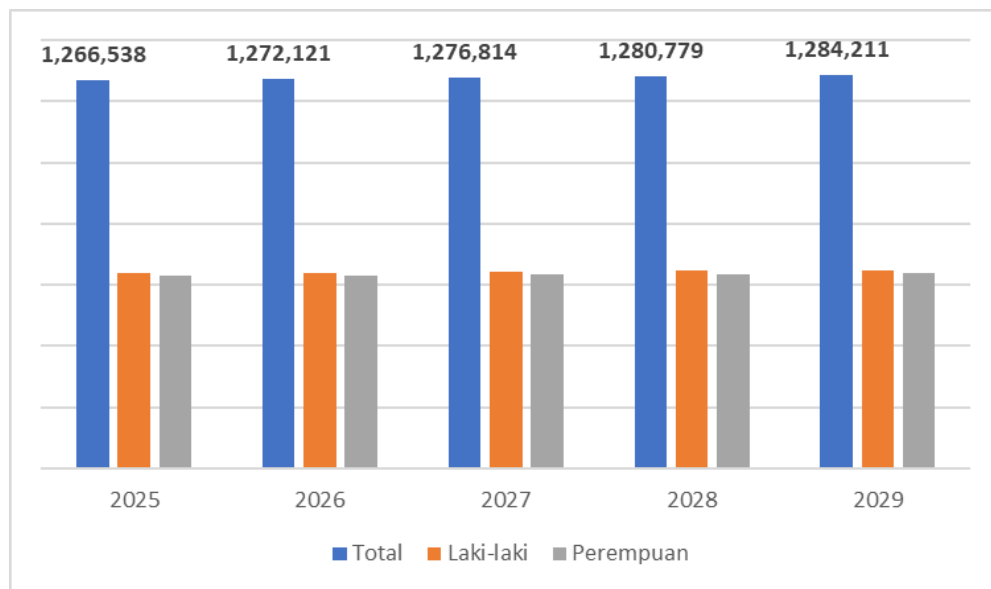


Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 18. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas

e. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

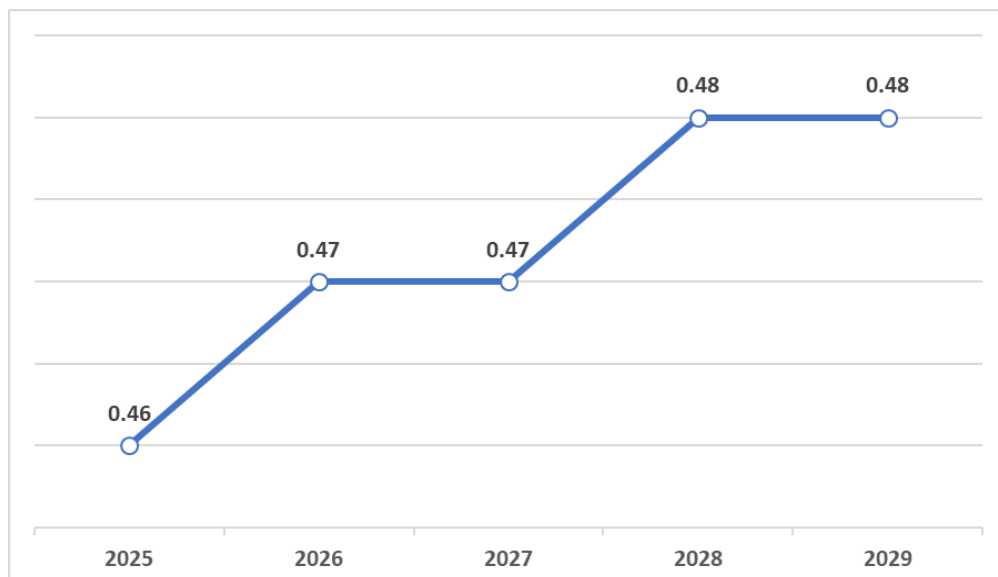
Proyeksi proporsi penduduk usia produktif mendominasi komposisi penduduk pada tahun 2025-2029.



Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 19. Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2029

Proyeksi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 cenderung meningkat. Meskipun demikian, dominasi penduduk usia produktif selama kurun waktu tersebut Kabupaten Banyumas masih akan mengalami bonus demografi.



Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 20. Proyeksi Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*)

Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Hal ini disebut bonus karena tidak terjadi terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun. Terjadinya bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara. Bonus demografi dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi, jika:

- 1). Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita. Hal ini terjadi apabila ada kesempatan kerja yang produktif, dan bisa menabung;
- 2). Meningkatnya peranan perempuan, dengan jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, dan membantu peningkatan pendapatan;
- 3). Tabungan rumah tangga yang diinvestasikan secara produktif.

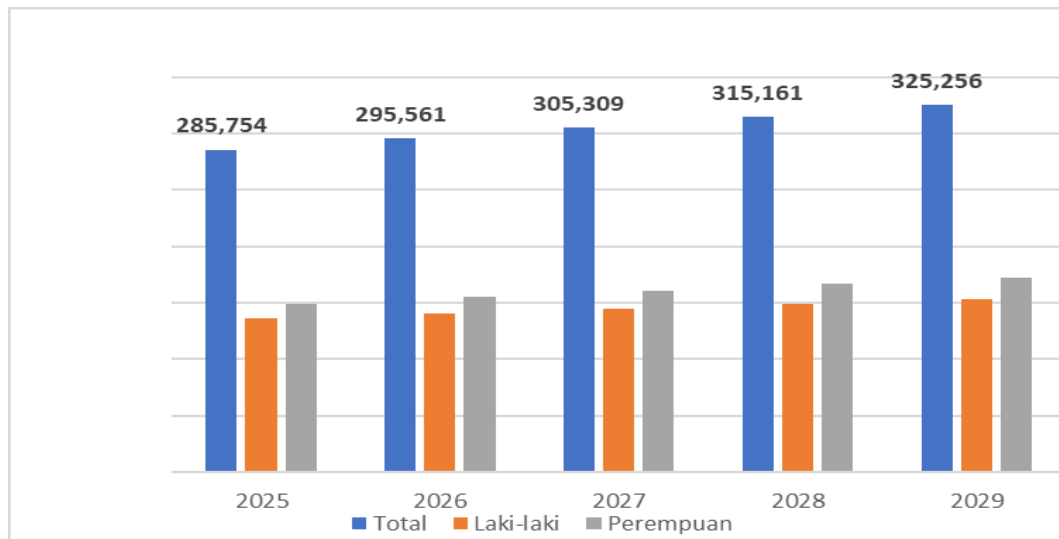
f. Modal Manusia Berkualitas

Pemerintah menetapkan 4 (empat) syarat untuk dapat memanfaatkan peluang Bonus Demografi yaitu: penduduk harus berkualitas, penduduk produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan peningkatan kualitas modal manusia, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kecukupan gizi, kemampuan berkomunikasi, menguasai matematika dan teknologi serta aspek-aspek sosial-budaya lainnya, peningkatan lapangan kerja, dan kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030. Peningkatan kualitas manusia harus dimulai sekarang, karena kelompok umur

0-14 tahun akan menjadi angkatan kerja di masa datang. Perencanaan pembangunan tahunan maupun jangka menengah menjadi langkah strategis untuk menangkap peluang bonus demografi. Jika pemerintah daerah tidak bertindak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kecukupan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan mensinergikan program tersebut dalam perencanaan pembangunan maka rantai kemiskinan antar generasi berlanjut.

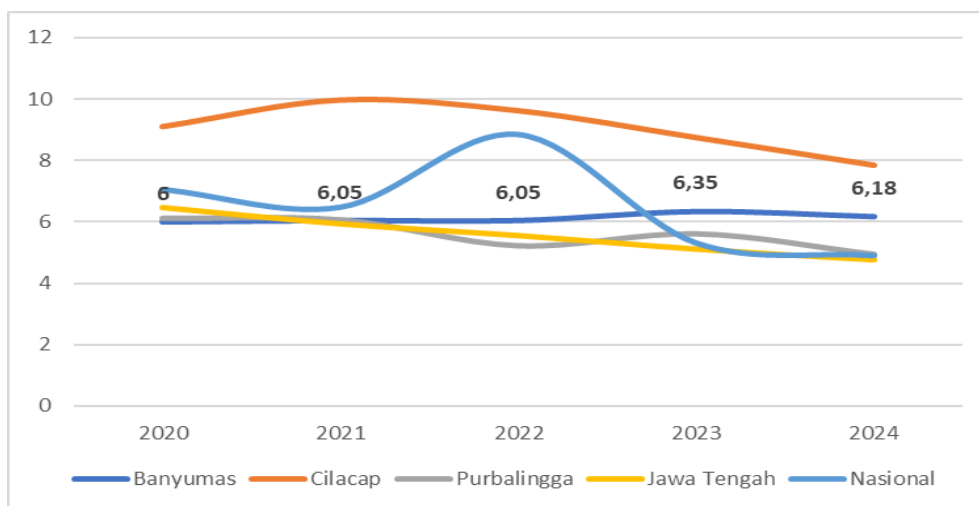
g. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Penduduk usia lanjut menurut World Health Organization (WHO) adalah penduduk dengan usia 60 tahun ke atas. Proyeksi penduduk usia lanjut tahun 2025-2029 cenderung meningkat dari 285.754 jiwa pada 2025 menjadi 325.256 jiwa di tahun 2029.



Sumber : Data GDPK Kabupaten Banyumas diolah , 2024

Gambar 21. Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 22. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024

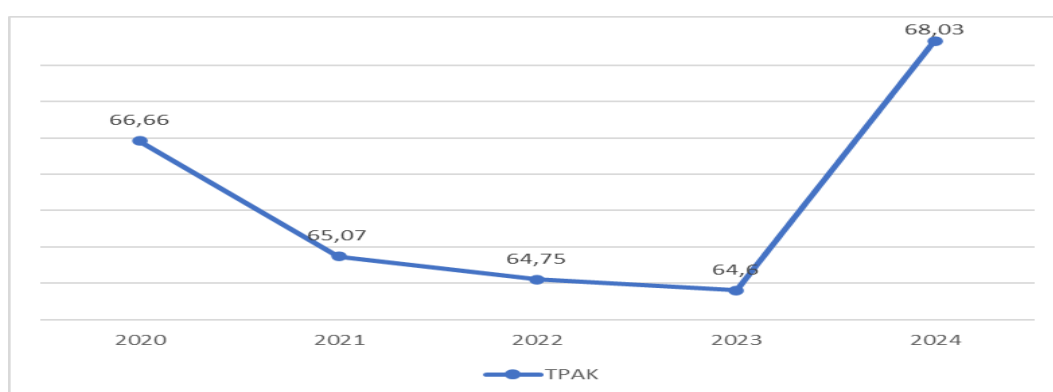
3. Aspek Ketenagakerjaan

Dinamika ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TPT Kabupaten Banyumas terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023. Namun pada tahun 2024, TPT Kabupaten Banyumas mengalami penurunan menjadi 6,18%. Namun meski mengalami penurunan, TPT Banyumas masih lebih tinggi dari Nasional dengan 4,91% dan Jawa Tengah dengan 4,78% (Gambar 22). Faktor utama yang mempengaruhi angka ini antara lain ketersediaan lapangan kerja serta kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi dunia kerja. Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka Banyumas dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitar.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Banyumas meningkat pada tahun 2024. Meski mengalami penurunan dalam 4 tahun sebelumnya, TPAK Kabupaten Banyumas mencapai 68,03%, meningkat 3,43%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya *labor*

supply yang memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Banyumas. Lebih sederhana, semakin tinggi TPAK, semakin tinggi pula potensi usia produktif yang dapat memproduksi barang dan jasa. Meskipun berhasil meningkat pada tahun 2024, masih adanya permasalahan tenaga kerja yaitu masih banyaknya ketidakcocokan antara kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan pasar kerja. Berikut data TPAK Kabupaten Banyumas dari tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 23. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas

Pengangguran berjenis kelamin laki-laki tercatat 39.907 orang, sementara perempuan hanya 18.820 orang. Meskipun jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak, namun angkatan kerja yang bekerja juga lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2023 adalah 46,08%.

b. Jumlah Pencari Kerja

Jumlah pelamar kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Banyumas pada tahun 2024 adalah 10.616 orang, dengan rincian 4.750 pria dan 5.866 wanita. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 4,6% dibandingkan tahun 2022. Menurut tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, jumlah pencari kerja yang terdaftar terbanyak adalah lulusan SMA sederajat dengan persentase 77,68%, kemudian lulusan SMP sederajat sebesar 8,99%, dan lulusan sarjana sebesar 7,14%. Berdasarkan kategori jabatan, jumlah pencari kerja terbanyak berasal dari kategori operator serta perakitan mesin dan mesin pabrik sebesar 32,40%, diikuti oleh pekerja kasar terampil dan sejenis yang tidak termasuk kategori lainnya sebanyak 15,86%, dan tenaga usaha jasa serta penjual barang di toko dan pasar mencapai 14,70%. Berdasarkan kelompok umur produktif, jumlah pencari kerja tertinggi adalah pada kelompok umur 20-29 tahun, dengan total 4.686 orang (44,14%).

Total lowongan pekerjaan yang tercatat pada tahun 2024 mencapai 18.893 dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah SMA atau sederajat dengan proporsi 71,08%. Berdasarkan kategori jabatan, lowongan kerja yang terdaftar terbanyak adalah kategori operator dan perakitan mesin serta mesin pabrik dengan persentase sebesar 41,90%, diikuti pekerja kasar terampil dan sejenisnya sebesar 26,82%. Sektor atau bidang usaha terdepan yang memberikan kesempatan kerja adalah industri pengolahan (43,20%), Perdagangan Besar dan Eceran; serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (10,61%), dan jasa individu yang melayani rumah tangga; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh

rumah tangga yang dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan (10,31%).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas 7 Maret 2025, sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 menunjukkan gambaran yang menarik jika dilihat dari indikator utama seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara keseluruhan, TPAK total sebesar 68,03%, yang menunjukkan sekitar dua pertiga dari populasi usia kerja telah terlibat dalam pasar kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. TPAK pria mencapai 85,44%, sedangkan wanita hanya 50,62%. Angka ini menunjukkan bahwa pria masih menguasai pasar kerja, sedangkan wanita sebagian besar berada di luar angkatan kerja. Aspek sosial budaya, tanggung jawab rumah tangga, dan akses ke kesempatan kerja dapat menjadi penyebab tingginya tingkat ketidakaktifan perempuan.

Meskipun demikian, dari perspektif Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Kabupaten Banyumas mencapai angka tinggi, yaitu 93,82% secara keseluruhan. Artinya, mayoritas penduduk yang telah memasuki angkatan kerja dapat menemukan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Banyumas mampu menyerap tenaga kerja yang ada.

Jika dilihat berdasarkan gender, TKK laki-laki berada di angka 93,27%, sedikit lebih rendah dibanding perempuan yang mencapai 94,74%. Situasi ini menunjukkan bahwa walaupun partisipasi perempuan

tergolong rendah, mereka yang terjun ke pasar kerja cenderung lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh perempuan yang bekerja umumnya sudah memiliki keterampilan atau jabatan yang lebih aman.

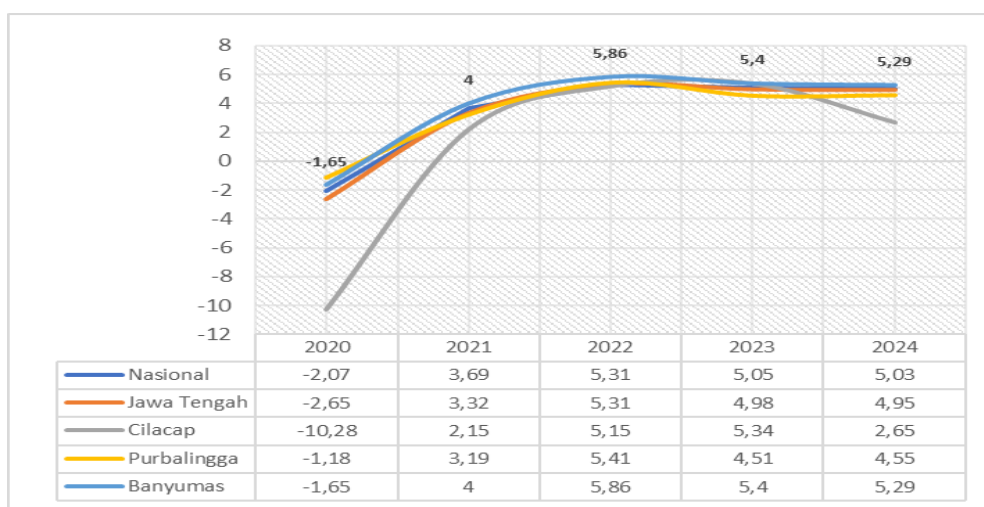
Tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang rendah menjadi salah satu tantangan utama. Sebenarnya, apabila perempuan diberdayakan lebih lanjut melalui pelatihan, penyediaan kesempatan kerja yang inklusif, dan dukungan sosial, sumbangsih mereka terhadap ekonomi daerah akan semakin meningkat. Kesenjangan gender di tempat kerja merupakan prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banyumas.

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas belum disertai dengan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2024, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 23%. Kondisi dan kualitas angkatan kerja di Kabupaten Banyumas saat ini belum memiliki daya tawar dan daya saing yang kuat untuk mampu menghadapi free flow skilled labour. Melihat kondisi yang akan dihadapi sebagai konsekuensi dari globalisasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus menyiapkan secara optimal dan berkelanjutan agar angkatan kerja di Kabupaten Banyumas mampu memiliki daya tahan dan daya saing. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, upaya pengembangan sumberdaya manusia perlu terus ditingkatkan melalui berbagai strategi antara lain peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan pendidikan dan pelatihan serta perluasan lapangan kerja.

4. Aspek Kesejahteraan

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Banyumas semakin membaik setelah mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*. Membaiknya perekonomian Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam 5 tahun terakhir. Sempat mengalami kontraksi hingga -1,65% pada tahun 2020, perekonomian Banyumas beranjak pulih dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3% dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas adalah 5,29%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan 5,03% dan Provinsi Jawa Tengah dengan 4,95%. Lebih lanjut, Laju Pertumbuhan Ekonomi Banyumas konsisten tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten Cilacap dan Purbalingga sejak tahun 2020. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas, Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 24 berikut ini:



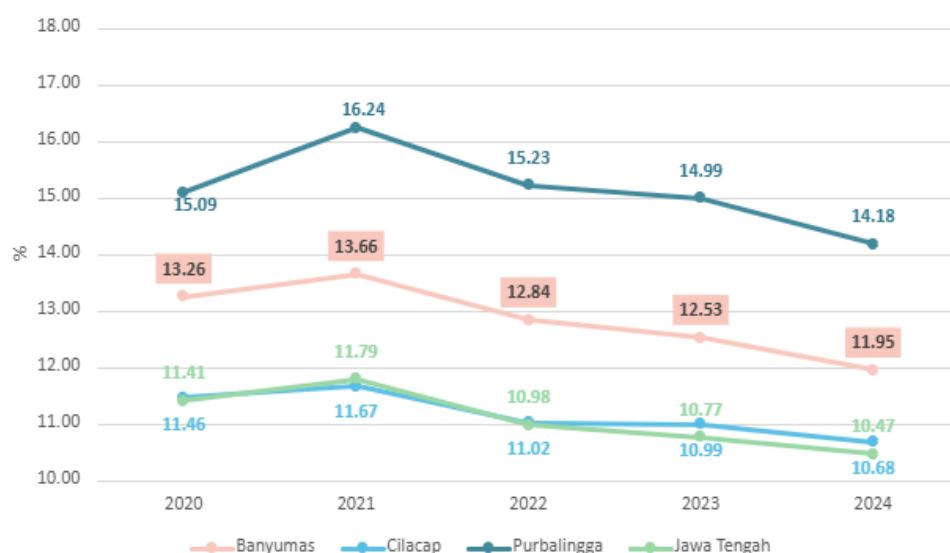
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Gambar 24. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Banyumas adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Nasional, Jawa Tengah, Cilacap, dan Purbalingga, Ekonomi Banyumas di tahun 2024 tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan negatif dari Sektor Pertanian pada 2024 dengan nilai -0,54%. Sementara itu, sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor Industri dengan share mencapai 26,40%.

b. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menurun sebesar 0,58% dari 12,53% pada tahun 2023 menjadi 11,95% di tahun 2024. Perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 25 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 25. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih berada di atas angka

kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Selain kemiskinan umum, kemiskinan ekstrem juga masih menjadi permasalahan yang belum mencapai 0%, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eskترم.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas adalah belum meratanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya layanan sanitasi dan rumah layak huni. Hal ini dapat dilihat dari hasil verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2024 oleh dinsospermasdes Kabupaten Banyumas kebutuhan RTLH sebanyak 15.603 unit, dan kebutuhan Sanitasi sebesar 18.099 unit serta kebutuhan air bersih sebesar 18.712 satuan sambungan rumah Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat miskin dan memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan. Selain itu, belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat miskin juga menjadi kendala dalam mendorong kemandirian ekonomi, sehingga banyak kelompok rentan masih bergantung pada bantuan sosial tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Masalah lain yang memperparah kondisi ini adalah masih adanya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam pendataan kemiskinan yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Perbedaan data antara Kementerian Sosial dan Kemenko PMK semakin memperumit upaya intervensi, karena terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan sasaran

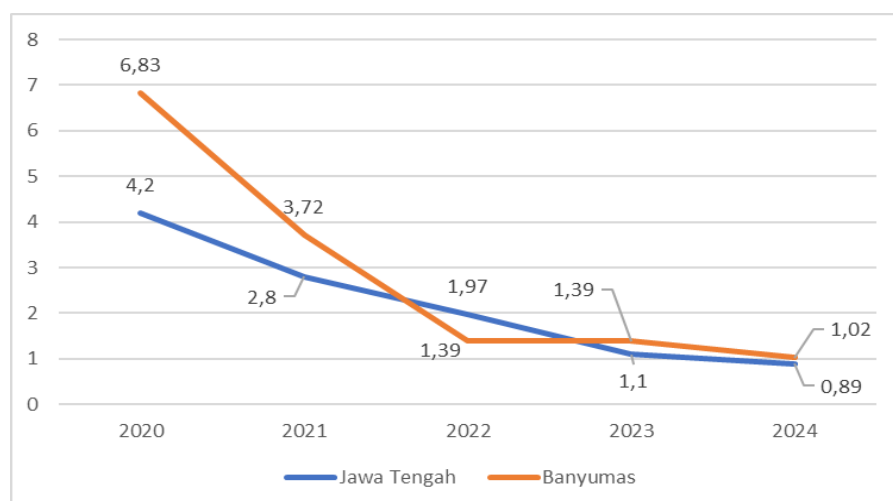
penerima bantuan. Akibatnya, hanya sekitar 60% penerima bantuan yang benar-benar tepat sasaran, sementara 40% lainnya masih belum terjangkau bantuan sosial yang seharusnya. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan hal ini terlihat dari nilai RB tematik kemiskinan tahun 2024 untuk capaian dampak masih rendah dengan nilai 1 dari total bobot 3, dikarenakan koordinasi yang kurang terintegrasi menghambat efektivitas program dan distribusi sumber daya.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas mencapai 6,83%. Namun, berkat berbagai intervensi, angka ini turun drastis menjadi 1,02 % pada tahun 2024. Namun, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama, yaitu sebesar 0,89%.

Penurunan kemiskinan ekstrem di Banyumas didorong oleh program-program seperti penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air bersih dan listrik, pembangunan jamban, serta penanganan stunting. Selain itu, program untuk mengatasi anak tidak sekolah (ATS), dukungan bagi penyandang disabilitas, dan mereka yang tidak bekerja juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Pada tahun 2023 dan 2024, implementasi program pendampingan "Satu OPD Satu Desa Dampingan" di desa prioritas ekstrem juga berkontribusi signifikan dalam memastikan bantuan dan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi, Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMD, Baznas, dan alokasi APBD Kabupaten, turut memperkuat upaya

penurunan kemiskinan ekstrem ini. CSR dan BUMD memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Pembiayaan alternatif melalui CSR dari BUMD tidak hanya memperbesar alokasi dana, tetapi juga memperluas jangkauan program-program sosial, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), jamban, dan penanganan stunting. Dengan demikian, bantuan yang diterima masyarakat miskin menjadi lebih banyak dan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, penting untuk memperbaiki tata kelola dan basis data kemiskinan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat terlaksana secara lebih efektif. Pendekatan kolaboratif dan multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, akan sangat menentukan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas.

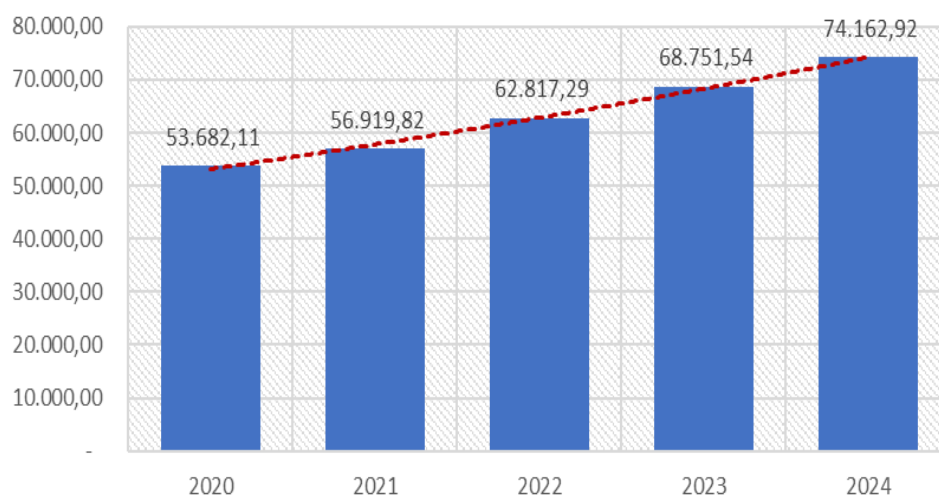


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 26. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Banyumas telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam perekonomian. Kemajuan ini dilihat dari meningkatnya nilai Produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun pembangunan. Pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Banyumas mencapai Rp 74 Triliun, meningkat 1,38% kali lipat dari tahun 2020. PDRB Banyumas masih dibawah Cilacap dengan Rp 135 Triliun, dan diatas Purbalingga dengan Rp 33 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah, PDRB Banyumas berkontribusi sekitar 4,08% meningkat 0,03% dibandingkan dengan tahun 2023.



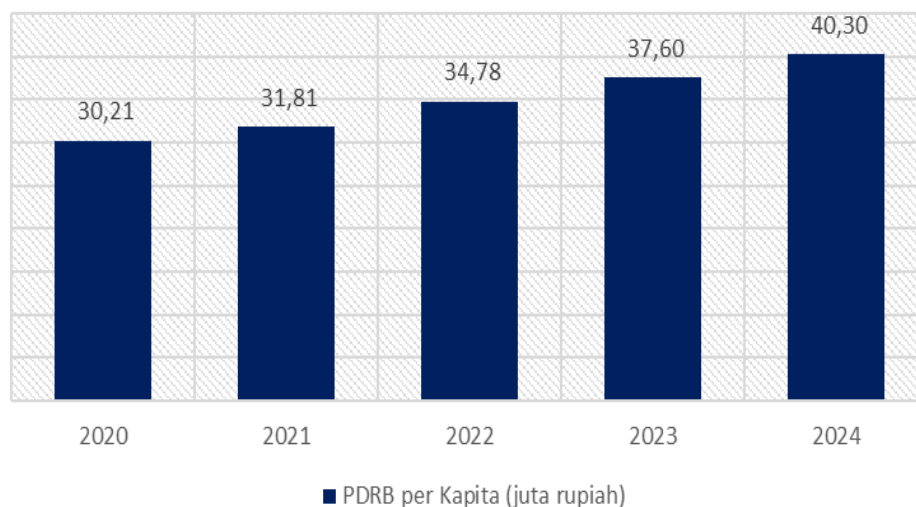
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

Gambar 27. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

d. PDRB per Kapita

Seiring dengan peningkatan ekonomi daerah, nilai PDRB per kapita terus meningkat dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp.40,30 juta. Peningkatan ini menggambarkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Banyumas dalam satu tahun

mencapai Rp.40,30 juta per tahunnya atau sekitar Rp.3,35 juta per bulannya. Rincian perkembangan PDRB Perkapita ADHB 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 28 di bawah ini:



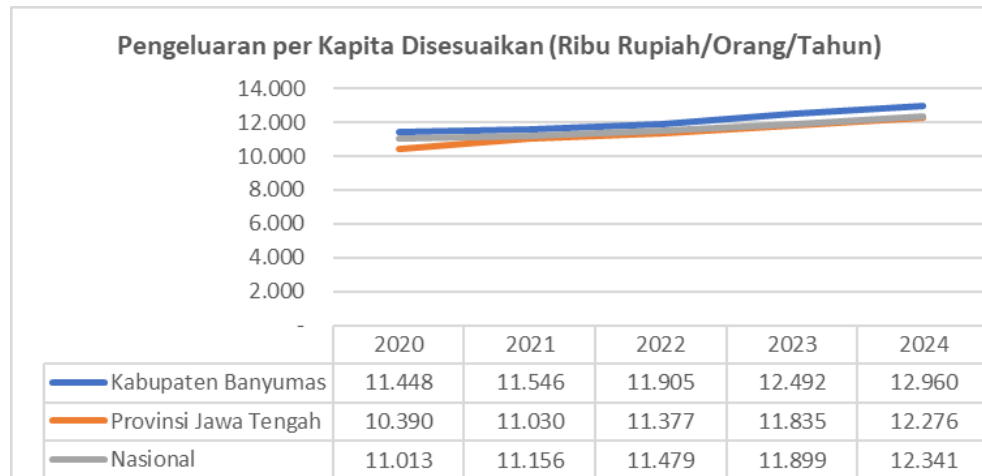
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2025, diolah
Gambar 28. Produk Domestik Regional Bruto ADHB Per Kapita

e. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Banyumas telah terjadi peningkatan selama periode 2020-2024 dari Rp. 11.448.000 di tahun 2020 menjadi Rp. 12.960.000 di tahun 2024 dan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 12.276.000 dan nasional sebesar 12.341.000. Jadi peningkatan paritas daya beli

tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita

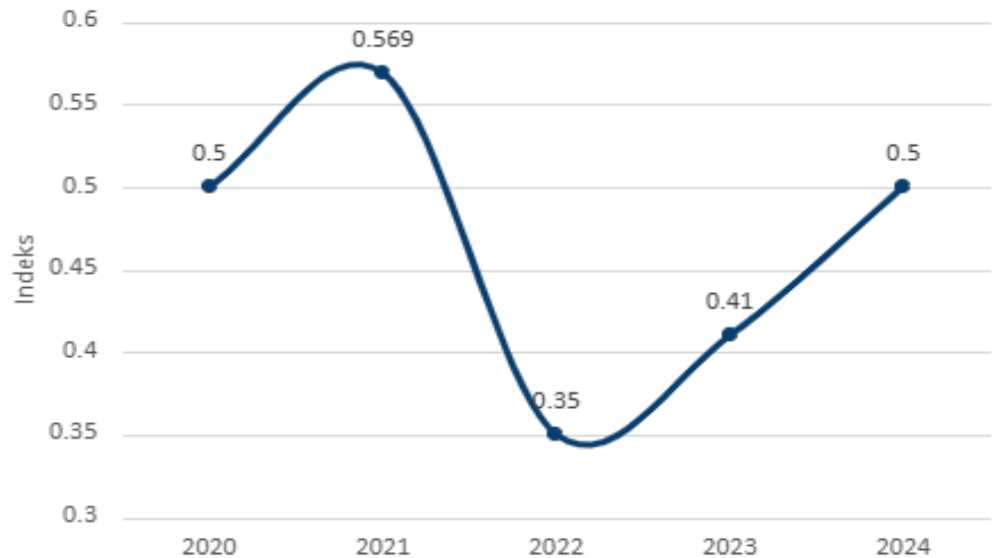


Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2025, diolah
Gambar 29. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

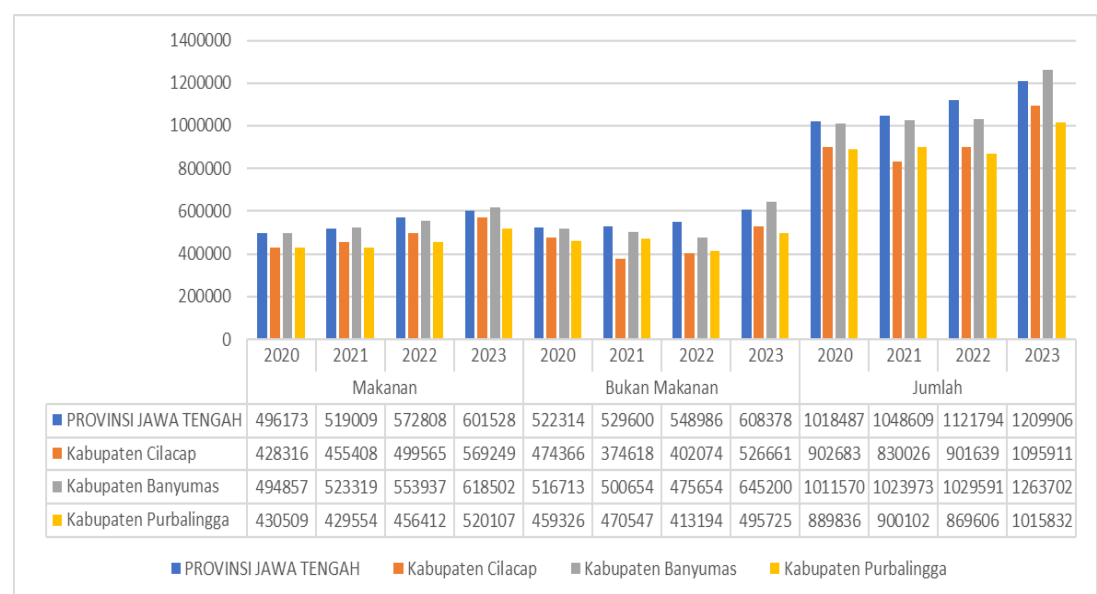
f. Indek Keparahan Kemiskinan

Indek keparahan kemiskinan yang semakin tinggi, menggambarkan ketimpangan pendapatan yang semakin besar di dalam kelompok miskin itu sendiri, dan mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di kalangan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan semakin memperburuk kemampuan mereka untuk mengatasi kondisi kemiskinan. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2020-2024 fluktuatif, dimana dari tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu 0,41 menjadi 0,5 di tahun 2024. Hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan yang semakin lebar di antara penduduk miskin. Kenaikan ini menandakan bahwa selain tantangan untuk meningkatkan pendapatan, kelompok miskin di Banyumas juga menghadapi kesulitan lebih besar dalam meningkatkan taraf hidupnya karena adanya ketimpangan yang semakin signifikan di dalam

komunitas mereka. Perkembangan Indeks Keparahen Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 30 berikut ini.



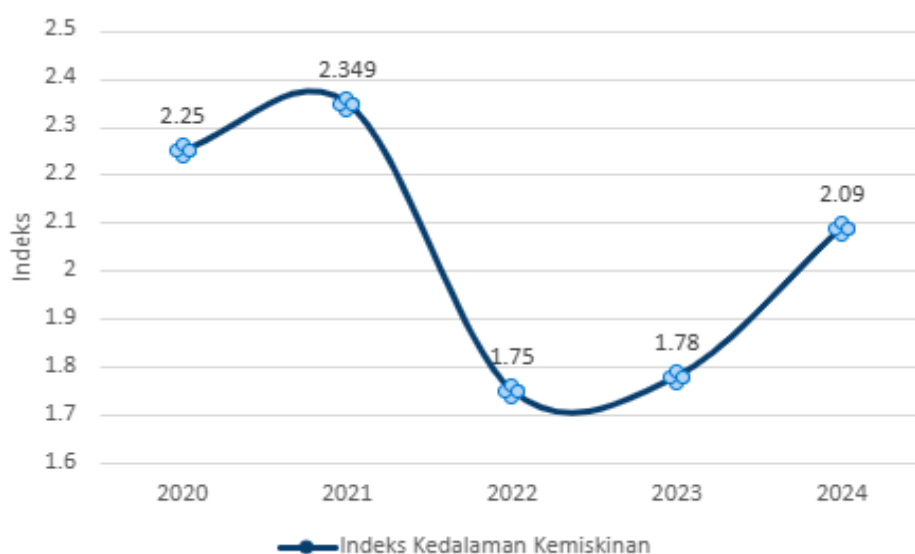
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024
Gambar 30. Indeks Keparahen Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024
Gambar 31. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah) Tahun 2020-2024

g. Indek Kedalaman Kemiskinan

Seluruh permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banyumas, mulai dari tingginya angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, ketimpangan pendapatan, hingga keterbatasan pemenuhan infrastruktur dasar, saling terkait dan berdampak langsung pada kedalaman kemiskinan. Pada periode 2020-2024, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banyumas menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan kenaikan dari 1,78 pada tahun 2023 menjadi 2,09 pada tahun 2024. Semakin tinggi angka indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, yang memperburuk kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kenaikan ini mencerminkan bahwa kelompok miskin di Banyumas semakin kesulitan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sementara kondisi ekonomi yang stagnan, rendahnya akses terhadap layanan dasar, dan keterbatasan peluang ekonomi semakin memperpanjang jarak mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

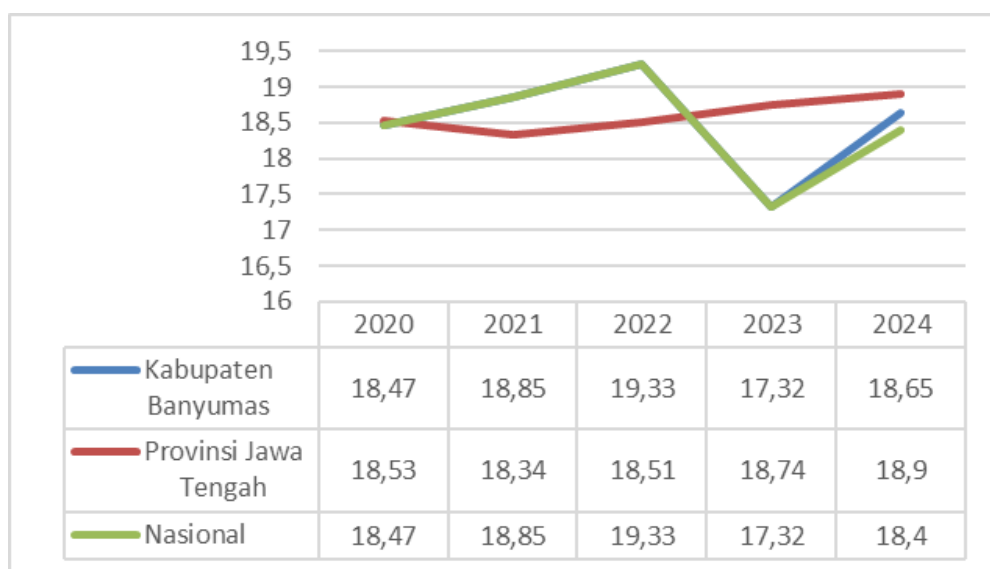


Gambar 32. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas

h. Distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terendah berdasarkan Bank Dunia

Selain tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, akurasi data, dan efektivitas program pemberdayaan, ketimpangan pendapatan juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2020 distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terendah di Kabupaten Banyumas sebesar 18,47%, namun mengalami kenaikan menjadi 18,65% pada tahun 2024. Meskipun angka ini mengalami kenaikan yang cukup baik, tetapi ketimpangan di Kabupaten Banyumas lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang tercatat 18,9% namun lebih kecil ketimpangannya dari nasional yang tercatat sebesar 18,4.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas.



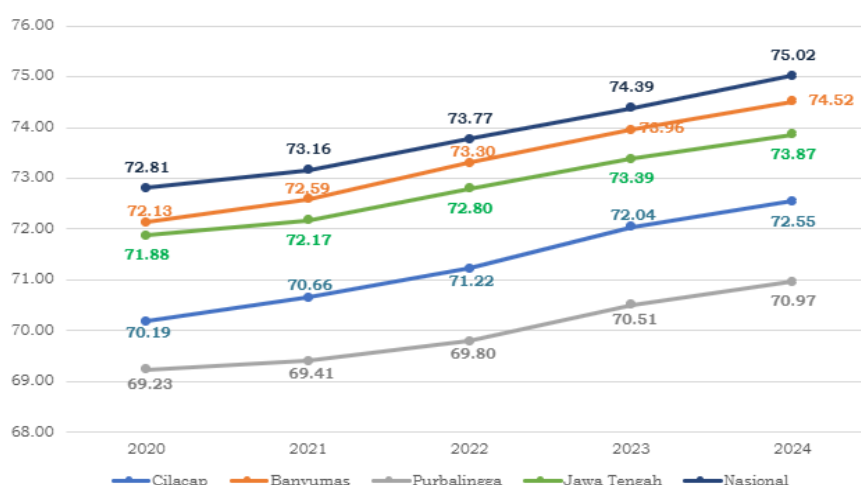
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024

Gambar 33. Distribusi Pengeluaran Kabupaten Banyumas,

i. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, dengan komponen pembentuk yaitu kualitas pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, kualitas kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup dan kemampuan daya beli masyarakat berdasarkan komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. IPM di Kabupaten Banyumas berdasarkan metode baru perhitungan Angka Harapan Hidup Long Form SP2020 periode 2020-2024 terus meningkat seiring meningkatnya nilai-nilai komponen pembentuknya. Pada tahun 2024 nilai IPM Kabupaten Banyumas sebesar 74,52 menempatkan Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$) berdasarkan klasifikasi UNDP (United Nations Development Program). IPM masih menjadi sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan IPM menjadi kategori “Sangat Tinggi” (IPM lebih dari 80).

Nilai IPM Kabupaten Banyumas cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya di Wilayah Cibalingmas dan Provinsi Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional.

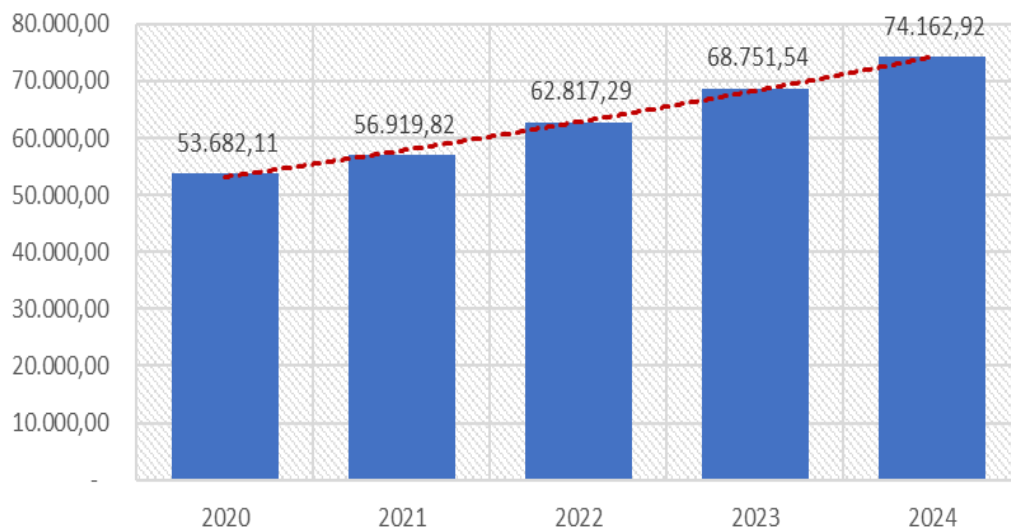


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 34. IPM Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Metode Baru Hasil Perhitungan Angka Harapan Hidup Long Form SP2020

j. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Provinsi

Kabupaten Banyumas telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam perekonomian. Kemajuan ini dilihat dari meningkatnya nilai Produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun pembangunan. Pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Banyumas mencapai Rp 74 Triliun, meningkat 1,38% kali lipat dari tahun 2020. PDRB Banyumas masih dibawah Cilacap dengan Rp 135 Triliun, dan diatas Purbalingga dengan Rp 33 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah, PDRB Banyumas berkontribusi sekitar 4,08% meningkat 0,03% dibandingkan dengan tahun 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021-2025

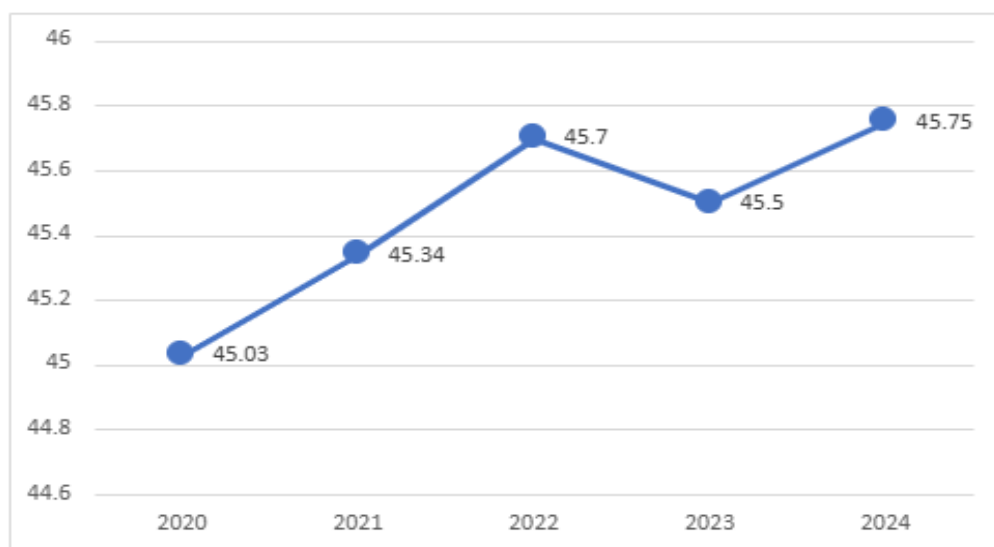
Gambar 35. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas

5. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing sumberdaya manusia terlihat salah satunya pada indikator angka ketergantungan. Angka ketergantungan

Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024 cenderung naik. Pada Tahun 2024 angka ketergantungan adalah 45,75 artinya bahwa setiap setiap 100 orang yang aktif bekerja, ada 45 orang yang bergantung pada mereka (baik karena masih anak-anak atau sudah lansia).



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, diolah 2025

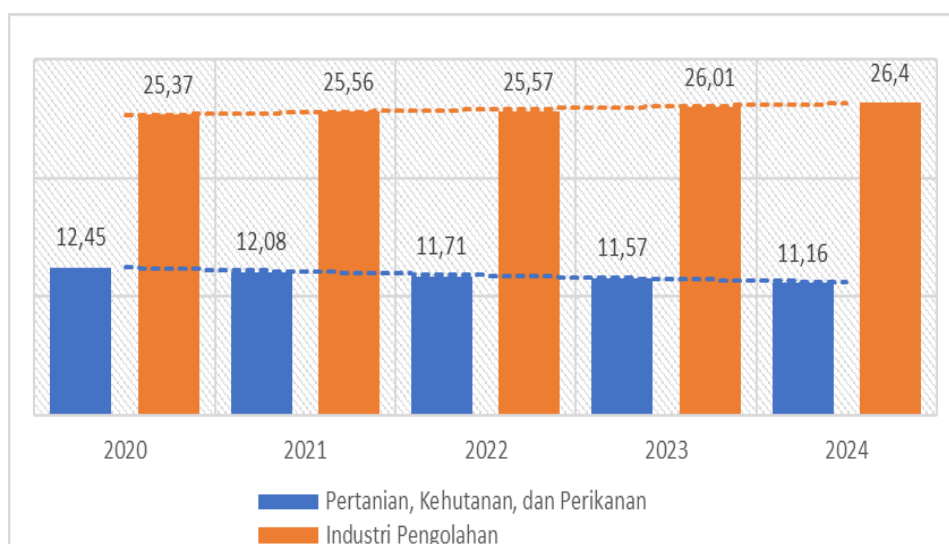
Gambar 36. Angka Ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

i. Share Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Banyumas telah mengalami pergeseran. Kontribusi (share) sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan menggeser kontribusi (share) sektor pertanian yang mengalami penurunan. Pada tahun 2024, share PDRB ADHB Sektor Industri meningkat mencapai 26,4% dari sebelum sebesar 25,37% pada tahun 2020, sementara share PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2024 menurun hingga 11,16% dari sebelumnya sebesar 12,45% tahun 2020. Pada tahun 2024, nilai PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas meningkat hingga mencapai Rp 19 Triliun dengan laju pertumbuhan

ekonomi ADHK mencapai 5,05. Sementara itu nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya mencapai Rp 8 Triliun dan mengalami penurunan hingga -0,54%. Laju pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan yang terkecil dibandingkan 16 sektor lapangan usaha lainnya. Berikut grafik pergerakan kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian dalam 5 tahun terakhir.



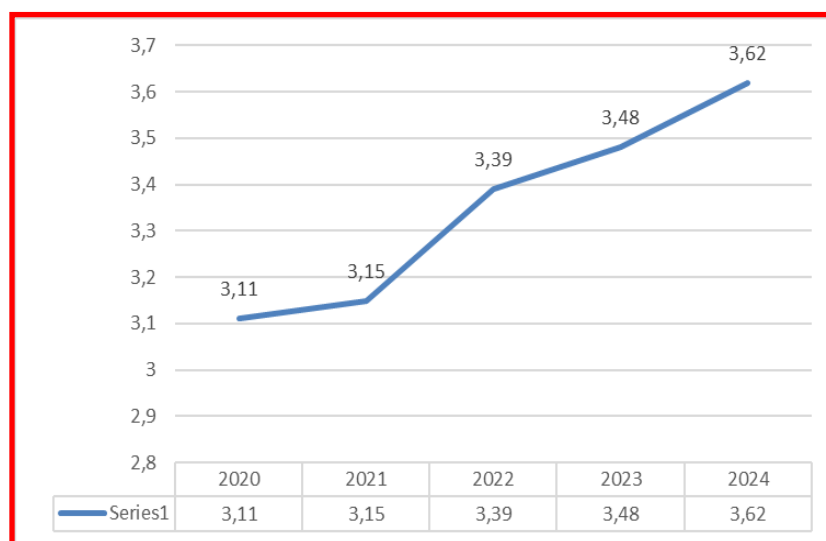
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 37. Kontribusi (Share) PDRB Sektor Industri dan Pertanian

Dalam 5 tahun terakhir share PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Banyumas merupakan yang terbesar dan selalu diatas 20%. Pada 2020 industri pengolahan memiliki share sebesar 25,37% dan menjadi 26,4% pada tahun 2024. Industri di Kabupaten Banyumas didominasi oleh industri kecil sebanyak 44.096 unit atau 99% dari total jumlah industri di Kabupaten Banyumas 2024.

Sementara itu, sektor lain yang memiliki potensi untuk berkembang adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum konsisten meningkat dalam lima tahun terakhir. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor

potensial yang dapat mendukung banyak sektor lainnya. Pada 2020 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2020 memiliki share sebesar 3,11% dan meningkat kontribusinya hingga 3,62% pada 2024. Meningkatnya share PDRB pada sektor makan minum dikarenakan beberapa faktor, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan preferensi konsumen, serta pertumbuhan sektor pariwisata.



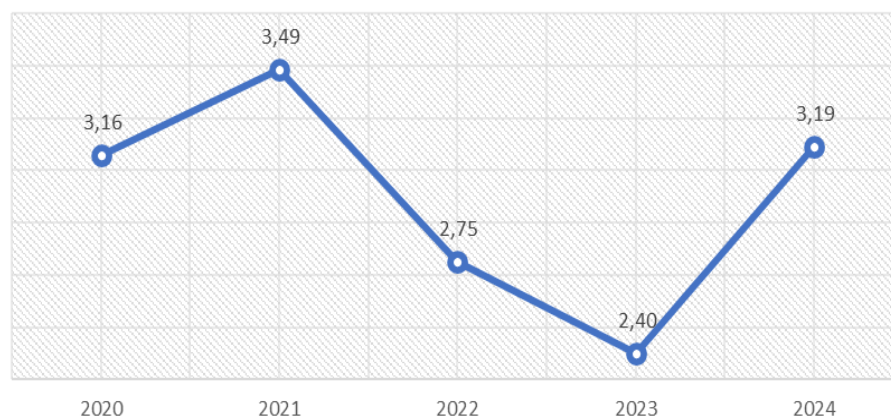
Sumber BPS Kabupaten Banyumas 2024

Gambar 38. Kontribusi (Share) PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Tahun 2020-2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)

ii. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Banyumas masih fluktuatif. Rasio kewirausahaan mengalami peningkatan pada 2021 di angka 3,49%, lalu terus menurun hingga 2023 di angka 2,4%, lalu meningkat kembali pada 2024 dengan angka 3,19%. Hal ini menggambarkan kondisi angkatan kerja yang terus bertambah tidak diimbangi dengan jumlah jumlah pengusaha yang dibantu buruh tetap dan dibayar. Fluktuatifnya rasio kewirausahaan daerah disebabkan oleh belum optimalnya pendampingan dalam pelatihan

kewirausahaan. Berikut rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Banyumas 2020-2024.

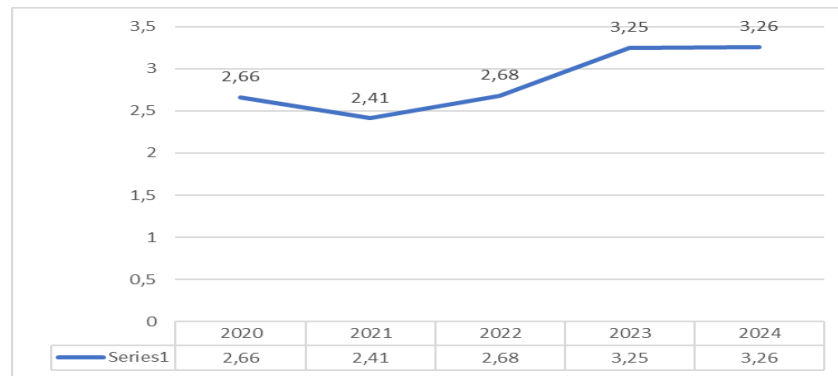


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 39. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Banyumas 2020-2024

iii. Return on Asset (ROA) BUMD

ROA BUMD merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. ROA merupakan indikator penting untuk menilai kinerja perusahaan. Di Kabupaten Banyumas ada 3 BUMD yaitu Perumdam Tirta Satria Kab Banyumas, Perumda Pasar Satria dan PT Banyumas Investama Jaya (BIJ). Dimana Return on Aset pada 3 BUMD tersebut dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan yaitu 2,66% menjadi 3,26% namun masih dibawah 5% dimana ROA dengan katagori baik dengan angka 5%. Hal ini disebabkan oleh produktivitas dan efisiensi yang belum optimal dalam menggunakan aktiva/asetnya dalam memperoleh laba.



Gambar 40. ROA BUMD Tahun 2020-2024

iv. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

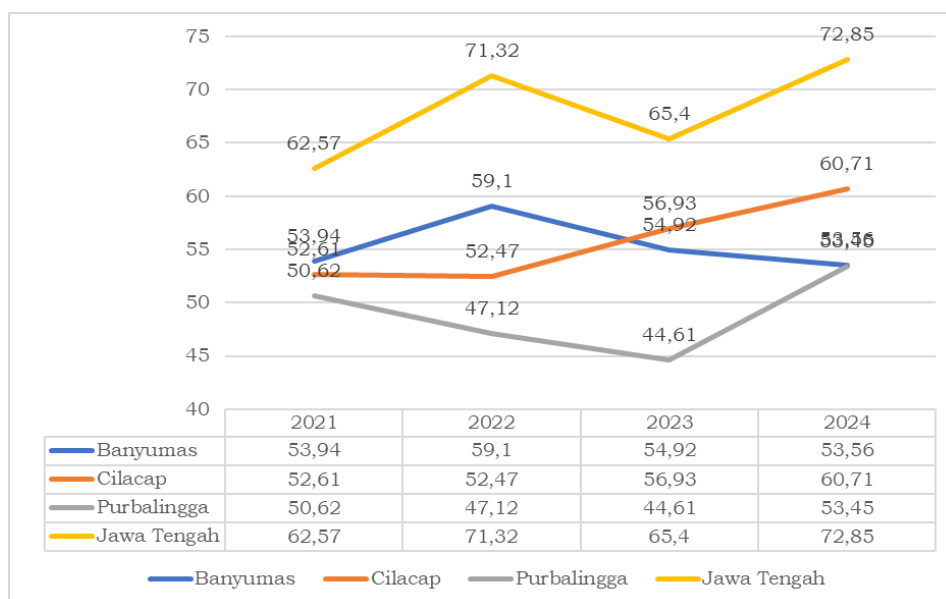
Indeks Akses Keuangan Daerah memiliki keterkaitan dengan literasi keuangan masyarakat. Terdapat 3 komponen dalam IKAD yaitu penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman. Dalam mengawal indikator ini, Kabupaten/kota akan membentuk TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah). Indikator ini termasuk baru sehingga masih sedikit informasi yang tersedia.

v. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menerapkan inovasi dalam kebijakan dan program pembangunan. Dengan adanya Indeks Inovasi Daerah, daerah dapat menilai efektivitas kebijakan inovatifnya serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar pembangunan lebih efisien dan berdaya guna. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan.

Berdasarkan Profil Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas mengalami kelemahan pada aspek jumlah

inovasi dan hasil kreatif dan aspek kecanggihan produk inovasi. Selain menjadi instrumen pengukuran untuk mengetahui perkembangan inovasi di Kabupaten Banyumas sehingga dapat menghasilkan peta pembinaan sesuai karakteristik dan permasalahan di Kabupaten Banyumas, Indeks Inovasi Daerah juga menjadi salah satu komponen variabel pengungkit Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu adanya upaya yang lebih lanjut dan strategi dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas.



Sumber: Kemendagri

Gambar 41. Indeks Inovasi Daerah Kab. Banyumas Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian tahun 2020 dibandingkan dengan tahun lainnya terdapat perbedaan dikarenakan adanya perubahan cara menganalisis variabel dan indikatornya. Indeks Inovasi Daerah Kab. Banyumas tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Cilacap. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu berkolaborasi dengan

akademisi, pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melihat perkembangan inovasi daerah, selain dari Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Banyumas juga melihat dari nilai kapabilitas inovasi daerah. Nilai pilar kapabilitas inovasi daerah pada tahun 2024 meningkat yaitu sebesar 4.25, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 3.64. Akan tetapi terdapat penambahan indikator pada Tahun 2024. Berikut perbedaan indikator pada Pilar Kapabilitas Inovasi Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 4. Nilai Kapabilitas Inovasi

Tahun	Pilar 12: Kapabilitas Inovasi							Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi
	Keanekaragaman dan Kolaborasi		Riset				Komersialisasi	
	Keanekaragaman tenaga kerja	Pengembangan Klasternya	Publikasi ilmiah	Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	Belanja Riset	Indeks keunggulaan lembaga riset	Aplikasi merek dagang	
2023	3.21	N/A	5.00	4.26	2.78	2.96	3.61	3.64
2024	3.18	5.00	4.11	4.66	5.00	3.86	3.91	4.25

vi. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik

Kabupaten/Kota per PDRB

Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat, berupa giro, tabungan, dan deposito. DPK merupakan sumber dana utama bagi bank untuk melakukan kegiatan perkreditan dan investasi dalam mendukung pertumbuhan PDRB.

Tabel 5. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Tahun	Jumlah Giro (Juta Rp)	Jumlah Tabungan (Juta Rp)	Jumlah Deposito (Juta Rp)	Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Kab.Banyumas (Juta Rp)	PDRB (Juta Rp)	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Kab.Banyumas (%)
2021	2.217.069	11.163.880	3.421.844	16.802.793	56.919.816	29,52
2022	2.268.230	11.821.874	3.529.530	17.619.634	62.817.303	28,05
2023	2.140.606	11.468.955	3.890.194	17.499.755	68.751.652	25,45
2024	2.390.504	12.088.477	4.205.008	18.683.989	74.162.920	25,19

Data BPS diolah Bappedalitbang tahun 2024

Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Banyumas dari tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami penurunan namun Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, ini menunjukkan kontribusi keuangan masyarakat dalam PDRB masih sangat kecil.

vii. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB adalah rasio yang membandingkan total kredit yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar peran perbankan daerah dalam perekonomian daerah, khususnya dalam hal penyaluran kredit.

Tabel 6. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB

Tahun	Total Kredit Pada Bank Milik Kab. Banyumas (Juta Rp)	PDRB (Juta Rp)	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB
2020	15.569.000	53.682.118	29,00
2021	16.551.769	56.919.816	29,08
2022	18.762.567	62.817.303	29,87
2023	18.297.476	68.751.652	26,61
2024	18.822.260	74.162.920	25,38

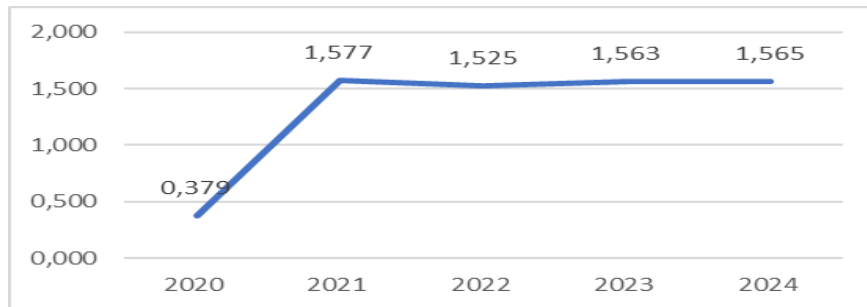
Sumber: Data BPS diolah Bappedalitbang tahun 2024

Total kredit yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah daerah kabupaten Banyumas dari tahun 2021 sampai 2024 meningkat namun rasio dengan PDRB setiap tahun menurun, dimana ini menggambarkan bahwa total kredit yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah daerah belum optimal.

viii. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu membangun dan memaksimalkan potensi wilayah adalah Koperasi. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 636 unit koperasi di Kabupaten Banyumas, dan hanya 375 koperasi (59%) yang dinyatakan aktif. Sementara koperasi sehat yang terdata sejumlah 110 unit (17,63%) dan koperasi yang tidak sehat sejumlah 514 unit (82,37%), dengan volume usaha koperasi sebesar Rp.1.160.523.000.000 dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Rp. 74.162.920.000.000 menjadi 1,565% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap

perekonomian daerah masih sangat kecil. Adapun data sebagai berikut:

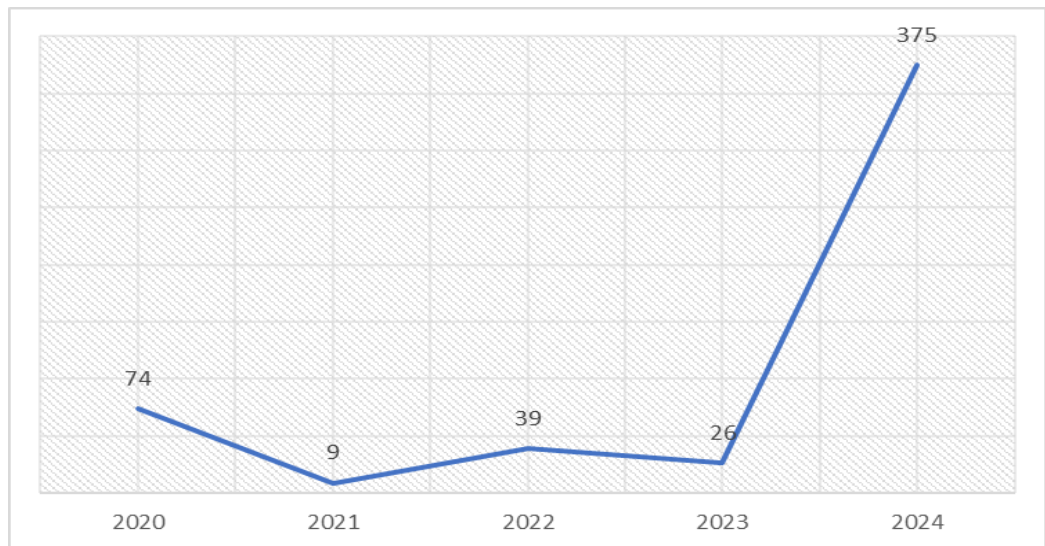


Sumber: Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 42. Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2018-2023 (Persen)

ix. Wisatawan Mancanegara

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Bersama dengan wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara memberikan kontribusi langsung melalui pengeluaran di sektor akomodasi, makan minum, serta transportasi. Kunjungan wisatawan mancanegara juga berpotensi meningkatkan citra daerah, memperluas jejaring promosi, dan menciptakan peluang investasi. Berikut data kunjungan wisatawan Banyumas dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: Dinporabudpar, 2025

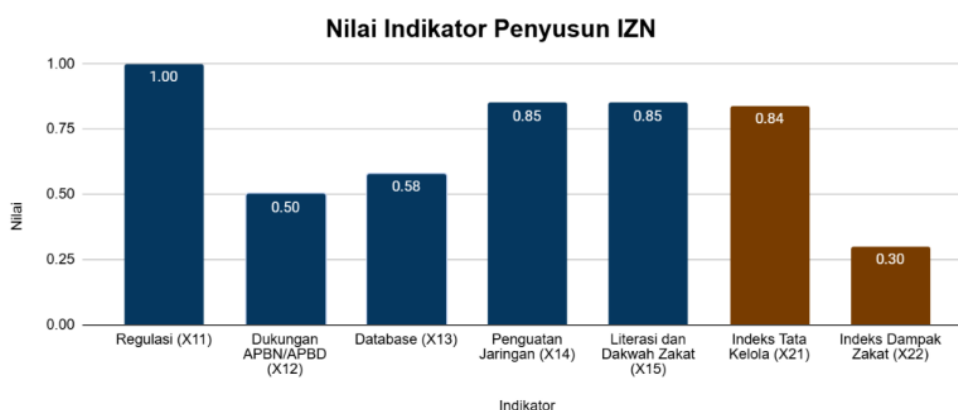
Gambar 43. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyumas masih fluktuatif. Mengalami tren penurunan sejak 2020 hingga 2023, kunjungan wisatawan meningkat pesat pada tahun 2024. Bahkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2024 mencapai 1.342%. Banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara terjadi karena banyaknya event bertajuk budaya yang diselenggarakan pada tahun 2024 seperti Festival Kenthongan, Lengger Bicara, Grebek Suran dan Festival Serayu. Selain itu, wisata live in di desa wisata juga berkontribusi pada kunjungan wisatawan mancanegara.

x. Kondisi Keuangan Syariah

Kondisi keuangan syariah tercermin dari indeks zakat nasional dan produk yang bersertifikat halal. Indek Zakat Nasional pada Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh

Basnaz Kabupaten Banyumas untuk tahun 2024 dimana Secara Kewilayahan, pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas berada pada kategori Baik dengan nilai dimensi makro 0,77. Secara tata kelola dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas berada pada kategori Cukup Baik dengan nilai dimensi mikro 0,51. Secara umum, pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas masuk pada kategori Stabil dengan nilai IZN 0,59.



Sumber: Badan Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, diolah (2025)

Gambar 44. Indeks Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan nilai masing-masing indeks indikator penyusunan IZN, indikator regulasi merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi atau termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai sempurna yaitu 1,00. Disusul indikator penguatan jaringan (0,85), literasi dakwah zakat (0,85), dan indeks tata kelola (0,84) yang ketiganya berada pada kategori Sangat Baik. Selanjutnya indikator database (0,58) dan dukungan APBD/APBN (0,50) berada di kategori Cukup Baik. Dan indeks dampak

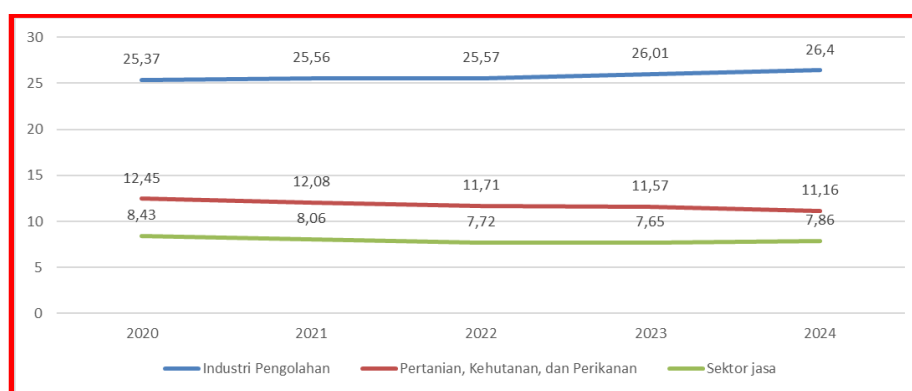
zakat berada di kategori Kurang Baik dengan nilai 0,30. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis IZN 2024, BAZNAS Kabupaten Banyumas secara keseluruhan sudah Cukup Baik namun masih diperlukan penguatan dan peningkatan melalui evaluasi guna meningkatkan kinerja dan hasil IZN di seluruh indikator penyusunan IZN, khususnya pada indikator dampak zakat baik dalam hal mustahik yang dientaskan dari kemiskinan maupun mustahik yang berhasil terentaskan menjadi muzaki, indikator dukungan APBN/APBD dari pemerintah daerah dan pengalokasian APBN/APBD untuk hak keuangan pimpinan, dan indikator database dalam aspek pemutakhiran data mengenai mustahik serta muzaki perorangan.

Jumlah pelaku usaha mikro Kabupaten Banyumas sejumlah 89.022 di tahun 2024, tercatat yang sudah bersertifikat halal 6.630 atau baru 7,5%, sertifikat halal ini wajib di miliki para pelaku usaha UMKM karena itu merupakan legalitas usaha, disamping harus punya NIB (Nomor Induk Berusaha).

6. Produk Unggulan Daerah

Pemerataan pengembangan wilayah untuk mendorong berkembangnya perkotaan, perdesaan, dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Banyumas, dapat dilakukan melalui pengembangan pada sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sektor utama di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta sektor Transportasi dan Pergudangan.

Share PDRB terbesar di Kabupaten Banyumas adalah pada sektor Industri Pengolahan sebesar 25,37% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 26,4% pada tahun 2024, sedangkan share PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 12,45% menurun hingga 11,16% pada tahun 2024. Share PDRB pada sektor Jasa pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya dengan angka yang fluktuatif dari tahun 2020 sebesar 8,43 dan 7,86% di tahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2024

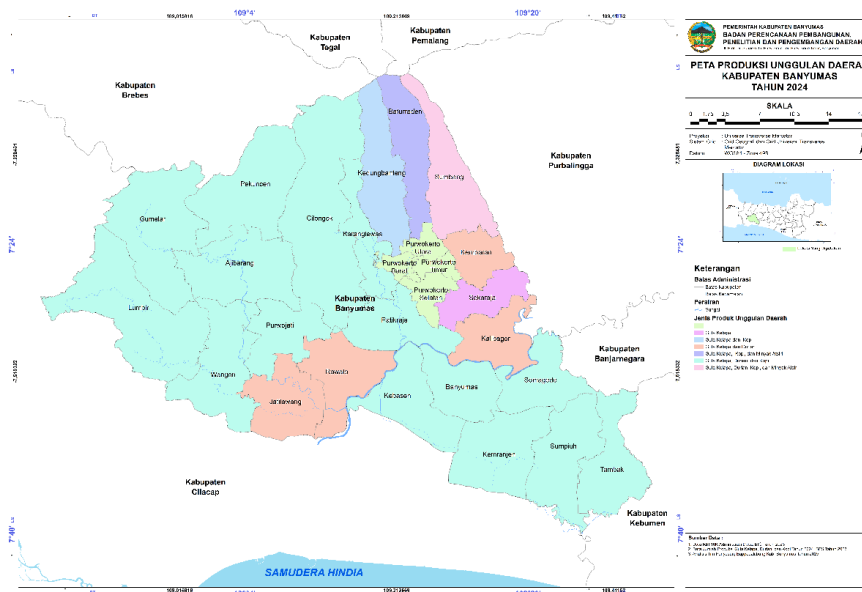
Gambar 45. Share PDRB Terbesar Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024

Sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 451.171 penduduk atau 48,79 persen, kemudian sektor industri pengolahan sebanyak 294.057 penduduk atau 31,80 persen, dan sektor pertanian dalam arti luas baik usaha on-farm (kegiatan usaha pertanian) dan off-farm (pengolahan hasil pertanian) serta usaha lanjutan pemasaran hasil pertanian menjadi andalan bagi penyerapan tenaga kerja sebanyak 179.529 penduduk atau 19,41 persen.

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ), *shift-share*, dan kontribusi sektoral pada PDRB Kabupaten Banyumas harga konstan dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah serta kesesuaian dengan penentuan kriteria Produk Unggulan Daerah (PUD) pada

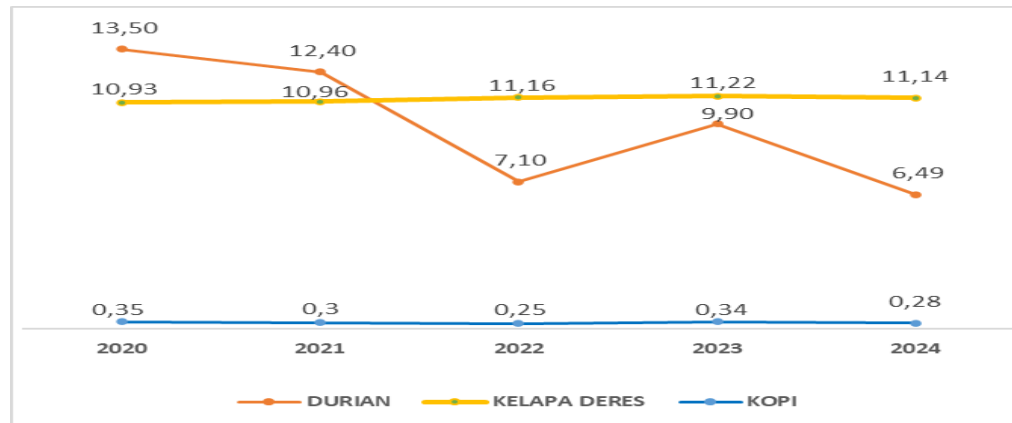
Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka Kabupaten Banyumas memiliki potensi Produk Unggulan Daerah yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 6 produk, yaitu Gula Kelapa, Durian, Kayu Olahan, Minyak Atsiri, Kopi dan Susu Kambing Perah.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dari hasil pertanian dan industri ini, diharapkan sebagai pengembangan produk yang potensial mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong untuk mampu memasuki pasar global, bersifat padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja di pedesaan, serta diproduksi berdasarkan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar) dan bakat masyarakat, sehingga diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah, khususnya bagi wilayah pengembangan PUD dan masyarakat setempat. Wilayah potensial pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 46. Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Produktivitas komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan yang merupakan bahan baku Produk Unggulan Daerah cenderung lambat atau stagnan peningkatannya bahkan untuk komoditas durian mengalami penurunan, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinperten KP Kabupaten Banyumas, 2024

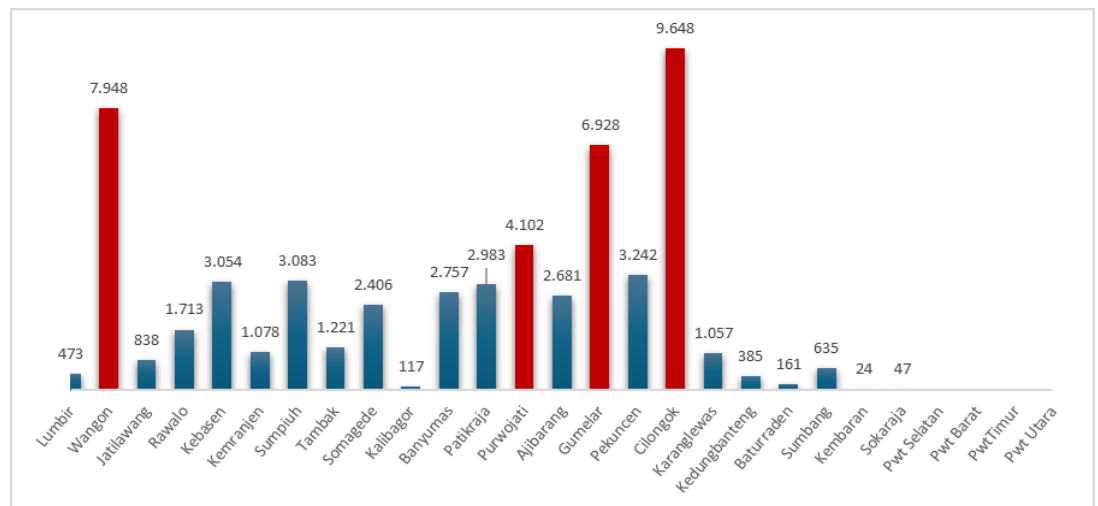
Gambar 47. Produktivitas Komoditas Durian, Kelapa dan Kopi

Sesuai dengan Keputusan Bupati Banyumas No 185 tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah disebutkan terdapat enam produk unggulan. Untuk mengakselerasi prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas, produk unggulan yang diprioritaskan adalah gula kelapa, durian, dan kopi. Adapun ketiga produk unggulan daerah dan gambaran kondisi masing-masing produk unggulan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

i. Produk Olahan Gula Kelapa

Sentra gula kelapa tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, kecuali di wilayah perkotaan Purwokerto. Gula kelapa tersedia dalam bentuk cetak dan kristal. Saat ini telah dikembangkan gula kelapa dalam bentuk cair. Produksi gula kelapa di Kabupaten Banyumas cenderung meningkat. Banyumas menyumbang devisa terbesar untuk ekspor gula kelapa secara nasional. Perlu

upaya untuk menjadikan gula kelapa yang memiliki cita rasa khas ini sebagai komoditas indikasi geografis Banyumas.



Sumber: Dinptan KP Kabupaten Banyumas, 2024

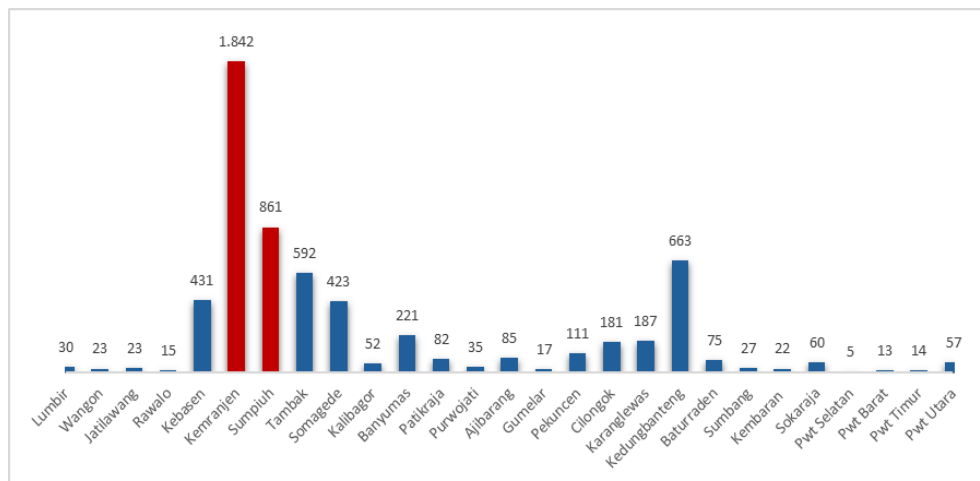
Gambar 48. Produksi Gula Kelapa per Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas (Ton) Rata-rata 5 tahun Tahun 2020-2024

Produksi gula kelapa di Kabupaten Banyumas selama lima tahun dari tahun 2020-2024 mempunyai rata-rata produksi sekitar 56,26 Ton, sedangkan rata-rata produksi gula kelapa yang bersertifikat sekitar 49,93 Ton dengan jumlah perusahaan yang telah mengajukan sertifikat organik di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2021-2024 sebanyak 15 perusahaan eksportir dengan luas lahan sekitar 1.533,59 dan jumlah pohon sebanyak 168.894,85 pohon.

ii. Komoditas *Durian*

Beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas merupakan sentra komoditas durian yaitu di kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Banyumas dan Kedungbanteng dengan varian durian lokal dan non lokal. Sebagian durian dijual dalam bentuk segar, yang dapat langsung dikonsumsi atau sebagai bahan tambahan kuliner durian (es durian dengan berbagai varian bentuk). Hilirisasi

produk durian belum berkembang karena kebutuhan pasar durian segar masih sangat besar dan luas (baru 1 pelaku usaha, dengan produk utama yaitu dodol durian, yang sudah memiliki sertifikasi dan pasar skala nasional-hingga ke Bali, secara rutin, dan sekarang sedang menuju untuk kelayakan produk ekspor).



Sumber: Dinpartan KP Kabupaten Banyumas, 2024

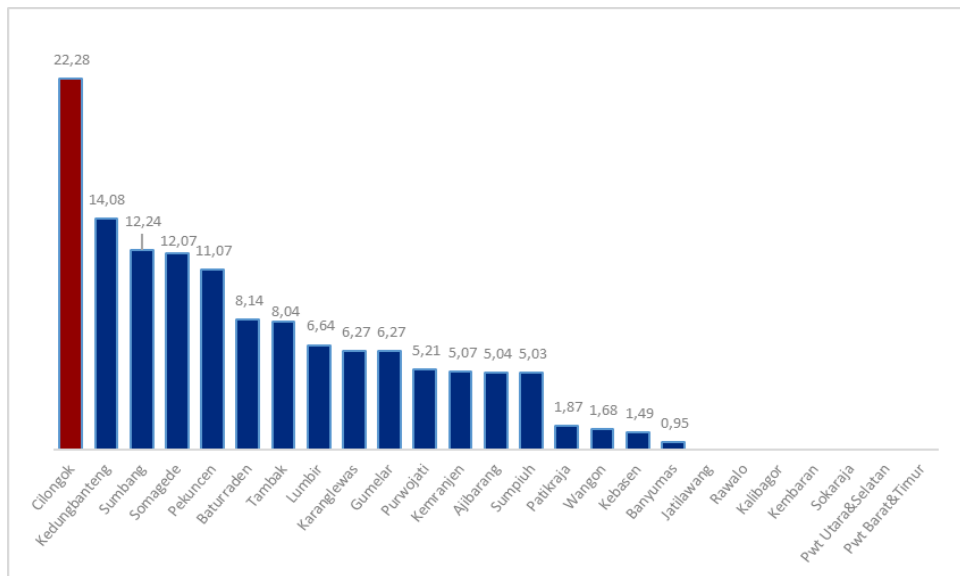
Gambar 49. Produksi Durian di Kabupaten Banyumas per Kecamatan Rata-Rata 5 tahun tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata produksi durian di Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir adalah sekitar 804,15,12 Ton dengan rata-rata produksi terbanyak di Kecamatan Kemranjen yaitu 246,543 Ton. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kerjasama dengan Balai penelitian tanaman buah tropika (Balitbu Tropika) Solok Sumatera Barat dalam rangka pelepasan varietas durian dengan nama varietas Durian Kromo Banyumas.

iii. Komoditas dan Produk Olahan Kopi

Beberapa wilayah sentra produk olahan kopi ada di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas antara lain kecamatan Tambak, Pekuncen, Karanglewas, Gumelar dan Ajibarang. Varian kopi yang berkembang di Kabupaten Banyumas adalah varian robusta dan arabica. Hingga saat ini, sebagian kopi dijual dalam bentuk green bean. Belum ada pelaku usaha Banyumas yang memproduksi roasted bean atau kopi bubuk menggunakan peralatan yang representatif untuk menghasilkan kopi dengan kualitas seduhan yang baik. Sebagian besar pengolahan kopi sangrai dan kopi bubuk masih dilaksanakan secara tradisional. Produksi kopi masih terbatas sehingga penjualan kopi banyumas, jangkauan pasarnya juga terbatas. Maraknya kedai kopi di Banyumas menjadi peluang untuk pengembangan lebih lanjut riset dan inovasi kopi dari hulu ke hilir.

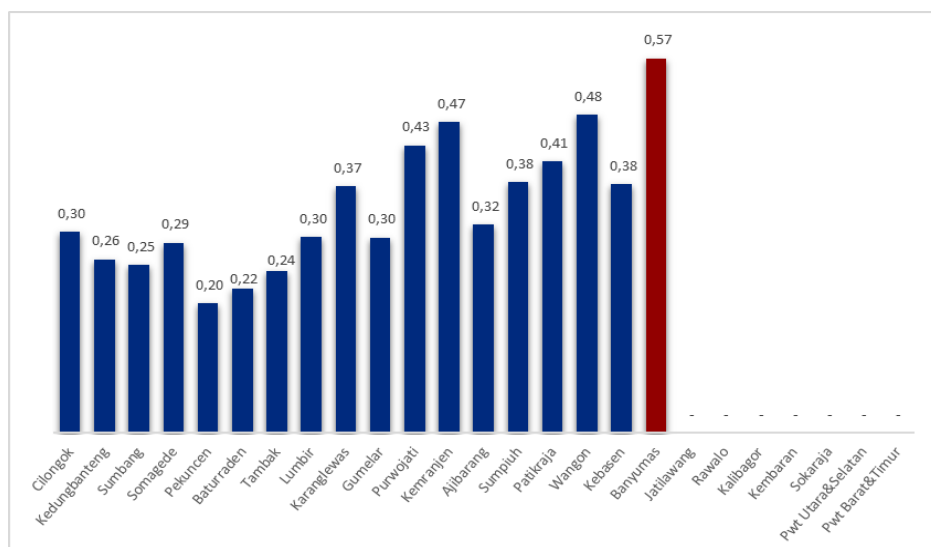
Produktivitas komoditas kopi di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari tahun 2020 (0,35 ton/ha) sampai dengan tahun 2022 (0,25 ton/ha), dan meningkat pada tahun 2023 (0,34 ton/ha), namun kembali menurun di tahun 2024 menjadi sebesar 0,28 ton/ha. Pengembangan produksi komoditas Kopi di Banyumas tersebar di 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas, dengan produksi tertinggi di kecamatan Cilongok, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Banyumas dalam Angka 2024

Gambar 50. Produksi Komoditas Kopi (Ton) Di Kabupaten Banyumas dan per Kecamatan Tahun 2024

Sedangkan produktivitas per kecamatan cukup beragam dari yang terendah sebesar 0,2 Ton/Ha di kecamatan Gumelar sampai yang tertinggi sebesar 0,57 Ton/Ha di kecamatan Banyumas, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Banyumas dalam Angka 2024

Gambar 51. Produktivitas Komoditas Kopi (Ton/Ha) Di Kabupaten Banyumas dan per Kecamatan Tahun 2024

a. Analisis dan Pemetaan PUD

Kabupaten Banyumas memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang besar. Sebagai daerah berbasis kegiatan pada sektor pertanian, banyak komoditas yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas. Beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan akan menjadi produk unggulan daerah Kabupaten Banyumas. Komoditas ini harus dikembangkan agar memiliki saing di pasar nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, diperlukan analisis dan pemetaan produk unggulan daerah agar kebijakan perekonomian yang direncanakan dapat mendukung efisiensi produksi dan mengoptimalisasi pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Banyumas.

Komoditas atau Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Banyumas yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah produk gula kelapa, produk durian, dan produk kopi.

i. Gula kelapa

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tahun 2024, didapatkan data hasil rekapitulasi luas areal dan produksi gula jawa/merah sebagai komoditas unggulan utama di Kab. Banyumas. Data luas areal lahan kelapa deres di Kab. Banyumas dari tahun 2021 sampai 2023 cenderung sama, yaitu 5.111 Ha seperti dapat dilihat dalam tabel 7. Sedangkan data produksi gula jawa/merah dari tahun 2021 sampai 2023 cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dengan luas areal lahan kelapa deres sebesar 5.111 Ha dan jumlah pohon yang di deres sebanyak 562.264 batang, dapat menghasilkan gula jawa/merah sebanyak 57.353.723 Kg pada tahun 2023. Jumlah petani yang menderes 562.264 batang pohon kelapa ini sebanyak 11.519 orang. Gula

jawa/merah ini dijual baik untuk konsumsi lokal dan nasional serta ekspor.

Tabel 7. Data Jumlah Petani, Jumlah Pohon Kelapa, Luas Areal, dan Produksi Kelapa Deres Kabupaten Banyumas

Komoditas	Luas Areal (Ha)			Produksi (Kg)			Jumlah Pohon (Batang)	Jumlah Petani (Orang)
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
Kelapa Deres	5.111	5.111	5.111	56.032.111	57.058.937	57.353.723	562.264	11.519

Pemkab Banyumas melalui Bappedalitbang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan turut berperan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa dalam 5 tahun terakhir dengan memberikan bantuan peralatan produksi gula kelapa serta memberikan pelatihan teknologi produksi gula kelapa pada tahun 2020. Selain itu juga telah dilakukan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dalam pengembangan gula kelapa dengan beberapa instansi, diantaranya:

- Dinpertan KP, Dinakerkop UKM dan Bappedalitbang.
- Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman
- Dunia usaha dan dunia industri yaitu dengan Indesso (pengembangan gula cair)
- Pusat riset daerah (Brida) dan nasional (BRIN) dalam melaksanakan penelitian gula cair
- Kerja sama regional dan internasional dalam pengembangan produksi, *branding*, dan pemasaran gula kelapa melalui ekspor gula kelapa kristal organik ke Amerika, Eropa, Asia dan Timur Tengah.

Selain itu juga telah dialokasikan anggaran untuk pengembangan gula kelapa dalam 5 tahun terakhir yang

berupa Pelatihan Produksi Gula Kelapa (ADBBD) dan Bantuan Mesin Gula Berbasis IOT. Bentuknya berupa

- Bantuan mesin produksi gula kelapa berbasis IOT ini telah diberikan kepada Koperasi Gula Kelapa Nira Satria.
- Bantuan mesin dan peralatan produksi bagi kelompok perajin/penderes gula kelapa dan *safety belt* untuk penderes.
- Pembangunan sarana dan prasarana dapur bersih dari keramik untuk mendukung riset dan inovasi gula kelapa di IKM Semedo Manise.
- Pembuatan sistem informasi gula kelapa yang bernama SIIMASTER yang bertujuan untuk pelayanan cetak kartu penderes dan pendataan penderes gula kelapa sebagai database hasil riset dan inovasi serta pengembangan gula kelapa.
- Pemda juga memfasilitasi kegiatan branding, promosi, dan pemasaran gula kelapa melalui expo dan pameran pada skala local, nasional, dan internasional.
- Pemberian penghargaan Primaniyarta dan eksportir tangguh kepada CV. Inagro Jinawi dan PT. Coco Sugar sebagai salah satu upaya untuk memacu para inovator dan pelaku usaha gula kelapa untuk lebih produktif.

ii. Durian

Tahun 2021 Pemkab telah melaksanakan kerja sama dengan Balai penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu Tropika) Solok Sumatra Barat untuk pelepasan varietas Durian Kromo Banyumas. Pada tahun 2024 pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa 500 batang bibit durian.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Banyumas tahun 2024, produksi durian di Kab. Banyumas fluktuatif setiap tahunnya, produksi tahun 2019 sampai 2022 cenderung mengalami penurunan produksi yang cukup tajam dan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan hingga sejumlah 95.425,93 Kwintal. Produksi durian per tahun dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Data Produksi Durian Kabupaten Banyumas

Luas Panen (Ha)					Rata-rata	Produksi (Kwintal)					Rata-rata	Rata-rata Produksi
2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		
1.840,88	642,61	845,77	565,28	1.661,52	1.111,21	159.600,00	61.591,77	57.679,34	27.778,56	95.425,93	80.415,12	1.954,40

iii. Kopi

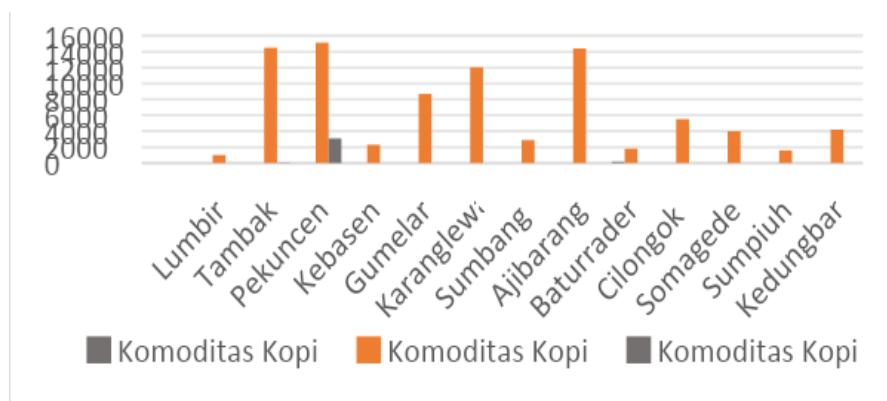
Kopi adalah tanaman tahunan yang dapat mencapai usia produktif hingga 20 tahun. Kopi merupakan komoditas tanaman perkebunan yang banyak diperdagangkan dan digemari oleh masyarakat, sehingga tidak heran jika kopi banyak ditanam atau dibudidayakan. Kopi sebenarnya bukan tanaman asli dari Indonesia tetapi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Terdapat 2 jenis varietas utama tanaman kopi yang banyak digunakan yaitu kopi Robusta (*Coffea robusta*) dan Kopi Arabika (*Coffea arabika*). Tetapi selain 2 jenis kopi tersebut ada pula varietas turunan atau sub varietas dari kopi robusta dan kopi arabika yaitu Liberika, Kopi Nangka, Sidikalang, Gesiha, Timor dan lain sebagainya. Tanaman kopi membutuhkan syarat tumbuh sebagai berikut:

- ketinggian sektar 800 - 1.500 mdpl,
- curah Hujan sekitar 2.000 – 3.000 mm/tahun,
- suhu udara optimal sekitar 21 - 24 derajat celcius, dan

- struktur tanah yang gembur dan kaya bahan organik.

Tanaman kopi yang dibudidayakan di 14 wilayah Kabupaten Banyumas. Sentra tanaman kopi Kabupaten Banyumas berada di Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden dan Somagede. Adapun jenis varietas yang dibudidayakan adalah kopi robusta, kopi arabika, dan jenis varietas yang lain. Dari data statistik Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 diketahui bahwa luasan untuk tanaman kopi robusta dan arabika masing-masing 303,273 Ha dan 29,98 Ha.

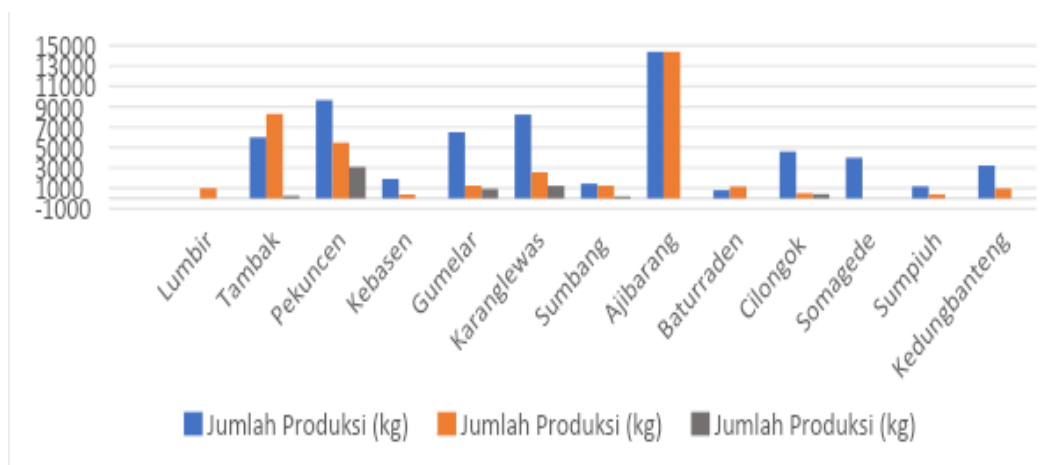
Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Kab. Banyumas adalah varietas tanaman kopi robusta, karena sesuai dengan karakteristik syarat tumbuh kopi robusta. Namun tidak menutup kemungkinan varietas tanaman kopi arabika maupun varietas yang lain dengan ketinggian tempat 1.000 s.d. 2.000 mdpl masih bisa dikembangkan di wilayah Kabupaten Banyumas atau di sekitar Lereng Gunung Slamet.



Gambar 52. Diagram Perkembangan Kopi di Kabupaten Banyumas

Data jumlah produksi kopi di Kabupaten Banyumas berdasarkan jumlah produksinya ditampilkan dalam Gambar 53. Kopi di Kabupaten Banyumas paling banyak diproduksi dalam bentuk gelondongan basah (Cherry), disusul dengan bentuk

wose/green bean, dan paling sedikit diproduksi dalam bentuk kopi bubuk.



Gambar 53. Jumlah Produksi Kopi

Pemda Banyumas melalui Bappedalitbang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan Industri telah melaksanakan kegiatan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi dan produk turunan kopi dalam 5 tahun terakhir dengan melakukan pelatihan barista kopi dari Kementerian Perindustrian. Pemda juga memfasilitasi kegiatan branding, promosi, dan pemasaran kopi dari IKM-IKM penghasil kopi di Kabupaten Banyumas melalui ekspo dan pameran pada skala lokal, nasional, dan internasional.

7. Permasalahan Utama Daerah

Dokumen RIPJPD Kabupaten Banyumas disusun dengan memetakan isu-isu strategis atau permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Banyumas berdasarkan isu strategis yang tercantum dalam RPJPD tahun 2025-2045, RPJMD tahun 2025-2029, serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh periset atau lembaga penelitian lainnya. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, pada kurun waktu lima

tahun pertama (2025-2029), diarahkan untuk pembangunan di berbagai bidang yaitu perekonomian, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan, ketahanan terhadap bencana alam, serta lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian prioritas pembangunan pada RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMD tahun 2025-2029, permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Belum Optimal
- b. Peningkatan Jumlah Penduduk Akan Meningkatkan Kebutuhan Sarana Prasarana, Pangan, Air, dan Energi
- c. Peningkatan Alih Fungsi Lahan
- d. Keterbatasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- e. Angka Kemiskinan Masih Tinggi
- f. Kuantitas UMKM Meningkat Tetapi UMKM Cenderung Tidak Berkembang
- g. Belum Seluruh Penduduk Kelompok Umur Pendidikan Dasar Dapat Mengakses Pendidikan
- h. Kinerja Pelayanan Infrastruktur Jalan Masih Belum Optimal
- i. Dinamisme Bisnis Masih Rendah
- j. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Kolaboratif

8. Sumberdaya Manusia Iptek Daerah

Untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas, ketersediaan Sumberdaya Manusia IPTEK di daerah diperlukan. Jumlah Sumberdaya Manusia IPTEK dapat dilihat dalam Tabel 9.

Tabel 9. Sumber Daya Manusia IPTEK di Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No.	Pejabat Fungsional	Jumlah
1.	Perencana	51
2.	Analisis Kebijakan	32
Total		83

Sumber: BKPSDM Kabupaten Banyumas, 2025

SDM IPTEK khusus di Bidang Litbang pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas terdiri atas pejabat struktural (1 orang kabid), peneliti Ahli Muda (1 Orang), peneliti ahli pertama (1 orang), perekayasa ahli pertama (2 orang), pelaksana/terampil teknisi penelitian dan perekayasa (2 orang), Peneleah arsiparis (1 orang) dan staf non PNS (1 orang).

Selain berasal dari perangkat daerah di Kabupaten Banyumas, SDM IPTEK juga dapat berasal dari perguruan tinggi. Terdapat 18 perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 3 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 15 Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

9. Kelembagaan Iptek Daerah saat ini

Kelembagaan IPTEK di Kabupaten Banyumas berupa perguruan tinggi yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Terdapat 18 Perguruan tinggi yang tersebar di Kabupaten Banyumas seperti dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 10. Daftar Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas

No.	Nama Perguruan Tinggi	Alamat
1.	Universitas Putra Bangsa (Kampus 2)	Kecamatan Kemranjen
2.	Akademi Pertanian HKTI Banyumas	Kecamatan Kalibagor

No.	Nama Perguruan Tinggi	Alamat
3.	STIKES Ibnu Sina	Kecamatan Ajibarang
4.	Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto	Kecamatan Kedungbanteng
5.	Kampus VII Poltekkes Kemenkes Semarang	Kecamatan Baturraden
6.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Kecamatan Kembaran
7.	STIKOM Yos Sudarso	Kecamatan Sokaraja
8.	Politeknik Yakpermas Banyumas	Kecamatan Sokaraja
9.	Telkom University	Kecamatan Purwokerto Selatan
10.	STIE Satria	Kecamatan Purwokerto Selatan
11.	Universitas NU Purwokerto	Kecamatan Purwokerto Selatan
12.	STMIK Widya Utama	Kecamatan Purwokerto Selatan
13.	STT Wiworotomo Purwokerto	Kecamatan Purwokerto Barat
14.	Kampus VIII Poltekkes Kemenkes Semarang	Kecamatan Purwokerto Timur
15.	Universitas Jenderal Soedirman	Kecamatan Purwokerto Utara
16.	Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto	Kecamatan Purwokerto Utara
17.	Universitas Amikom Purwokerto	Kecamatan Purwokerto Utara
18.	Universitas Bina Sarana Informatika	Kecamatan Purwokerto Utara

*Sumber: Bidang Litbang Bappedalitbang Kabupaten
Banyumas, 2022*

Dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pembinaan dan penumbuhkembangan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, baik itu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya. Inisiatif Inovasi Daerah di Kabupaten Banyumas berasal dari kepala daerah, ASN, dan perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga melakukan berbagai kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi.

10. Infrastruktur riset dan inovasi di daerah

Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memiliki inkubator bisnis sendiri tetapi di Banyumas telah berdiri beberapa Pusat Inkubator Bisnis, antar lain Pusat Inkubator LPPM Unsoed, Innocrycel Purwokerto, dan Banyumas Digital Valey (ITT Telkom). Pusat Inkubator Unsoed Purwokerto memiliki binaan 9 perusahaan *start up*, Innocrycel Purwokerto memiliki binaan 15 perusahaan *start up*, sedangkan Banyumas Digital Valley memiliki binaan 6 perusahaan *start up*.

B. Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah

Program riset dan inovasi daerah di Kabupaten Banyumas diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Program tersebut terbagi atas 4 (empat) kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Dalam hal ini Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, dengan melaksanakan fungsi, sebagai berikut

- Inventarisasi permasalahan bidang penelitian dan pengembangan,
- Penyusunan kajian dan *policy brief* dari hasil penelitian dan pengembangan,
- Penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta sumber daya alam dan teknologi,
- Koordinasi, evaluasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang sumber daya alam dan teknologi, dan
- Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah.

Riset dan inovasi daerah diselenggarakan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas melalui penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumberdaya alam, daya tampung lingkungan hidup, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kegiatan riset dan inovasi,

Bappelitbangda berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi yang ada di daerah maupun perguruan tinggi lainnya serta pusat-pusat riset seperti BRIN.

1. Kondisi Ekosistem Inovasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas

Ekosistem inovasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah telah mulai merancang kebijakan dan infrastruktur yang mendukung riset serta inovasi melalui kerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, dan pelaku bisnis lokal. Inisiatif seperti pengembangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Sains dan Teknologi Daerah (RIPJPID) merupakan tindakan strategis dalam menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan terintegrasi untuk mendorong inovasi di daerah.

Namun demikian, dari segi kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia dan pengelolaan inovasi di tingkat perangkat daerah masih menunjukkan variasi. Tidak semua organisasi perangkat daerah memiliki unit atau pejabat fungsional yang berfokus pada pengembangan inovasi. Dampak ini menyebabkan rendahnya tingkat riset terapan dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Di samping itu, kerjasama antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat (quadruple helix) masih kurang, sehingga potensi sinergi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menciptakan solusi inovatif bagi permasalahan daerah.

Dari aspek infrastruktur dan pendanaan, Banyumas masih mengalami kekurangan dalam menyediakan fasilitas penelitian dan laboratorium yang memadai. Dukungan pendanaan untuk aktivitas penelitian dan inovasi di tingkat

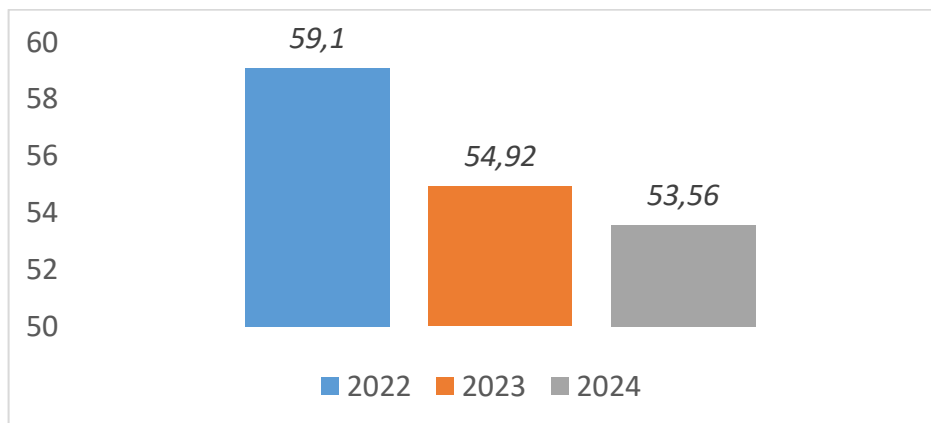
lokal masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Walaupun begitu, usaha untuk meningkatkan fondasi data penelitian dan inovasi mulai dilaksanakan dengan mengintegrasikan data.. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar signifikan dalam menciptakan sistem informasi inovasi daerah yang terukur dan transparan.

Secara umum, ekosistem inovasi di Kabupaten Banyumas saat ini berada pada tahap penguatan dasar. Pemerintah daerah menunjukkan tekad untuk menciptakan suasana inovasi yang mendukung dengan mendorong perubahan kebijakan, pengembangan kapasitas SDM, dan perluasan jaringan kolaboratif. Di masa mendatang, peningkatan kerjasama antar sektor dan pengembangan model inovasi lokal yang mengedepankan potensi unggulan daerah akan menjadi kunci untuk mempercepat transformasi Banyumas menjadi daerah yang adaptif, kreatif, dan memiliki daya saing tinggi dalam era ekonomi berbasis pengetahuan.

Tabel 11 dan Gambar 54 menunjukkan Kondisi ekosistem di pemerintah Kabupaten Banyumas, masih mengalami fluktuatif, antara tahun 2022-2024. Secara jelas dapat di lihat dalam Tabel 11 berikut;

Tabel 11. Kondisi Ekosistem Inovasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Rangking (dari 415 Kabupaten)	IDSD	Pilar Kapabilitas Inovasi	Pilar Institusi	Pilar Kesehatan
2022	59,10	26	3,43	2,93	4,55	4,08
2023	54,92	73	3,58	3,64	4,47	4,15
2024	53,56	136	4,01	4,25	4,81	4,09



Sumber: BSKDN Kemendagri, 2023 – 2025 dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Gambar 54. Indek Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas

- Indeks Inovasi Daerah (*Innovative Government Awards*) Kabupaten Banyumas selalu mengalami penurunan. Sejak tahun 2023 Kabupaten Banyumas masuk ke dalam kategori “Inovatif”, padahal di tahun 2022 masuk ke dalam kategori “Sangat Inovatif”.
- Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) beserta Pilar Kapabilitas Inovasi cenderung mengalami peningkatan. Namun untuk Pilar Institusi dan Kesehatan fluktuatif.

2. Permasalahan dan Peluang Inovasi Daerah Kab. Banyumas

Masalah utama dalam pengembangan inovasi lokal di Kabupaten Banyumas terletak pada masih minimnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang mengutamakan kegiatan penelitian dan inovasi. Banyak perangkat daerah masih kekurangan unit atau personel khusus yang dapat secara sistematis mengidentifikasi dan mengembangkan ide-ide inovatif. Akibatnya, inovasi yang muncul cenderung bersifat pribadi atau kebetulan, bukan hasil dari perencanaan strategis yang terencana. Di samping

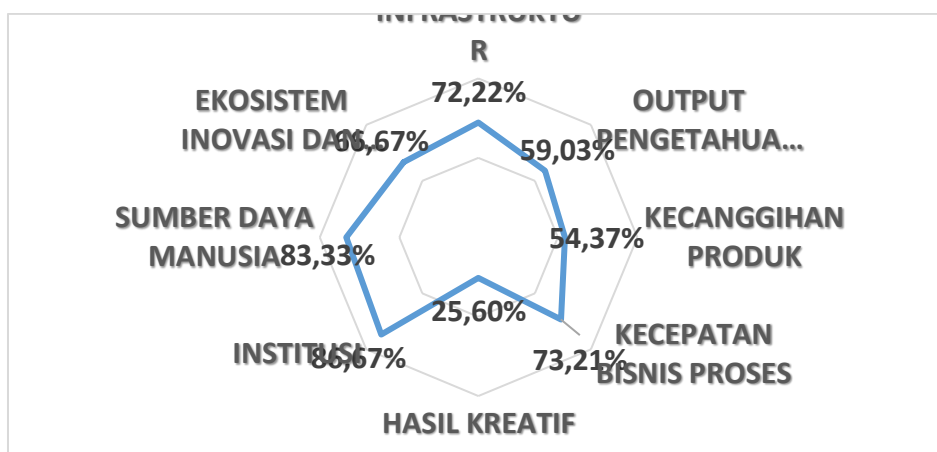
itu, penguatan budaya inovasi di dalam birokrasi masih diperlukan agar setiap pegawai termotivasi untuk berinovasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Dari sisi pendanaan, tantangan lain adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk aktivitas penelitian, pengembangan, dan inovasi. Dukungan fiskal yang terbatas mengakibatkan berbagai inisiatif inovatif sulit untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Banyak gagasan inovatif dari masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha belum mendapatkan wadah dukungan yang cukup dalam bentuk hibah penelitian, inkubasi usaha, atau kolaborasi riset. Situasi ini juga memengaruhi sedikitnya jumlah hasil riset dan inovasi lokal yang bisa dijadikan kebijakan publik atau produk unggulan daerah yang komersial

Masalah lain yang timbul adalah rendahnya kolaborasi antara aktor dalam ekosistem inovasi daerah. Kerja sama antara pemerintah daerah, universitas, sektor bisnis, dan masyarakat (*quadruple helix*) belum berfungsi dengan baik. Kesenjangan komunikasi masih ada, prioritas yang berbeda, serta kurangnya forum koordinasi yang efisien dalam menyusun agenda riset dan inovasi bersama. Sebagai dampaknya, banyak penelitian dari universitas atau lembaga riset yang tidak terhubung dengan kebutuhan aktual daerah, yang mengakibatkan potensi terbuangnya hasil tanpa penerapan yang berarti.

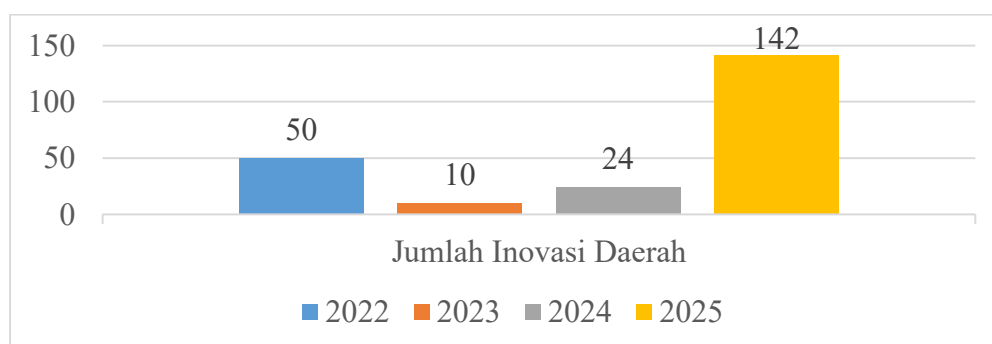
Namun demikian, Kabupaten Banyumas memiliki kesempatan yang signifikan untuk mengembangkan inovasi daerah yang berfokus pada potensi lokal. keberadaan Universitas Jenderal Soedirman dan institusi pendidikan tinggi lainnya menjadi kekuatan utama dalam menyediakan sumber daya pengetahuan, teknologi, serta penelitian

terapan. Selain itu, sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata alam, ekonomi kreatif, dan energi terbarukan menawarkan peluang signifikan untuk pengembangan inovasi yang berlandaskan kearifan lokal. Dengan memanfaatkan peluang ini, Banyumas dapat mengembangkan model inovasi yang tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, Kabupaten Banyumas Memiliki 10.995 orang ASN dan didukung 18 Perguruan Tinggi, dengan jumlah peneliti (dosen) 3.655 orang yang didukung dengan ekosistem inovasi dan kajian, institusi, dan infrastruktur yang memadai.



Sumber: (BSKDN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024)

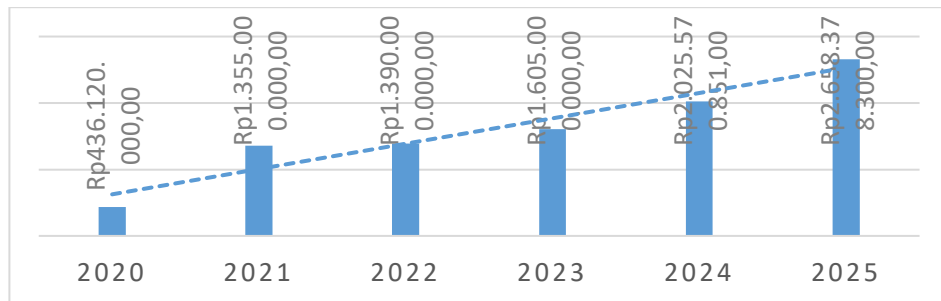
Gambar 55. Profil Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas



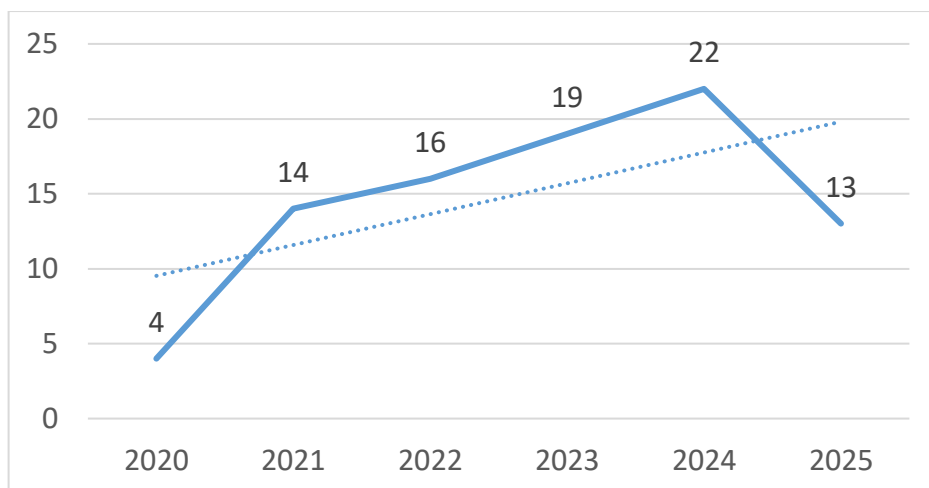
Gambar 56. Jumlah Inovasi Pemerintah Kab. Banyumas

- Tahun 2022 – 2024 (di dalam kotak hijau), merupakan jumlah Inovasi Pemerintah Daerah yang telah terinput dan terverifikasi pada Dashboard Indeks Inovasi Daerah BSKDN Kemendagri.
- Tahun 2025 (di dalam kotak merah), merupakan jumlah Inovasi Pemerintah Daerah berdasarkan Verifikasi dan Validasi Bidang Litbang (belum melalui proses IID/IGA).

Anggaran kegiatan penelitian, pengembangan, pengajian, penerapan invensi dan inovasi di Bidang Litbang Bappedalitbang Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan seperti tersaji dalam Gambar 2.58.



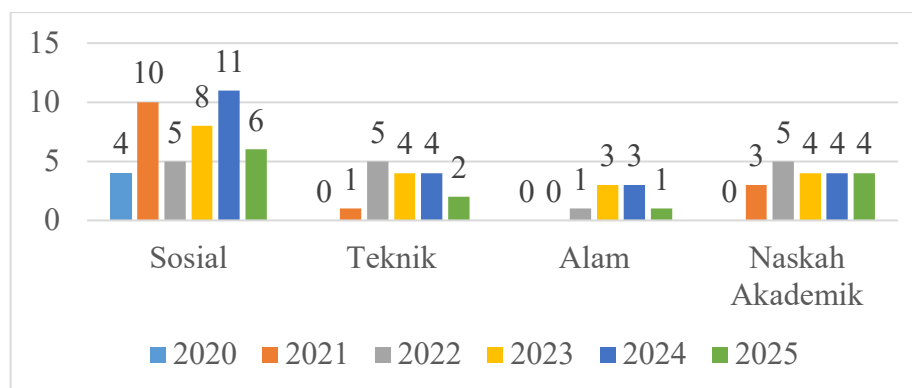
Gambar 57. Peningkatan Total Anggaran Bidang Litbang



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025

Gambar 58. Peningkatan Total Jumlah Kajian Tahun 2020 - 2025

Peningkatan jumlah anggaran di ikuti dengan jumlah kajian yang dilakukan oleh Bappedalitbang dari tahun 2020-2025. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 59 dan Tabel 12 yaitu grafik dan jenis penelitian yang dilakukan.



Gambar 59. Jumlah Kajian per Jenis Tahun 2020 - 2025

Tabel 12. Jumlah Kajian (setelah menjadi Bidang Litbang)

Tahun	Sosial	Teknik	Alam	Naskah Akademik	Total Jumlah Kajian
2020	4	-	-	-	4
2021	10	1	-	3	14
2022	5	5	1	5	16
2023	8	4	3	4	19
2024	11	4	3	4	22
2025*	6	2	1	4	13

Sumber; Bappedalitbang tahun 2025

3. Program-Program Riset dan Inovasi Daerah yang Pernah Dilaksanakan

Program Riset Unggulan Daerah (RUD) Kabupaten Banyumas tahun 2025 adalah upaya strategis dari pemerintah daerah untuk memajukan kemandirian penelitian yang berfokus pada potensi lokal. Melalui RUD, Banyumas menegaskan pentingnya penelitian yang tidak hanya akademis, tetapi juga aplikatif, agar hasil riset dapat

secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pelaksanaan RUD 2025 didukung oleh kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas, Perguruan tinggi di lingkungan Kabupaten Banyumas, dan lembaga penelitian lainnya. Kerja sama ini membangun ekosistem penelitian yang menguntungkan, di mana peneliti setempat dapat mengajukan usulan penelitian sesuai dengan tema prioritas daerah. Fokus pada penelitian kolaboratif menunjukkan arah Banyumas dalam mengaitkan penelitian dengan kebutuhan pembangunan dan memperkuat fondasi inovasi daerah.

Pada tahun 2025 RUD, terdapat empat tema utama yang menjadi lomba, 1) yaitu pengembangan produk unggulan daerah, 2) pengukuran kinerja infrastruktur Kabupaten Banyumas, 3) penguatan ketahanan pangan, 4) serta peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) tematik dalam tata kelola pemerintahan. RUD atau studi ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Banyumas, dengan partisipan yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk lembaga penelitian milik pemerintah/swasta, organisasi masyarakat, universitas, serta masyarakat umum, baik secara individu maupun kelompok. Pemenang di setiap kategori akan menerima bantuan dana penelitian hingga Rp 25 juta (setelah dipotong pajak), yang akan diserahkan setelah seluruh proses lomba selesai.

Hasil Program RUD 2025 diharapkan tidak hanya sebagai laporan penelitian, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan, produk inovatif, serta model pemberdayaan masyarakat. Dengan cara ini, Banyumas bisa mempercepat hasil pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kedepannya, RUD diharapkan menjadi

acuan bagi daerah lain dalam menciptakan pengelolaan riset yang kolaboratif, praktis, dan kompetitif.

4. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini pada Setiap Produk Unggulan Daerah dan Permasalahan Utama Daerah yang Diusulkan

Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah menyatakan bahwa ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah. Pembangunan daerah dapat diakselerasi melalui riset dan inovasi dalam implementasi inovasi teknologi.

Menurut Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah terbagi menjadi 6 (enam) elemen yaitu (1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah, (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di daerah, (3) kemitraan riset dan inovasi di daerah, (4) budaya riset dan inovasi di daerah, (5) keterpaduan riset dan inovasi di daerah, dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global.

Kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan utama daerah dan kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah ditunjukkan oleh Tabel 13 dan Tabel 14. Tabel 13 menunjukkan kondisi ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi. Tabel 14 menunjukkan kondisi ekosistem riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan utama daerah untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*).

Tabel 13. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Prioritas 1 : Pengembangan Produk Gula Kelapa		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Terbitnya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan gula kelapa	Belum ada regulasi yang secara khusus mendukung pengembangan gula kelapa
Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang database gula kelapa	Belum ada basis data gula kelapa
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan gula kelapa	Belum ada pusat inovasi pengembangan produk gula kelapa Sudah ada unit produksi gula kelapa yang tersebar di wilayah sentra gula kelapa yaitu Cilongok, Pekuncen, dan Somagede; sudah ada beberapa industri yang melakukan ekspor gula kelapa
		Sudah ada infrastruktur namun belum optimal, khususnya infrastruktur untuk mendapatkan bahan baku nira kelapa dan infrastruktur berupa prasarana akses dari sentra gula ke konsumen
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran pengembangan industri gula kelapa dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Belum ada anggaran secara khusus untuk pengembangan industri gula kelapa
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis gula kelapa khas Banyumas	Belum ada sertifikasi HKI indikasi geografis gula kelapa
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terlaksananya kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan inovasi dan riset gula kelapa dengan Pemerintah Daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia	Kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan industri gula kelapa dengan pihak-pihak terkait masih belum intensif

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
	usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan stake holder serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)	
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan inovasi dan riset gula kelapa yang tepat untuk digunakan bagi inovator ataupun produsen gula kelapa Banyumas	Sarana pendukung dalam pengembangan industri gula kelapa yang tepat bagi pelaku usaha gula kelapa Banyumas masih perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembaga	Terwujudnya implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa	Kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa belum dilaksanakan
Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda yang berperan langsung dalam difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa	Difusi IPTEK dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa belum dilaksanakan optimal
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen gula kelapa dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran gula kelapa melalui kegiatan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan	Diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran gula kelapa belum dilaksanakan secara efisien dan konsisten serta berkelanjutan
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan branding gula kelapa Banyumas, penerimaan konsumen gula kelapa, omset, keuntungan dan kesejahteraan pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir serta peningkatan kapasitas SDM riset dan	Promosi dan kampanye gula kelapa belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
	inovasi gula kelapa Banyumas melalui kegiatan promosi dan kampanye gula kelapa secara rutin dan berkelanjutan	
Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM gula kelapa hulu hingga hilir melalui kegiatan lomba inovasi yang diselenggarakan Pemda dan apresiasi atas prestasi terkait gula kelapa	Belum ada kegiatan terkait apresiasi prestasi atas hasil karya terkait pengembangan industri gula kelapa pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan jumlah pelaku usaha gula kelapa dengan pasar nasional dan ekspor	Belum ada perusahaan pemula gula kelapa sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, branding dan pemasaran
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya sistem informasi yang berisi basis data teknologi masyarakat/kearifan lokal gula kelapa beserta luaran-luaran yang bisa diakses oleh seluruh komponen yang berkepentingan dalam pengembangan gula kelapa dari hulu ke hilir dan sekaligus menjadi fasilitas bagi komunikasi yang lebih intensif dengan para pemangku kepentingan di pengembangan gula kelapa	Belum ada basis data dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal gula kelapa dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Peningkatan penerapan ipteks tepat guna pada pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir (budidaya kelapa, produksi gula kelapa cetak dan kristal yang bermutu, aman dan berkualitas ekspor; berdaya saing tinggi; strategi branding dan pemasaran lokal-nasional-ekspor)	Belum diterapkan teknologi baru berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terbentuk dan berkembangnya klaster industri gula kelapa untuk meningkatkan kualitas dan	Belum dibentuk klaster industri gula kelapa

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
	kuantitas produksi gula kelapa cetak dan kristal Banyumas serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha hulu hingga hilir gula kelapa serta perluasan pasar baik nasional maupun ekspor melalui pembentukan klaster-klaster produksi dan pemasaran gula kelapa	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa yang berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, jumlah dan kualitas gula kelapa serta luasnya pemasaran secara konsisten dan berkelanjutan melalui implementasi kebijakan pengembangan gula kelapa yang memiliki kesesuaian antara kebijakan di Pemda Banyumas dengan kebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat	Belum diterapkan kebijakan yang saling berkesesuaian melalui sinergi dan kolaborasi antarlembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan industri gula kelapa
Elemen 6 : Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan kualitas produksi gula kelapa berbasis green technology dan zero waste processing	Belum diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi gula kelapa berbasis green technology serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerja sama internasional	Peningkatan ekspor gula kelapa melalui penguatan kerja sama internasional	Sudah ada inisiasi dan kerja sama internasional khususnya dalam branding dan pemasaran gula kelapa, namun perlu ditingkatkan
Prioritas 2 : Pengembangan Produk Durian		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Terbitnya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan durian	Belum ada kebijakan daerah yang secara khusus mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan durian
Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang database durian	Belum ada sistem informasi berbasis digital tentang database budidaya dan pengolahan durian

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan durian	Perlu perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan budidaya dan pengolahan durian
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran pengembangan usaha durian dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Belum ada anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan durian dari hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis durian khas Banyumas (Durian Bawor)	Belum ada sertifikasi indikasi geografis durian khas Banyumas
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terlaksananya kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan inovasi dan riset durian dengan mitra dan stake holder terkait	Kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian dengan pihak-pihak terkait masih belum intensif
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan durian yang tepat untuk digunakan bagi pelaku usaha durian dari hulu hingga hilir	Sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian yang tepat bagi pelaku usaha durian Banyumas masih perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar lembaga	Terwujudnya implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran durian	Kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran durian belum dilaksanakan
Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda yang berperan langsung dalam difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran durian	Difusi IPTEK dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran durian belum dilaksanakan optimal
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan pelaku usaha terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran durian melalui kegiatan diseminasi	Diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran durian belum dilaksanakan secara efisien dan konsisten serta berkelanjutan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan branding, pemasaran dan omset durian Banyumas	Promosi dan kampanye durian belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan
Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM durian hulu hingga hilir melalui kegiatan lomba inovasi	Belum ada kegiatan terkait apresiasi prestasi (lomba inovasi) atas hasil karya terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan jumlah pelaku usaha durian dengan pasar nasional dan ekspor	Belum ada perusahaan pemula berbasis riset durian sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, branding dan pemasaran
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya basis data dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal durian dari aspek hulu hingga hilir yang mudah diakses oleh seluruh pihak yang terkait dengan pengembangan durian dari hulu hingga hilir	Belum ada database dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal durian dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Peningkatan penerapan ipteks tepat guna pada pelaku usaha durian dari hulu ke hilir	Belum diterapkan teknologi baru berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha durian dari hulu ke hilir
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terbentuk dan berkembang klaster industri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi durian peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha hulu hingga hilir durian serta perluasan pasar melalui pembentukan klaster-klaster produksi dan pemasaran durian	Belum dibentuk klaster industri durian
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pengembangan produksi dan pemasaran durian yang berdampak pada peningkatan kapasitas	Belum diterapkan kebijakan yang saling berkesesuaian melalui sinergi dan kolaborasi antarlembaga di

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
	SDM, jumlah dan kualitas durian serta luasnya pemasaran	daerah dan pusat terkait pengembangan durian
Elemen 6 : Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan kualitas produksi durian berbasis green technology dan zero waste processing	Belum diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi durian berbasis green technology serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerja sama internasional	Peningkatan ekspor durian melalui penguatan kerja sama internasional	Belum ada inisiasi dan kerja sama internasional khususnya dalam branding durian lokal Banyumas
Prioritas 3 : Pengembangan Kopi		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Terbitnya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan kopi	Belum ada kebijakan daerah yang secara khusus mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan kopi
Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang database kopi	Belum ada sistem informasi berbasis digital tentang database budidaya dan pengolahan kopi
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan kopi	Perlu perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan budidaya dan pengolahan kopi
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran pengembangan usaha kopi dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Belum ada anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dari hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terbitnya sertifikasi HKI-merek kopi khas Banyumas	Belum ada sertifikasi indikasi geografis kopi khas Banyumas
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terlaksananya kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan inovasi dan riset kopi dengan mitra dan stake holder terkait	Kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dengan pihak-pihak terkait masih belum intensif
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan kopi yang tepat untuk digunakan bagi pelaku usaha kopi dari hulu hingga hilir	Sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi yang tepat bagi pelaku usaha kopi Banyumas masih perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembaga	Terwujudnya implementasi kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi	Kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi belum dilaksanakan
Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda yang berperan langsung dalam difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran kopi	Difusi IPTEK dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran kopi belum dilaksanakan optimal
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan pelaku usaha terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran kopi melalui kegiatan diseminasi	Diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran kopi belum dilaksanakan secara efisien dan konsisten serta berkelanjutan
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan branding, pemasaran dan omset kopi Banyumas	Promosi dan kampanye kopi belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan
Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM kopi hulu hingga hilir melalui kegiatan lomba inovasi	Belum ada kegiatan terkait apresiasi prestasi (lomba inovasi) atas hasil karya terkait pengembangan budidaya dan pengolahan kopi pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan jumlah pelaku usaha kopi	Belum ada perusahaan pemula berbasis riset kopi sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, branding dan pemasaran
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya basis data dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal kopi dari aspek hulu hingga hilir yang mudah diakses oleh seluruh pihak	Belum ada basis data dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal kopi dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi	Peningkatan penerapan ipteks tepat guna pada pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir	Belum diterapkan teknologi terbaru berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terbentuk dan berkembangnya klaster industri kopi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha hulu hingga hilir kopi serta perluasan pasar melalui pembentukan klaster-klaster produksi dan pemasaran kopi	Belum dibentuk klaster industri kopi
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pengembangan produksi dan pemasaran kopi yang berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, jumlah dan kualitas kopi serta luasnya pemasaran	Belum diterapkan kebijakan yang saling berkesesuaian melalui sinergi dan kolaborasi antarlembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan industri kopi
Elemen 6 : Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan kualitas produksi kopi berbasis green technology dan zero waste processing	Belum diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi kopi berbasis green technology serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerja sama internasional	Peningkatan branding kopi melalui penguatan kerja sama internasional	Belum ada inisiasi dan kerja sama internasional khususnya dalam branding kopi lokal Banyumas

Tabel 14. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Prioritas 1. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Regulasi pengembangan ekonomi kreatif, destinasi dan event berbasis riset	Ada atau tersedianya kebijakan tematik, roadmap riset ekraf dan pariwisata	Belum ada roadmap riset spesifik sektor, dan kebijakan masih umum sektor pariwisata
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
SDM inovasi desa wisata dan ekraf, inkubasi kreatif	Jumlah SDM tersertifikasi dan inkubator aktif	SDM kreatif tumbuh, tetapi belum sistematis berbasis riset

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kolaborasi pentahelix (kampus, komunitas, industri, pemda, dan media)	Jumlah MoU/MoA aktif, program kolaboratif	Kolaborasi ada, belum terstruktur dan berkelanjutan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Kompetisi inovasi kreatif, dan kurasi produk lokal berbasis riset	Event inovasi, inovasi terdaftar, Kekayaan Intelektual (KI) produk kreatif	Event ada, pendaftaran KI dan riset produk masih rendah
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Sinkronisasi riset dengan desa wisata dan ekraf	Riset menuju program yang mendukung hilirisasi UMKM	Banyak riset kampus belum link dengan kebutuhan desa/UMKM
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Standar global pariwisata, digital tourism, Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis	Sertifikasi CHSE, Kekayaan Intelektual, paket wisata global	Sudah promosi, standar global dan Kekayaan Intelektual belum masif
Prioritas 2: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Kebijakan riset infrastruktur hijau, lab lingkungan, dan data geospasial	Dokumen kebijakan, sistem data lingkungan, dan lab pengujian	Infrastruktur laboratorium dan data lingkungan belum terintegrasi optimal
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Tenaga teknis riset lingkungan dan infrastruktur	Fungsional peneliti/tenaga ahli, dan pelatihan teknis	Tenaga teknis riset minim dan belum terlembaga di OPD
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kemitraan riset lingkungan antara universitas, NGO, dan komunitas	Kolaborasi riset lingkungan dan mitigasi	Kemitraan insidental dan belum jadi agenda riset bersama
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Budaya inovasi <i>green-tech</i> di masyarakat dan komunitas	Kampanye dan komunitas inovasi lingkungan	Gerakan lingkungan tumbuh tetapi belum berbasis riset terapan
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Integrasi riset lingkungan ke perencanaan pembangunan	Riset masuk dokumen perencanaan (RPJMD/ RKPD)	Sebagian riset belum menjadi dasar kebijakan teknis
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Standar <i>green infrastructure</i> , dan <i>carbon management</i>	Proyek berbasis ESG dan indeks lingkungan	Wacana <i>green infrastructure</i> mulai masuk, tetapi implementasi terbatas
Prioritas 3: Ketahanan Pangan		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Roadmap riset pangan daerah dan infrastruktur riset pertanian	Ketersediaan peta jalan riset pangan, dan <i>demplot/seed center</i>	Riset sporadis, pusat data pangan dan demplot belum terlembaga kuat

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penyuluh/peneliti pangan, dan pusat inovasi pertanian	SDM pendamping riset, dan pelatihan teknologi pertanian	Penyuluh ada, namun riset terapan dan diseminasi masih terbatas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kerja sama dengan BRIN, perguruan tinggi, dan offtaker pangan	<i>Pilot project</i> , kontrak <i>offtaking</i> , dan riset terapan	Pilot riset ada, belum berlanjut ke rantai pasok sistematis
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Inovasi di kelompok tani dan pangan lokal	Jumlah inovasi panen, dan pengolahan pangan lokal	Inovasi tumbuh di kelompok tani, tetapi belum terdokumentasi riset
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Keterpaduan riset dengan kebijakan pangan dan <i>offtaker</i>	Riset menuju komersialisasi pangan	Hilirisasi lemah, tetapi belum menjadi rantai ekosistem pangan
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Standar pangan global, <i>traceability</i> , dan sertifikasi ekspor	Sertifikasi pangan dan pasar ekspor	Beberapa produk ekspor, tetapi standar global belum merata
Prioritas 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbasis data riset, infrastruktur big data	Regulasi dan dashboard data sektoral	SPBE berjalan, namun data riset sektoral belum terintegrasi penuh
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perencanaan berbasis bukti	Pelatihan <i>data-driven policy</i> , dan analisis kebijakan	Kapasitas meningkat namun tidak merata antar OPD
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kemitraan inovasi pelayanan publik dan digital government	Kolaborasi <i>Government Technology</i> (GovTech), akademisi, dan penyedia teknologi	Mulai berjalan, tetapi ekosistem inovasi digital belum matang
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Budaya inovasi birokrasi dan kompetisi inovasi OPD	Jumlah inovasi OPD terdaftar Indeks Inovasi Daerah (IID)	Partisipasi naik, namun kualitas inovasi masih perlu peningkatan
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Perencanaan berbasis <i>evidence</i> dan riset lintas OPD	Persentase kebijakan berbasis data riset	Sudah mulai berjalan, integrasi lintas OPD masih sektoral
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
GovTech, open data, dan interoperabilitas	Layanan digital terintegrasi, dan open data	SPBE berkembang, tetapi interoperabilitas data belum optimal

BAB III. TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Untuk mewujudkan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM, bab ini menganalisis secara rinci kondisi tiga hal utama yaitu tantangan dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa datang, peluang dalam pemanfaatan riset dan inovasi di masa datang, dan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan. Penjelasan dari hasil analisis tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini.

A. Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang

Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dalam lima tahun ke depan tidak mungkin terlepas dari berbagai tantangan yang akan dihadapi. Berbagai bentuk tantangan, termasuk dalam pelaksanaan hingga pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi, perlu dihadapi secara strategis dan efektif sehingga pembangunan tetap dapat berjalan lancar. Tantangan dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyumas lima tahun ke depan mengacu pada beberapa isu yaitu:

1) Terbatasnya Produktivitas SDM Peneliti di Daerah

Pengembangan riset dan inovasi sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam bidang ilmiah dan teknis. Tantangan yang sering dihadapi oleh daerah adalah kesenjangan dalam keterampilan dan keahlian Sumberdaya Manusia (SDM) peneliti yang sesuai dengan kebutuhan riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Walaupun dari sisi jumlah SDM peneliti di Kabupaten Banyumas telah memadai, tetapi dari sisi produktivitas masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh

keterbatasan dana penelitian dan kurangnya sinergisitas *pentahelix* dalam riset dan inovasi daerah.

2) Minimnya Anggaran Terkait Riset dan Inovasi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pengembangan riset dan inovasi di daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Kurangnya pendanaan yang memadai dapat menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan riset dan inovasi. Keterbatasan finansial dapat mempengaruhi beberapa aspek penting dalam pengembangan riset dan inovasi. Fasilitas penelitian yang modern menjadi sulit untuk dikembangkan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja riset juga memerlukan investasi yang besar. Daerah perlu memastikan kepemilikan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam bidang riset dan inovasi. Kurangnya pendanaan dapat membatasi kemampuan daerah untuk menyediakan pelatihan yang memadai bagi para peneliti. Tantangan pendanaan ini juga mempengaruhi keberlanjutan kegiatan riset dan pengembangan yang berkelanjutan. Riset dan inovasi yang sukses memerlukan pendanaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Penting bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber dana yang beragam, seperti kerja sama dengan sektor swasta, partisipasi dalam program pendanaan nasional maupun internasional.

3) Hambatan Kultural Kelitbangan dalam Birokrasi

Rendahnya kesadaran pengambil kebijakan untuk memanfaatkan fungsi litbang dalam formulasi kebijakan. Tantangan litbang di daerah salah satunya adalah masih rendahnya tingkat aplikasi hasil-hasil penelitian pada sektor-sektor yang terkait ke dalam suatu kebijakan yang dijalankan

oleh pemerintah daerah. Selain itu, tantangan litbang daerah juga terkait dengan masih rendahnya publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga manfaatnya belum optimal.

Kelembagaan litbang dalam struktur pemerintahan daerah diharapkan dapat berperan strategis untuk mendorong pembangunan daerah. Semakin tinggi kapasitas litbang daerah maka diharapkan akan menghasilkan konsep, model, dan pilihan kebijakan yang akurat sebagai dasar dalam menentukan arah dan strategi pembangunan daerah. Arah dan strategi pembangunan yang tepat akan mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

4) Belum Optimalnya Kolaborasi Riset dan Inovasi

Kolaborasi antara sektor publik, swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat memainkan peran krusial dalam pengembangan riset dan inovasi dalam konteks percepatan ekonomi daerah. Kerja sama ini seringkali dihadapkan pada tantangan dalam membangun hubungan yang efektif dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda. Tanpa sinergi yang kuat dan koordinasi yang efektif, pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan inisiatif inovatif yang diperlukan untuk percepatan ekonomi daerah dapat terhambat.

Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi dengan menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif bagi kolaborasi lintas sektor. Dengan mengatasi hambatan dalam kolaborasi tersebut, sektor publik, swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat dapat bekerja sama secara efektif untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang kuat. Kolaborasi yang kuat ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong

inovasi yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

5) Belum Optimalnya Upaya Komersialisasi dan Hilirisasi Hasil Riset

Tantangan yang dihadapi dalam adopsi inovasi di sektor industri dan masyarakat masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menghubungkan hasil riset dengan penerapan komersial yang praktis dan memadai. Meskipun inovasi baru telah dikembangkan, ada kesenjangan yang perlu diatasi untuk menerapkan inovasi tersebut secara luas dalam kegiatan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam adopsi inovasi adalah keterbatasan akses ke pasar. Pihak yang ingin mengadopsi inovasi sering menghadapi kendala dalam mengakses pasar yang relevan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti hambatan regulasi, kebutuhan investasi yang tinggi, atau keterbatasan jaringan dan koneksi bisnis. Keterbatasan akses ke pasar dapat membatasi peluang bisnis untuk mengadopsi inovasi yang telah dikembangkan, sehingga menghambat adopsi inovasi yang lebih luas.

Kurangnya dukungan dalam mengintegrasikan inovasi ke dalam proses bisnis juga menjadi tantangan. Integrasi inovasi yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai tambah yang ditawarkan oleh inovasi tersebut, serta kemampuan untuk mengadaptasi proses bisnis yang ada. Kurangnya dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan inovasi ke dalam operasional bisnis dapat menghambat adopsi inovasi yang lebih luas.

6) Kurangnya Sumber Daya dan Lemahnya Tata Kelola Dalam Pengembangan Inovasi Berbasis Teknologi

Inovasi berbasis teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satu bentuk dari Inovasi Daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Kabupaten Banyumas Pasal 1 yang menyatakan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Merujuk pada pengertian tersebut, Inovasi Daerah yang berbasis teknologi dicirikan dengan adanya ilmu, teknologi, dan/atau metode baru dalam melakukan suatu proses sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi proses tersebut.

Inovasi daerah baik yang berbasis teknologi maupun tidak pada dasarnya dilakukan dengan tujuan pengembangan dan pembangunan masyarakat maupun peningkatan kualitas serta tata kelola pemerintahan. Namun, inovasi berbasis teknologi seringkali tidak berlanjut dan berhenti di tengah jalan dikarenakan kurangnya dukungan berupa sumber daya teknologi dan tata kelola yang lemah. Inovasi berbasis teknologi membutuhkan sumber daya yang relevan dengan teknologi yang digunakan, baik sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi tertentu maupun sumber daya anggaran dan fasilitas yang mencukupi, mengingat kebutuhan anggaran untuk penerapan teknologi terkini cukup besar.

Pada tahap awal peluncuran inovasi berbasis teknologi, misalnya inovasi berbentuk aplikasi mobile digital, Pemerintah Daerah dapat melakukan skema *outsourcing* ataupun *contracting*

out yang melibatkan pihak ketiga di luar pemerintahan dan pada umumnya adalah pihak swasta. Pihak ketiga yang dimaksud adalah *developer* atau lebih dikenal dengan tim pengembang aplikasi. Hal ini perlu dilakukan karena secara struktural Pemerintah Daerah belum memiliki bagian fungsional yang secara spesifik menguasai kompetensi tertentu untuk menerapkan teknologi dalam hal ini adalah pengembangan aplikasi digital. Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah perlu aktif berkolaborasi dengan pihak-pihak dari berbagai sektor di luar lingkungan pemerintahan untuk menerapkan inovasi berbasis teknologi, khususnya pada aspek-aspek teknis yang di mana Pemerintah Daerah belum memiliki kompetensi teknologi yang dibutuhkan.

Skema tata kelola seperti *outsource* dan *contracting out* dapat diikuti dengan proses alih teknologi pada tahun anggaran kedua ataupun tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat meneruskan dan mengembangkan inovasi teknologi secara mandiri tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis. Kemitraan tahun jamak dengan kerja sama pihak ketiga juga dapat menjadi salah satu pilihan skema tata kelola untuk pengembangan inovasi berbasis teknologi.

Kebijakan dan langkah lebih lanjut perlu dilakukan untuk menyediakan dukungan-dukungan teknis terhadap inovasi berbasis teknologi. Dukungan berupa sumber daya teknologi dan penguatan skema tata kelola inovasi merupakan dua hal mendasar guna memastikan inovasi teknologi berbasis dapat dilaksanakan. Tanpa dukungan tersebut, inovasi berbasis teknologi hanya akan menjadi konsep yang terkesan memaksakan diri untuk mengejar perkembangan zaman tanpa memperhatikan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

7) Aspek Birokratis dan Administratif yang Lebih Mudah dan Efisien

Birokrasi yang masih berbelit dan alur proses administrasi yang cukup panjang dapat menghambat terciptanya ekosistem riset dan inovasi daerah yang kondusif. Penerapan sebuah inovasi memerlukan fasilitasi proses dan prosedur yang mudah. Apabila prosedur terlalu bersifat birokratis, penerapan dan pemanfaatan inovasi tersebut akan sulit untuk dilakukan. Belum lagi dengan adanya mutasi (pergantian personil) yang tidak diiringi mekanisme transfer tugas dan mekanisme keberlanjutan program yang sedang dijalankan. Hal ini rentan menimbulkan kemandegan dalam implementasi hasil riset dan inovasi. Birokrasi yang sederhana, administrasi yang memudahkan, dan transisi kepemimpinan/personil yang matang merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merealisasikan dan memanfaatkan hasil inovasi.

Rasionalitas dan adaptabilitas dibutuhkan dalam menyusun prosedur kinerja birokrasi untuk mengelola hasil riset dan inovasi daerah. Dukungan birokrasi dan administrasi bersifat mutlak agar pengembangan hasil riset dan inovasi dapat terselenggara dengan lancar. Dalam rangka menjaga keberlanjutan implementasi hasil riset dan inovasi, pemerintah perlu menyediakan insentif bagi para inovator melalui kepastian dan ketersediaan anggaran yang memadai, kepastian waktu dalam mengawal proses inovasi sampai dengan berjalan *by system*, serta pembentukan tim kerja dari mulai tahap awal inovasi sampai dengan pengembangan inovasi di level yang lebih tinggi.

B. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang

Terlepas dari adanya tantangan yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah, masih terdapat berbagai peluang yang dapat mendukung kesuksesan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk UM-IKM. Peluang di bidang riset dan inovasi daerah yang terurai di bawah ini mengacu pada penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Banyumas dalam lima tahun ke depan. Peluang dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyumas lima tahun ke depan mengacu pada beberapa isu seperti berikut ini:

1). Pemberian Penghargaan Terhadap Pelaku Riset dan Inovasi di Daerah

Pemberian penghargaan terhadap pelaku riset dan inovasi di daerah dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para pelaku riset dan inovasi. Adanya apresiasi dapat memotivasi generasi muda untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan riset dan inovasi di daerah. Selain itu, pemberian penghargaan terhadap pelaku riset dan inovasi dapat meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Produktivitas riset dan inovasi menjadi fokus penguatan ekosistem riset dan inovasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengapresiasi pelaku riset inovasi adalah dengan mengadakan ajang KRENOVA (Lomba Kreativitas dan Inovasi). KRENOVA adalah bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ditujukan kepada para inovator dalam rangka mendukung kemajuan produk inovasi untuk masyarakat luas. KRENOVA diinisiasi oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang berkolaborasi dengan komunitas, akademisi, dan

masyarakat. Inovator yang dimaksud adalah peserta yang dapat berasal dari individu/perorangan, kelompok, maupun umum. Penghargaan yang diberikan tidak sebatas pada penghargaan berbentuk materiil, namun juga berlanjut pada penghargaan yang berbentuk pembinaan dan kesempatan untuk mengikuti ajang di tingkat yang lebih tinggi.

KRENOVA berpeluang dalam meningkatkan kondusivitas ekosistem riset dan inovasi daerah melalui pelibatan masyarakat umum dan pemberian penghargaan serta bentuk pembinaan terhadap karya-karya inovasi terpilih. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat umum, akademisi, maupun lembaga/institusi di wilayah Kabupaten Banyumas untuk bersaing dalam menunjukkan kreativitas dan inovasinya melalui karya-karya yang implementatif dan tepat guna.

2). Upaya Daerah Menyiapkan SDM yang Siap Melakukan Inovasi

Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih menjadi peluang penting untuk mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi berbasis riset dan inovasi. Ini merupakan potensi atau keunggulan yang dapat dijadikan landasan untuk mendorong sektor ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam riset dan inovasi dapat berperan sebagai agen perubahan dan penggerak kolaborasi di daerah.

Sumber daya dimaksud dapat membangun jaringan kerja yang kuat antara universitas, lembaga penelitian, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan penciptaan inovasi bersama yang berdampak positif pada pertumbuhan

ekonomi daerah. Selain itu, sumber daya yang terampil dan terlatih juga dapat memainkan peran sebagai mentor atau pelatih bagi generasi muda yang berpotensi, mendorong perkembangan keterampilan dan minat dalam riset dan inovasi.

Upaya yang dilakukan dalam membangun jaringan kerja tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama penelitian dan pengembangan masyarakat dengan perguruan tinggi yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Jaringan kerja dapat dilakukan antara lain dengan menginisiasi proyek inovasi, kolaborasi di bidang penelitian, maupun pengembangan dan penerapan hasil riset inovasi dari perguruan tinggi. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan SDM yang ada di perguruan tinggi dalam melaksanakan program riset inovasi daerah serta implementasi hasil riset inovasi di masyarakat.

3). Terlaksananya Pemanfaatan Riset dan Inovasi yang Mengandung Pembaharuan Seluruh atau Sebagian Unsur Obyek Inovasi dan Memberi Manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, riset dan inovasi menjadi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi idealnya menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian dapat memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian untuk mengatasi kekurangan dan tantangan penelitian dan menghasilkan solusi inovatif yang efektif. Melalui kemitraan, pemerintah dapat menyediakan sumber daya finansial melalui anggaran belanja pemerintah, akses data dan informasi, serta kebijakan yang mendukung pengembangan

riset dan inovasi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan masyarakat dan masalah yang dihadapi oleh daerah. Di sisi lain, sektor swasta membawa pengetahuan dan keahlian industri, serta sumber daya finansial yang dapat diinvestasikan dalam riset dan pengembangan. Pihak swasta dapat membantu mempercepat komersialisasi inovasi, mengidentifikasi peluang pasar, dan memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Lembaga penelitian, seperti universitas atau pusat riset, berkontribusi dengan pengetahuan ilmiah yang mendalam, keahlian penelitian, dan fasilitas penelitian yang canggih. Lembaga penelitian dapat melakukan riset yang mendalam untuk memecahkan tantangan spesifik, mengembangkan teknologi baru, atau mengidentifikasi peluang inovatif. Melalui kemitraan dengan sektor publik dan swasta, lembaga penelitian dapat memberikan pengetahuan dan temuan inovasi ke dalam praktik yang relevan secara komersial, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4). Dukungan Kebijakan Regulasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menunjukkan upaya dukungan terhadap ekosistem riset dan inovasi daerah dengan diterbitkannya sebuah regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang riset dan inovasi daerah yang meliputi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, hingga pada penerapan hasil riset dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas serta tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024, hasil riset dan inovasi menjadi salah satu dasar untuk mengatasi isu-isu strategis daerah dan membantu pencapaian tujuan pembangunan. Pasal 18 tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan riset dapat ditujukan untuk keperluan-keperluan: 1) Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan; 2) Landasan pengambilan keputusan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; 4) Naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan 5) Solusi permasalahan pembangunan.

Selain mengatasi isu strategis dan pencapaian tujuan pembangunan, hasil riset dan inovasi daerah juga berpeluang dalam menjadi landasan pengambilan keputusan serta landasan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mengupayakan agar hasil riset dan inovasi daerah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan yang ada.

5). Eksistensi dan Optimalisasi SIAPPMAS

Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas (SIAPPMAS) merupakan hasil inovasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai wadah inovasi dari para inovator dan sebagai sarana penyebarluasan inovasi di bidang pelayanan publik. Melalui situs SIAPPMAS, masyarakat dapat belajar dan bertukar informasi terkait berbagai macam inovasi baik yang berasal dari masyarakat maupun dari instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Eksistensi SIAPPMAS merupakan sebuah potensi sekaligus peluang dalam mengembangkan riset dan inovasi daerah. Potensi yang dimaksud adalah peran SIAPPMAS sebagai wadah

inovasi serta media publikasi karya inovatif dari berbagai unsur masyarakat. Peran SIAPPMAS tersebut berpotensi dalam meningkatkan kondusivitas ekosistem riset dan inovasi daerah. Sementara peluang yang dimaksud datang dari adanya celah dalam sistem SIAPPMAS yang dapat diperbaiki serta dioptimalkan fungsinya melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.

Celah yang dapat dikembangkan salah satunya adalah terkait pembaharuan data. Data inovasi terbaru yang ditampilkan pada situs SIAPPMAS adalah inovasi pada tahun 2022. Belum ditemukan adanya data inovasi di tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun ini. Hal ini merupakan peluang yang perlu dioptimalkan dengan langkah-langkah intensifikasi, yakni langkah yang fokus pada upaya memanfaatkan berbagai fungsi dan fitur yang ada di SIAPPMAS semaksimal mungkin. Selain pembaharuan data, intensifikasi dapat dilakukan dengan menerbitkan berita-berita di bidang riset dan inovasi daerah secara berkala. Pada laman SIAPPMAS saat ini hanya ada tiga buah berita dari rentang waktu 2022 hingga 2024. Intensifikasi penerbitan berita juga perlu dilakukan agar eksistensi SIAPPMAS semakin berpeluang kuat dalam menjadi sumber rujukan masyarakat di bidang riset dan inovasi daerah.

Langkah ekstensifikasi juga perlu dilakukan seiring dengan langkah-langkah intensifikasi. Ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambahkan beberapa fungsi dan fitur yang sebelumnya tidak tersedia di SIAPPMAS. Langkah ekstensifikasi yang dapat dilakukan salah satu di antaranya adalah menghubungkan sistem SIAPPMAS dengan sistem milik Pemerintah Provinsi, lembaga riset (BRIN dan BRIDA), maupun sistem-sistem repositori yang ada di perguruan tinggi. Penghubungan sistem ini dimaksudkan agar SIAPPMAS dapat

berkembang menjadi sebuah hub (pusat) yang menyediakan kebutuhan informasi dalam bidang riset dan inovasi daerah di Kabupaten Banyumas. Langkah ekstensifikasi lainnya dapat dilakukan dengan melihat celah-celah dan peluang pengembangan yang ada. Melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi ini, peran dan fungsi SIAPPMAS dapat dioptimalkan sehingga berpeluang besar dalam meningkatkan kondusivitas dan tata kelola riset inovasi daerah.

6). Prestasi Kabupaten Banyumas Dalam Bidang Riset dan Inovasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mencetak beberapa pencapaian di bidang riset dan inovasi salah satunya adalah dengan peluncuran sistem SIAPPMAS. SIAPPMAS menjadi aplikasi dan sistem pertama di tingkat kabupaten yang mereplikasi aplikasi pelayanan publik JIPP (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik) Jawa Tengah. Selain itu, pencapaian dalam inovasi pelayanan publik juga berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan dimulainya program Lab Inovasi sejak tahun 2017. Program ini berhasil mendukung Kabupaten Banyumas dalam mengirimkan berbagai inovasinya di ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui ajang SINOVIK, Kabupaten Banyumas berhasil mengajukan 4 inovasi pelayanan publik dan berhasil meraih penghargaan dengan masuk dalam kategori TOP 99. Salah satu inovasi pelayanan publik tersebut berhasil masuk dalam kategori TOP 45 dan berhasil tembus untuk dapat mengikuti United Nation Public Service Awards (UNPSA) yang merupakan

ajang kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat internasional.

Prestasi ini merupakan peluang yang dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meraih prestasi dan pencapaian pada level yang lebih tinggi lagi. Selain itu, prestasi ini juga berpeluang dalam menghadirkan berbagai riset dan inovasi yang lebih mutakhir dan bermanfaat bagi masyarakat, karena sejatinya hasil riset dan inovasi daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance). Hasil riset dan inovasi yang baik tidak hanya dilihat dari raihan prestasinya saja, namun juga perlu ditinjau dari aspek kebermanfaatan dan dampaknya di masyarakat

C. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Diharapkan

Menurut Pasal 1 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah kumpulan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah. Pada dasarnya, ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keragaan interaksi antara elemen yang mendukung riset dan inovasi di daerah. Melalui BRIN, pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki dan memperkuat ekosistem ini. Dengan memiliki basis riset dan inovasi yang baik, pemerintah berharap dapat meningkatkan kebijakan dan layanan publik. Oleh karena itu, pembangunan daerah dapat dipercepat melalui penelitian dan inovasi, terutama dalam hal penerapan inovasi teknologi.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah terbagi menjadi enam elemen yaitu: (1) Kebijakan dan infrastruktur riset inovasi di daerah; (2) Kapasitas kelembagaan

dan daya dukung riset inovasi di daerah; (3) Kemitraan riset inovasi di daerah; (4) Budaya riset inovasi di daerah; (5) Keterpaduan riset inovasi di daerah; dan (6) Penyelarasan dengan perkembangan global. Kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan pada bagian ini dikaji dengan memperhatikan standar ekosistem yang disarankan BRIN, sehingga pemerintah daerah melalui BRIDA dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.

Kondisi ekosistem riset dan inovasi yang ideal untuk mengatasi isu strategis daerah di Kabupaten Banyumas harus melibatkan elemen-elemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Berikut adalah keenam elemen beserta kondisi umum yang ideal untuk dicapai:

1). Kebijakan dan Infrastruktur Riset Inovasi di Daerah

Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi dengan fokus pada isu strategis daerah, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Penyediaan fasilitas riset yang memadai, seperti laboratorium, pusat inovasi, dan akses ke teknologi terbaru. Selain itu, perlu ada jaringan internet yang kuat dan sumber daya listrik yang andal untuk mendukung kegiatan riset.

2). Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset Inovasi di Daerah

Penguatan lembaga riset lokal, universitas, dan pusat penelitian yang berfokus pada isu-isu strategis daerah. Penyediaan dana yang memadai dan berkelanjutan untuk riset, serta program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk peneliti dan inovator.

3). Kemitraan Riset Inovasi di Daerah

Membangun kemitraan yang erat antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Misalnya, kolaborasi dengan universitas untuk penelitian terapan yang dapat langsung diimplementasikan di masyarakat. Pembentukan jaringan kemitraan dengan institusi riset nasional dan internasional untuk transfer teknologi dan pengetahuan.

4). Budaya Riset Inovasi di Daerah

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya riset dan inovasi melalui kampanye edukasi dan program literasi. Memberikan penghargaan dan insentif kepada individu dan lembaga yang berkontribusi dalam bidang riset dan inovasi.

5). Keterpaduan Riset Inovasi di Daerah

Integrasi program riset dan inovasi dengan rencana pembangunan daerah. Misalnya, riset tentang pertanian berkelanjutan harus diintegrasikan dengan program pembangunan ekonomi daerah. Koordinasi sektoral yang efektif antara berbagai sektor dan lembaga untuk memastikan sinergi dalam implementasi riset dan inovasi.

6). Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Adopsi teknologi dan praktik terbaik dari tingkat global yang relevan dengan kondisi lokal. Penyesuaian kebijakan lokal berdasarkan tren global dalam riset dan inovasi perlu dilakukan agar tetap relevan dan kompetitif. Dalam rangka mengatasi isu-isu strategis daerah di Kabupaten Banyumas, kondisi ekosistem riset dan inovasi harus mencakup keenam elemen yang telah disebutkan di atas. Hal ini dilakukan agar langkah dan kebijakan yang akan diimplementasikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BRIN.

Berdasarkan isu strategis yang ada di Kabupaten Banyumas, ekosistem riset dan inovasi perlu mengakomodasi isu-isu tersebut. Ekosistem riset dan inovasi daerah mengakomodasi isu strategis tersebut melalui kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) dengan pendekatan dan kondisi sebagai berikut:

1). Ekonomi Kreatif dari Pariwisata

Ekosistem riset dan inovasi merupakan fondasi utama untuk mentransformasi potensi alam, budaya, dan sosial Kabupaten Banyumas menjadi nilai tambah ekonomi yang tinggi melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Penerapan ekosistem riset dan inovasi memastikan bahwa pengembangan kedua sektor ini dilakukan secara *evidence-based*, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan pasar, sehingga mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan dan terukur. Relevansi ekosistem riset dan inovasi terletak pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan keunggulan kompetitif Banyumas dalam:

- Peningkatan daya saing dan nilai jual

Riset mendalam terhadap kearifan lokal, seni pertunjukan (subsektor unggulan Banyumas), kuliner, dan potensi alam (wisata alam dan budaya) menghasilkan inovasi produk dan layanan yang unik, berbeda, dan berstandar global. Inovasi ini mengubah produk biasa menjadi produk bernilai ekonomi kreatif tinggi.

- Pengembangan Pariwisata Berbasis Data

Riset pasar (domestik dan internasional), studi perilaku wisatawan, serta analisis dampak lingkungan dan sosial membantu merumuskan kebijakan pariwisata yang tepat sasaran (misalnya, pengembangan desa wisata yang melibatkan Pokdarwis dan UMKM lokal) dan berkelanjutan.

- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kreatif

Inovasi tidak hanya tentang produk, tetapi juga proses. Ekosistem RISET DAN INOVASI mendukung pengembangan kurikulum pelatihan, inkubasi bisnis, dan *knowledge sharing* yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif dan pariwisata, memastikan SDM lokal memiliki keterampilan yang adaptif (misalnya, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran).

2). Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Sistem *e-government* yang baik dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan publik dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Menggunakan data dan hasil penelitian untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif dan berbasis bukti. Misalnya, analisis data kependudukan untuk menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Melalui optimalisasi pada ekosistem riset dan inovasi daerah, diharapkan Kabupaten Banyumas dapat mengatasi isu-isu strategis daerah lebih efektif berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kombinasi antara riset ilmiah, inovasi, dan implementasi kebijakan yang berbasis bukti akan memungkinkan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Kondisi yang ingin dicapai meliputi dua substansi pokok yaitu: a) Kondisi umum ekosistem riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan produk-produk unggulan daerah; b) Kondisi umum ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mengatasi isu-isu strategis (permasalahan-permasalahan utama) daerah.

3). Infrastruktur

Ekosistem riset dan inovasi juga memiliki relevansi yang krusial dan tidak terpisahkan dalam menjawab isu-isu strategis terkait infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, serta ketahanan iklim dan bencana di Kabupaten Banyumas. Peran riset dan inovasi adalah sebagai motor penggerak solusi berbasis data yang mengubah pendekatan reaktif menjadi proaktif dan berkelanjutan. Dalam pengembangan wilayah dan daya saing infrastruktur daerah, infrastruktur di Banyumas seperti jalan, jembatan, dan irigasi saat ini mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan dan faktor iklim. Riset dan inovasi berperan untuk mewujudkan infrastruktur yang cerdas (*smart*) dan tangguh (*resilient*). Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, Banyumas menghadapi tantangan nyata terkait persampahan dan daya dukung pangan. Riset dan inovasi menjadi kunci dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan. Dalam ketahanan iklim dan bencana, riset dan inovasi sangat vital untuk mitigasi dan adaptasi yang efektif mengingat Banyumas berada di wilayah dengan potensi bencana (banjir, longsor, erupsi Gunung Slamet).

4). Ketahanan Pangan

Relevansi ekosistem riset dan inovasi terhadap ketahanan pangan di Banyumas sangat fundamental dan berfokus pada tiga aspek utama: Produktivitas, Diversifikasi Pangan, dan Adaptasi Iklim. Riset dan inovasi tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang cukup (kuantitas), tetapi juga menjamin pangan yang bergizi, aman, dan berkelanjutan (kualitas dan stabilitas), yang mana merupakan tantangan utama di tengah konversi lahan dan perubahan iklim. Riset dan inovasi berperan langsung dalam meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya lahan pertanian yang semakin terbatas melalui riset varietas unggul lokal, *smart farming* dan pertanian presisi, dan inovasi pengelolaan lahan. Ketergantungan masyarakat Banyumas pada beras masih tinggi mendorong riset dan inovasi menjadi kunci untuk menggeser pola konsumsi menuju keragaman pangan berbasis potensi lokal. Ketidakpastian cuaca akibat perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi stabilitas produksi pangan sehingga riset dan inovasi menawarkan solusi adaptif melalui permodelan iklim mikro, sistem irigasi inovatif, dan integrasi kearifan lokal.

D.Kondisi Umum Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk UM-IKM Berbasis Produk Unggulan

Kondisi akhir yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan produk-produk unggulan daerah ditunjukkan oleh Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Kondisi Akhir yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Meningkatkan dan Mengembangkan Produk Unggulan Daerah

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Prioritas 1: Pengembangan Gula Kelapa		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Terbitnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri gula kelapa	Terbitnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri gula kelapa misalnya kebijakan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan mitra dalam hal pembiayaan, pendampingan dan pelatihan <i>soft skill</i>
Penataan basis data riset dan inovasi	Terbangunnya basis data tentang industri gula kelapa	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang database industri gula kelapa
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi terkait industri gula kelapa	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan industri gula kelapa misalnya penyediaan mesin berteknologi terbaru di sentra pengolahan gula kelapa
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran pengembangan industri gula kelapa dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Tersedianya anggaran pengembangan industri gula kelapa dari hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk pengembangan industri gula kelapa	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis gula kelapa khas Banyumas
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Peningkatan kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan industri gula kelapa dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)	Terlaksananya kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan industri gula kelapa dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Peningkatan sarana pendukung dalam pengembangan industri gula kelapa yang tepat bagi pelaku usaha gula kelapa Banyumas	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan industri gula kelapa yang tepat bagi pelaku usaha gula kelapa Banyumas

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antarlembaga	Terwujudnya implementasi kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa	Terwujudnya implementasi kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa
Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda yang berperan langsung dalam difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa	Peningkatan jumlah dan mutu difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen gula kelapa dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran gula kelapa melalui kegiatan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan	Dilaksanakannya diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen gula kelapa dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran gula kelapa
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan branding gula kelapa Banyumas, penerimaan konsumen gula kelapa, omset, keuntungan dan kesejahteraan pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir serta peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi gula kelapa Banyumas melalui kegiatan promosi dan kampanye gula kelapa secara rutin dan berkelanjutan	Pelaksanaan promosi dan kampanye gula kelapa secara rutin dan berkelanjutan melalui festival maupun pameran gula kelapa dari aspek budaya, produksi, branding dan pemasaran
Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM gula kelapa hulu hingga hilir melalui kegiatan lomba inovasi yang diselenggarakan pemda dan apresiasi atas prestasi terkait gula kelapa	Dilaksanakannya lomba inovasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan industri gula kelapa pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan jumlah pelaku usaha gula kelapa dengan pasar nasional dan ekspor	Perusahaan pemula berbasis riset gula kelapa sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, branding dan pemasaran berkembang dengan baik
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya database dan sistem informasi tentang teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait gula kelapa yang mudah diakses oleh seluruh pihak	Terbangun dan berkembangnya database dan sistem informasi terkait gula kelapa dari aspek hulu hingga hilir

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Peningkatan penerapan teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir (budidaya kelapa, produksi gula kelapa cetak dan kristal yang bermutu, aman dan berkualitas ekspor; berdaya saing tinggi; strategi branding dan pemasaran lokal-nasional-ekspor)	Diterapkannya teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir secara konsisten dan berkelanjutan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi gula kelapa cetak dan kristal Banyumas serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha hulu hingga hilir gula kelapa serta perluasan pasar baik nasional maupun ekspor melalui pembentukan klaster-klaster produksi dan pemasaran gula kelapa	Terbentuk dan berkembangnya klaster gula kelapa secara bertahap dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa yang berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, jumlah dan kualitas gula kelapa serta luasnya pemasaran secara konsisten dan berkelanjutan melalui implementasi kebijakan pengembangan gula kelapa yang memiliki kesesuaian antara kebijakan di Pemda Banyumas dengan Kebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat	Pelaksanaan kebijakan yang saling berkesesuaian melalui sinergi dan kolaborasi antarlembaga di daerah dan pusat
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan kualitas produksi gula kelapa berbasis green technology dan zero waste processing	Penerapan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi gula kelapa berbasis green technology serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerja sama internasional	Peningkatan ekspor gula kelapa melalui penguatan kerja sama internasional	Pelaksanaan inisiasi dan kerja sama internasional khususnya dalam branding dan pemasaran gula kelapa
Prioritas 2: Pengembangan Durian		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Terbitnya kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan durian	Terbitnya kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan durian misalnya membangun program pinjaman atau kredit dengan bunga rendah serta membentuk kemitraan dengan lembaga keuangan atau pemerintah untuk menyediakan sumber daya finansial

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Penataan basis data riset dan inovasi	Terbangunnya basis data tentang budidaya dan pengolahan durian	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang database budidaya dan pengolahan durian
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi terkait budidaya dan pengolahan durian	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan budidaya dan pengolahan durian misalnya pengembangan saluran irigasi, jalan usaha tani, sarana gudang sebagai tempat penyimpanan alat budidaya dan pengolahan durian, serta sentra usaha durian lokal (bawor)
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan durian dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Tersedianya anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan durian hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk durian khas Banyumas	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis durian khas Banyumas
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Peningkatan kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)	Terlaksananya kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Peningkatan sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian yang tepat bagi pelaku usaha durian Banyumas	Tersedianya sarana pendukung seperti unit pergudangan / penyimpanan sementara hasil panen dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian bagi pelaku usaha durian khas Banyumas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar lembaga	Terwujudnya kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran durian	Terwujudnya kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran durian

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda yang berperan langsung dalam difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran durian	Peningkatan jumlah dan mutu difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran durian
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen durian dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran durian melalui kegiatan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan	Dilaksanakannya diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen durian dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran durian
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan branding durian Banyumas, penerimaan konsumen durian, omset, keuntungan dan kesejahteraan pelaku usaha durian dari hulu ke hilir serta peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi durian Banyumas melalui kegiatan promosi dan kampanye durian secara rutin dan berkelanjutan	Pelaksanaan promosi dan kampanye durian melalui festival dan pameran produk olahan durian secara rutin dan berkelanjutan
Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM durian hulu hingga hilir melalui kegiatan lomba inovasi yang diselenggarakan pemda dan apresiasi atas prestasi terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian	Dilaksanakannya lomba inovasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan jumlah pelaku usaha durian dengan pasar nasional dan ekspor	Perusahaan pemula durian berbasis riset sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, branding dan pemasaran berkembang dengan baik
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya database dan sistem informasi tentang teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait durian yang mudah diakses oleh seluruh pihak	Terbangun dan berkembangnya database dan sistem informasi terkait durian dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	Peningkatan penerapan teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha durian dari hulu ke hilir	Diterapkannya teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha durian dari hulu ke hilir

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
mengatasi permasalahan daerah		
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi durian Banyumas serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha hulu hingga hilir durian serta perluasan pasar baik nasional maupun ekspor melalui pembentukan klaster-klaster produksi dan pemasaran durian	Terbentuk dan berkembangnya klaster industri durian secara bertahap dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Pengembangan produksi dan pemasaran durian yang berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, jumlah dan kualitas durian serta luasnya pemasaran secara konsisten dan berkelanjutan melalui implementasi kebijakan pengembangan durian yang memiliki kesesuaian antara kebijakan di Pemda Banyumas dengan Kebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat	Pelaksanaan kebijakan yang saling berkesesuaian melalui sinergi dan kolaborasi antarlembaga di daerah dan pusat
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan kualitas produksi durian berbasis green technology dan zero waste processing	Penerapan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi durian berbasis green technology serta proses dengan minimal ERK pada industri pengolahan produk durian
Penguatan kerja sama internasional	Peningkatan ekspor durian melalui penguatan kerja sama internasional	Pelaksanaan inisiasi dan kerja sama internasional khususnya dalam branding dan pemasaran durian
Prioritas 3: Pengembangan Kopi		
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Terbitnya kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan kopi	Terbitnya kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan kopi misalnya peningkatan subsidi pupuk untuk tanaman kopi
Penataan basis data riset dan inovasi	Terbangunnya basis data tentang budidaya dan pengolahan kopi	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang database budidaya dan pengolahan kopi
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi terkait budidaya dan pengolahan kopi	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan budidaya dan pengolahan kopi misalnya pengembangan infrastruktur jalan usaha tani dan pendirian sentra kopi Banyumas

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Tersedianya anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dari hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk pengembangan budidaya dan pengolahan kopi khas Banyumas	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis dan HKI-merek kopi khas Banyumas
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Peningkatan kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)	Terlaksananya kolaborasi, kerja sama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Peningkatan sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi yang tepat bagi pelaku usaha kopi khas Banyumas	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi yang tepat bagi pelaku usaha kopi khas Banyumas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar lembaga	Terwujudnya implementasi kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi	Terwujudnya implementasi kemitraan antarlembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi
Peningkatan difusi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemda yang berperan langsung dalam difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran kopi	Peningkatan jumlah dan mutu difusi ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran kopi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen kopi dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran produk kopi melalui kegiatan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan	Dilaksanakannya diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen kopi dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran produk kopi.

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan branding kopi Banyumas, penerimaan konsumen kopi, omset, keuntungan dan kesejahteraan pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir serta peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi produk kopi Banyumas melalui kegiatan promosi dan kampanye kopi secara rutin dan berkelanjutan	Pelaksanaan promosi dan kampanye kopi secara rutin dan berkelanjutan melalui pameran kopi dari aspek budaya, produksi, branding dan pemasaran
Apresiasi prestasi inovasi	Peningkatan kapasitas SDM kopi dari hulu hingga hilir melalui kegiatan lomba inovasi yang diselenggarakan Pemda dan apresiasi atas prestasi terkait pengembangan budidaya dan pengolahan kopi	Dilaksanakannya lomba inovasi kopi secara rutin dan berkelanjutan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan jumlah pelaku usaha kopi dengan pasar nasional dan ekspor	Perusahaan pemula kopi berbasis riset sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, branding dan pemasaran berkembang dengan baik
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersedianya database dan sistem informasi tentang teknologi masyarakat/kearifan lokal terkait kopi dari aspek hulu hingga hilir yang mudah diakses oleh seluruh pihak	Terbangun dan berkembangnya database dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat/kearifan lokal tentang kopi dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Peningkatan penerapan teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir	Diterapkannya teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kopi Banyumas serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha hulu hingga hilir kopi serta perluasan pasar baik nasional maupun ekspor melalui pembentukan klaster-klaster produksi dan pemasaran kopi	Terbentuk klaster industri kopi dari hulu ke hilir secara bertahap dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Pengembangan produksi dan pemasaran kopi yang berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, jumlah dan kualitas kopi serta luasnya pemasaran secara konsisten dan berkelanjutan melalui implementasi kebijakan pengembangan budidaya dan pengolahan kopi yang	Pelaksanaan kebijakan yang saling berkesesuaian melalui sinergi dan kolaborasi antarlembaga di daerah dan pusat

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
	memiliki kesesuaian antara kebijakan di Pemda Banyumas dengan Kebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan kualitas produksi kopi berbasis green technology dan zero waste processing	Penerapan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi kopi berbasis green technology serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerja sama internasional	Peningkatan ekspor kopi melalui penguatan kerja sama internasional	Pelaksanaan inisiasi dan kerja sama internasional khususnya dalam branding dan pemasaran kopi

E. Kondisi Umum Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

Kondisi akhir yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti ditunjukkan oleh Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Kondisi Akhir yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Prioritas 1. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Regulasi pengembangan ekonomi kreatif, destinasi dan event berbasis riset	Ada atau tersedianya kebijakan tematik, roadmap riset ekraf dan pariwisata	Tersusunnya roadmap riset spesifik sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, serta kebijakan kreatif dan pariwisata yang sudah berbasis riset
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
SDM inovasi desa wisata dan ekraf, inkubasi kreatif	Jumlah SDM tersertifikasi dan inkubator aktif	SDM kreatif tumbuh dan sistematis berbasis riset
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kolaborasi pentahelix (kampus, komunitas,	Jumlah MoU/MoA aktif, program kolaboratif	Kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
industri, pemda, dan media)		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Kompetisi inovasi kreatif, dan kurasi produk lokal berbasis riset	Event inovasi, inovasi terdaftar, Kekayaan Intelektual (KI) produk kreatif	Event Krenova disertai dengan peningkatan pendaftaran KI dan riset produk
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Sinkronisasi riset dengan desa wisata dan ekraf	Riset menuju program yang mendukung hilirisasi UMKM	Terkoneksinya riset kampus dengan kebutuhan desa/UMKM
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Standar global pariwisata, digital tourism, Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis	Sertifikasi CHSE, Kekayaan Intelektual, paket wisata global	Peningkatan standar global dan Kekayaan Intelektual secara masif disertai penguatan promosi
Prioritas 2: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Kebijakan riset infrastruktur hijau, lab lingkungan, dan data geospasial	Dokumen kebijakan, sistem data lingkungan, dan lab pengujian	Terintegrasinya infrastruktur laboratorium dan data lingkungan
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Tenaga teknis riset lingkungan dan infrastruktur	Fungsional peneliti/tenaga ahli, dan pelatihan teknis	Tenaga teknis riset meningkat dan terlembaga di OPD
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kemitraan riset lingkungan antara universitas, NGO, dan komunitas	Kolaborasi riset lingkungan dan mitigasi	Kemitraan strategis dan terbentuknya agenda riset bersama
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Budaya inovasi <i>green-tech</i> di masyarakat dan komunitas	Kampanye dan komunitas inovasi lingkungan	Gerakan lingkungan tumbuh berbasis riset terapan
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Integrasi riset lingkungan ke perencanaan pembangunan	Riset masuk dokumen perencanaan (RPJMD/ RKPD)	Pemanfaatan hasil riset menjadi dasar kebijakan teknis
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Standar <i>green infrastructure</i> , dan <i>carbon management</i>	Proyek berbasis ESG dan indeks lingkungan	Implementasi <i>green infrastructure</i> pada

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
		setiap aspek kehidupan
Prioritas 3: Ketahanan Pangan		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Roadmap riset pangan daerah dan infrastruktur riset pertanian	Ketersediaan peta jalan riset pangan, dan <i>demplot/seed center</i>	Riset dilakukan secara keberlanjutan, serta pusat data pangan dan demplot terlembaga kuat
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penyuluh/peneliti pangan, dan pusat inovasi pertanian	SDM pendamping riset, dan pelatihan teknologi pertanian	Penyuluh meningkat peran dan kinerjanya, serta riset terapan dan diseminasi semakin meningkat
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kerja sama dengan BRIN, perguruan tinggi, dan offtaker pangan	<i>Pilot project</i> , kontrak <i>offtaking</i> , dan riset terapan	Pilot riset dan berlanjut ke rantai pasok sistematis
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Inovasi di kelompok tani dan pangan lokal	Jumlah inovasi panen, dan pengolahan pangan lokal	Inovasi tumbuh di kelompok tani disertai dokumentasi riset dan inovasi
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Keterpaduan riset dengan kebijakan pangan dan <i>offtaker</i>	Riset menuju komersialisasi pangan	Hilirisasi yang kuat dan menjadi rantai ekosistem pangan
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Standar pangan global, <i>traceability</i> , dan sertifikasi ekspor	Sertifikasi pangan dan pasar ekspor	Meningkatnya produk ekspor disertai pemerataan standar global
Prioritas 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbasis data riset, infrastruktur big data	Regulasi dan dashboard data sektoral	SPBE dapat dioptimalkan daya gunanya disertai integrasi data riset sektoral
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi yang Diharapkan
Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perencanaan berbasis bukti	Pelatihan data- <i>driven policy</i> , dan analisis kebijakan	Kapasitas meningkat disertai pemerataan antar OPD
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi		
Kemitraan inovasi pelayanan publik dan digital government	Kolaborasi <i>Government Technology</i> (GovTech), akademisi, dan penyedia teknologi	Dapat optimal berjalan disertai penguatan ekosistem inovasi digital
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi		
Budaya inovasi birokrasi dan kompetisi inovasi OPD	Jumlah inovasi OPD terdaftar Indeks Inovasi Daerah (IID)	Partisipasi naik disertai peningkatan kualitas inovasi
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Perencanaan berbasis <i>evidence</i> dan riset lintas OPD	Persentase kebijakan berbasis data riset	Semakin meningkat disertai integrasi lintas OPD
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
GovTech, open data, dan interoperabilitas	Layanan digital terintegrasi, dan open data	SPBE meningkat disertai optimalisasi interoperabilitas data

BAB IV. ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menunjukkan kesungguhan dalam mengembangkan kebijakan serta infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berlandaskan pengetahuan. Dengan menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) 2025–2029, pemerintah berinovasi mengarahkan kebijakan IPTEK agar sejalan dengan visi pembangunan daerah serta prioritas nasional. Selain itu sejalan dan tersinkronisasi dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan Trias Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2030. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan strategis untuk memperkuat sistem inovasi daerah dalam Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah pasal 23 ayat (2) yaitu a) elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah; b). elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi; c). elemen kemitraan Riset dan Inovasi; d) elemen budaya Riset dan Inovasi; e). elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah; dan 6). elemen penyelarasan dengan perkembangan global. Untuk itu analisis kesenjangan riset dan inovasi daerah dimaksudkan untuk memotret kondisi yang di harapkan dan kondisi saat ini sesuai indikator yang telah di tentukan oleh BRIN. Adapun penjelasannya Adalah sebagai berikut;

A. Kebijakan dan Infrastruktur IPTEK Daerah

Indikator awal dalam menganalisis kesiapan untuk pengembangan iptek dan penelitian daerah adalah kebijakan serta infrastruktur IPTEK di daerah. Kondisi ini merupakan hal yang fundamental karena berkaitan dengan dukungan pemerintah untuk

melaksanakan seluruh agenda pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian. Kehadiran dukungan kebijakan akan berfungsi sebagai payung bagi seluruh unsur pemerintahan untuk melakukan inovasi dan penelitian dalam menghadapi permasalahan daerah. Faktor penting dalam membangun ekosistem riset dan inovasi di suatu wilayah adalah kebijakan dan infrastruktur. Terdapat 6 indikator yang berhubungan dengan kebijakan dan infrastruktur tersebut di dalamnya. Dengan enam indikator ini, pemerintah daerah dapat mendapatkan pedoman yang cukup untuk mengenali perbedaan (gap) antara norma ekosistem riset dan inovasi dengan kondisi nyata di kawasan tersebut.

Dalam hal regulasi, Kabupten Banyumas mulai mengatur kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, sektor bisnis, dan masyarakat dalam pengembangan IPTEK. Melalui peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), pemerintah daerah berperan sebagai penghubung sekaligus pendorong kemajuan riset dan inovasi. Kebijakan ini juga didorong oleh berbagai program daerah yang menekankan penerapan hasil penelitian dalam mendukung inovasi layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta digitalisasi pengelolaan pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Namun, secara keseluruhan, infrastruktur yang mendukung IPTEK di Kabupten Banyumas masih harus diperkuat. Fasilitas penelitian dan laboratorium di daerah masih kurang, terutama yang langsung dimiliki oleh pemerintah daerah. Kebanyakan aktivitas penelitian masih bergantung pada fasilitas perguruan tinggi, seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Perguruan tinggi lain di lingkungan Kabupaten Banyumas. Keterbatasan ini

mengakibatkan kapasitas penelitian terapan dan pengembangan teknologi di tingkat lokal belum maksimal. Oleh karena itu, pembentukan pusat inovasi, pusat penelitian data daerah, dan laboratorium kolaboratif menjadi keharusan strategis untuk menguatkan ekosistem IPTEK di Kabupten Banyumas.

Tabel 17. Analisis Kesenjangan Kebijakan dan infrastruktur IPTEK Daerah

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
1	Reformasi kebijakan IPTEK daerah	Mempunyai peraturan (perda, perkara, regulasi lainnya) yang terkait dengan penelitian, inovasi, dan IPTEK	Belum ada Regulasi berupa Perda yang mengatur tentang Peta jalan Pemajuan IPTEK Daerah yang berkelanjutan
2	Penataan basis data IPTEK	a. Infrastruktur daring (situs web, aplikasi, basis data, jejaring sosial) b. Pencatatan Hasil Inovasi, penemu dan Pelopor Inovasi c. Satu Data, aksesibilitas, interoperabilitas data dan aplikasi	a. Belum ada portal/jurnal yang ber ISSN/terakreditasi b. Data tunggal belum ada sehingga tidak bisa terupdate dengan baik data Kabupaten Banyuams c. Satu data masih dalam Upaya pengembangan terutama data untuk pengentasan kemiskinan di Kabuapten Banyumas
3	Pengembangan infrastruktur dasar IPTEK	Memiliki technopark, inkubator, ruang kreatif publik, laboratorium, pusat penelitian, pusat pelatihan, dan pusat pengembangan bisnis dan inovasi.	a. Kabupaten Banyumas belum memiliki technopark sebagai wadah integrasi pengembangan IPTEK b. Belum memiliki incubator bisnis c. Memiliki Hetero Space Banyumas merupakan coworking space sekaligus creative hub di Purwokerto / Banyumas yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja remote/freelance/pebisnis

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
			untuk saling berjejaring dan berkolaborasi. Hetero Space Banyumas mulai berdiri sejak akhir tahun 2022.
4	Pengelolaan kebun raya daerah	Memiliki kebun raya sebagai infrastruktur riset yang potensial	Kebun Raya Batu Raden di Kelola oleh Kementerian dan Provinsi
5	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Penyediaan APBD untuk penyelenggaraan riset dan inovasi IPTEK serta program untuk mendorong para pelaku	Terdapat peningkatan anggaran bidang Litbang dari Rp 436.120,00 di tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2025 ada peningkatan yang signifikan yaitu 2.658.378.300,00
6	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tempat pelatihan dan perlindungan KI	Terdapat data HAKI hasil Kreanova tetapi belum terdata dengan baik

B. Kebijakan Kelembagaan dan Daya Dukung Pemajuan IPTEK Daerah

Perkembangan ekosistem penelitian dan inovasi di suatu wilayah tergantung pada kemampuan lembaga dan dukungan yang tersedia. Kelembagaan dan dukungan ini meliputi sistem serta mekanisme interaksi antara organisasi dan lingkungan yang diatur oleh peraturan yang mengikat. Sasaran utamanya adalah menghasilkan efektivitas serta efisiensi dalam aktivitas riset dan inovasi di wilayah tersebut. Kapasitas institusi serta dukungan untuk riset dan inovasi di suatu daerah ditentukan oleh dua faktor, yaitu peningkatan kolaborasi riset dan inovasi serta penyediaan fasilitas pendukung untuk riset dan inovasi.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mulai merumuskan kebijakan kelembagaan yang fokus pada penguatan sistem penelitian, pengembangan, serta inovasi lokal. Dengan peran

Bappeda Litbang, fungsi penelitian dan pengembangan daerah diarahkan agar menjadi penggerak koordinasi antar sektor dalam pengembangan IPTEK. Kebijakan ini menjadikan riset dan inovasi sebagai elemen penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pemerintah berusaha membangun kelembagaan yang dapat menyambungkan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat serta sektor ekonomi lokal, sehingga setiap inovasi dapat memberikan nilai tambah yang nyata untuk pembangunan.

Dalam bidang tata kelola kelembagaan, masih ada kendala mengenai sinkronisasi peran di antara lembaga dalam pengembangan IPTEK. Beberapa perangkat daerah masih kekurangan unit atau pejabat fungsional peneliti dan perekayasa yang khusus mengelola inovasi. Akibatnya, pelaksanaan dan koordinasi program penelitian sering kali berlangsung secara parsial dan belum terhubung. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah berencana meningkatkan kapasitas institusi dengan membangun Forum Inovasi Daerah, sebagai sarana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat (quadruple helix)

Tabel 18. Analisis Kesenjangan Kelembagaan dan Daya Dukung Pemajuan IPTEK Daerah

No.	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi IPTEK di daerah dengan pemangku kepentingan	a. Kolaborasi penelitian antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi lokal b. Riset kolaboratif antar pemerintah	a. Kerjasama riset dilakukan dengan perguruan tinggi di wilayah dan sekitar Kabupaten Banyumas. b. Kerjasama dengan Brin dalam berbagai

		daerah dengan BRIN	aspek penelitian dan konsultasi Riset dan berbagai kajian sudah dilakukan, tetapi skema Kerjasama berkelanjutan belum di lakukan
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi IPTEK di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ruang baca, perpustakaan, pusat studi, jaringan internet, dan Plot Demonstration (Demplot) untuk uji coba pertanian dan peternakan adalah sarana yang tersedia untuk mendukung penelitian dan inovasi IPTEK di daerah.	Perpustakaan, laboratorium untuk penelitian pertanian dan peternakan, perikanan, dan RTH desa ada di Kabupaten Banyumas. Namun, belum memiliki technopark atau lokasi riset khusus.

C. Kebijakan Kemitraan Pemajuan IPTEK Daerah

Sistem penelitian dan inovasi di daerah sangat bergantung pada kolaborasi yang solid dan harmonis antara beragam lembaga pemerintah lokal. BAPPEDA Litbang, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penelitian dan inovasi di daerah tersebut, harus menjalin kerjasama dengan perangkat daerah lain yang melaksanakan kebijakan publik serta memanfaatkan hasil penelitian dan inovasi. Dalam konteks ini, terdapat tiga komponen utama dalam menciptakan kolaborasi yang kuat dan seimbang di bidang riset dan inovasi daerah, yaitu kerjasama antar

lembaga, distribusi inovasi, dan penerapan serta publikasi hasil riset dan inovasi. Pemerintah

Kabupaten Banyumas menyadari bahwa pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan kerja sama menjadi pilar krusial dalam memperkuat ekosistem penelitian dan inovasi. Dengan pendekatan kolaboratif berdasarkan quadruple helix, pemerintah daerah berusaha menciptakan sinergi antara elemen pemerintahan, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan teknologi di berbagai bidang. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, di mana hasil penelitian dapat digunakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan pengatur.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan IPTEK di Banyumas mulai dilakukan melalui berbagai kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan tinggi, khususnya Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Perguruan tinggi di lingkungan Kabupaten Banyumas. Kerja sama ini meliputi aktivitas penelitian kolaboratif, program pengabdian masyarakat yang inovatif, serta pengembangan teknologi yang sesuai untuk sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga penelitian dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi yang mendukung ekonomi lokal serta digitalisasi layanan publik.

Dari perspektif dunia usaha, pemerintah mendukung pembentukan kemitraan penelitian terapan dan inkubasi bisnis inovatif melalui kolaborasi antara Bappeda Litbang dan pelaku UMKM, koperasi, serta industri kecil menengah. Program ini ditujukan untuk memperkuat hilirisasi hasil penelitian agar tidak

terhenti pada tahap konsep, tetapi bisa diolah menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Kemitraan ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan startup lokal serta penerapan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 19. Analisis Kesenjangan Kemitraan Pemajuan IPTEK Daerah

No.	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
1	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	fasilitasi kerjasama antara stakeholder, OPD terkait, dan lembaga profesional dalam hal penelitian dan inovasi IPTEK	Belum ada fasilitasi Kerjasama antar stekholder, OPD terkait, dan Lembaga professional dalam pengembangan penelitian dan inovasi IPTEK Daerah
2	Peningkatan difusi inovasi	Pembelajaran inovasi dan transfer teknologi yang melibatkan masyarakat, pelaku bisnis, dan pemda	a. Terdapat pelatihan yang melibatkan masyarakat, pemda, dan stakeholder lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan sampah rumah tangga, digital marketing b. Adanya peningkatan PUD, Gula kelapa, Durian, Kopi tapi belum optimal c. Adanya pelatihan di balai pelatihan kerja untuk mencetak calon pekerja profesional
3	Peningkatan praktik dan desminasi hasil riset dan	a. Penyebaran hasil	a. Riset dan Inovasi

No.	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
	inovasi IPTEK kepada pelaku inovasi	penelitian dan inovasi IPTEK kepada masyarakat umum b. Implementasi praktik dan pelatihan pelaku usaha berdasarkan temuan penelitian dan inovasi	Kabupaten Banyumas berisi lomba kreatifitas dan inovasi (KRENOVA), pekan inovasi, pameran, dan penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Banyumas. b. Terdapat penelitian penelitian tentang stunting yang dilaksanakan hingga terdapat pendampingan bagi masyarakat, seperti kehadiran bidan pendamping, pos desa, dan lain-lain

D. Kebijakan Budaya Pemajuan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah

Kelanjutan penelitian dan inovasi lokal dipengaruhi oleh ekosistem serta budaya riset dan inovasi yang ada di wilayah tersebut. Seperti budaya umumnya, budaya riset dan inovasi di suatu kawasan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai dalam ekosistem riset dan inovasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, indikator dalam penciptaan budaya ini mencakup promosi dan kampanye penelitian serta inovasi, penghargaan atas capaian

penelitian dan inovasi, pengembangan UKM/IKM rintisan berbasis penelitian, serta upaya penginventarisasian, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan teknologi di masyarakat

Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen dan meyakini bahwa keberhasilan dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan sumber daya dan infrastruktur, tetapi juga oleh budaya penelitian dan inovasi yang berkembang di masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan daerah difokuskan untuk memupuk budaya berpikir ilmiah, kreatif, dan inovatif di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah berusaha membangun ekosistem yang mendukung kemunculan ide-ide baru serta memberikan ruang untuk eksperimen, pembelajaran, dan penerapan hasil penelitian secara transparan.

Salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah memperkuat budaya inovasi dalam pemerintahan daerah. Melalui program inovasi pelayanan publik, perlombaan inovasi daerah, dan sistem penghargaan bagi perangkat daerah yang berhasil menciptakan inovasi, Banyumas berupaya mendorong aparatur sipil negara agar lebih responsif terhadap perubahan dan fokus pada penyelesaian masalah. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah paradigma birokrasi yang kaku menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi pada pengetahuan.

Kebijakan budaya inovasi juga diperluas ke sektor masyarakat dengan mengembangkan komunitas yang kreatif dan inovatif pada tingkat lokal. Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada komunitas teknologi, pengusaha muda, (wirausahawan muda sesuai program tiras Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030) dan kelompok sosial yang memiliki gagasan inovatif untuk mengatasi masalah di daerah. Melalui kompetisi inovasi daerah, festival IPTEK, dan pengembangan ide masyarakat, Banyumas berusaha

meningkatkan rasa bangga lokal terhadap kreativitas dan hasil inovasi putra daerah. Langkah ini juga sejalan dengan usaha menjadikan Kabupten Banyumas sebagai kabupaten yang inklusif dan partisipatif dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Banyumas bertekad untuk memperkuat kebijakan internalisasi budaya riset dan inovasi di semua sektor pembangunan. Usaha ini dilakukan dengan meningkatkan literasi IPTEK, pembelajaran antar sektor, dan memberikan insentif untuk inovator lokal. Melalui pengembangan budaya penelitian dan inovasi yang berkelanjutan, Kabupten Banyumas diharapkan dapat membentuk masyarakat yang responsif terhadap perubahan, berfokus pada pengetahuan, dan siap bersaing dalam era digital serta ekonomi yang didorong inovasi

Tabel 20. Analisis Kesenjangan Budaya Pemajuan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
1	Promosi dan kampanye riset dan inovasi daerah	Promosi penelitian di komunitas, sekolah, atau perguruan tinggi	Upaya Promosi dan Branding Riset dilakukan dengan KRENOVA dan duta inovasi yang dilakukan melalui media sosial, dan Riset Unggulan Daerah melalui Website yang dikelola dengan baik.
2	Apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	a. Lomba Kreativitas IPTEK b. Kompetisi penelitian IPTEK	a. Ada lomba KRENOVA yang diadakan secara rutin setiap tahun yang diikuti oleh pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Peserta kompetisi setiap tahun mengalami pertumbuhan

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
			b. Di Tahun 2025 di adakan kompetisi Riset unggulan daerah yang diikuti oleh PT di lingkungan lokal maupun Nasional, juga diikuti oleh BRIN
3	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Untuk mengembangkan bisnis pemula, pelatihan teknik produksi, bisnis manajemen, dan inisiasi pemda	Hetero Space Banyumas merupakan coworking space sekaligus creative hub di Purwokerto / Banyumas yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja remote/freelance/pebisnis untuk saling berjejaring dan berkolaborasi. Hetero Space Banyumas mulai berdiri sejak akhir tahun 2022.
4	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan IPTEK masyarakat	a. Data yang dikumpulkan dari penelitian dan inovasi IPTEK di daerah b. Ada program untuk mengembangkan penelitian dan inovasi IPTEK. c. Ada upaya untuk menjaga hasil penelitian dan inovasi IPTEK.	a. Data belum terintegrasi dengan baik, belum ada data terintegrasi untuk data hasil penelitian b. Terdapat rencana Kerjasama pengembangan riset yang melibatkan perguruan tinggi dan BRIN c. Terdapat data HAKI dari hasil riset dan Lomba Kreanova tapi belum optimal

E. Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah

Riset dan inovasi yang berhasil adalah yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat dan pemerintah, menciptakan produk unggulan yang menjadi sasaran, dan menawarkan solusi nyata untuk permasalahan lokal. Koordinasi antara penelitian dan inovasi pada tingkat daerah merupakan aspek yang krusial untuk dievaluasi. Koordinasi ini menunjukkan sejauh

mana kegiatan riset dan inovasi di wilayah tersebut telah sesuai dengan konteks setempat. Penggunaan sumber daya seperti infrastruktur dan fasilitas pendukung akan lebih efisien jika disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, dan keunggulan wilayah. Ekosistem penelitian dan inovasi tidak hanya berkaitan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, tetapi juga mengenai memberikan keuntungan optimal bagi wilayah melalui pengembangan solusi untuk berbagai tantangan setempat.

Kolaborasi antara riset dan inovasi menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam merealisasikan pembangunan daerah yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pemerintah memahami bahwa riset dan inovasi harus diintegrasikan, bukan dilaksanakan secara terpisah, agar hasil penelitian dapat diterapkan dengan efektif dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang terdapat dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) 2025–2029, Banyumas berusaha membangun sistem yang mengaitkan lembaga riset, sektor bisnis, masyarakat, serta pemerintah dalam satu kerangka kolaborasi yang terintegrasi.

Integrasi penelitian dan inovasi juga terwujud lewat pengembangan mekanisme pemanfaatan hasil penelitian. Pemerintah daerah berusaha menghubungkan hasil riset dari universitas dan lembaga litbang agar bisa diterapkan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Kegiatan seperti kemitraan penelitian terapan, pengembangan teknologi yang sesuai, dan inkubasi bisnis inovatif berfungsi sebagai jembatan antara hasil penelitian dan implementasinya di lapangan. Melalui mekanisme ini, Kabupten Banyumas berharap dapat meningkatkan nilai ekonomi dari hasil penelitian serta menciptakan produk inovatif yang berakar pada potensi lokal.

Selain itu, integrasi riset dan inovasi di Kabupten Banyumas juga didukung oleh peningkatan sistem informasi riset dan inovasi lokal. Pemerintah mulai menyusun basis data riset yang berisi informasi tentang penelitian, inovator, dan bidang prioritas yang sedang dikembangkan. Sistem ini berfungsi sebagai tempat dokumentasi sekaligus sebagai alat untuk koordinasi dan evaluasi di antara lembaga riset dan perangkat daerah. Dengan data yang terintegrasi, kolaborasi antar pihak yang terlibat dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah sesuai kebutuhan pengembangan daerah.

Tabel 21. Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
1	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi IPTEK	Pengembangan riset dan inovasi IPTEK dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masalah lokal	Sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Banyumas, penelitian ini dilakukan.
2	Pengembangan klaster inovasi IPTEK berbasis produk unggulan daerah	a. Terdapat peta produk unggulan, potensi, dan investasi b. Produk unggulan daerah menjadi subjek penelitian dan inovasi	a. Produk unggulan Kabupaten Banyumas, seperti gula kelapa, durian, dan kopi, hanya diproduksi oleh UMKM yang belum berkembang dengan baik. b. Belum ada peta produk unggulan Kabupaten Banyumas.

3	Keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah	Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dengan cara yang sama.	Belum ada peraturan daerah untuk riset, tetapi rapat pemerintah provinsi menyelaraskan implementasi kebijakan.
---	---	--	--

F. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Ekosistem penelitian dan inovasi di daerah harus memperhatikan masalah internasional yang dapat berdampak pada kondisi lokal. Keterhubungan dengan komunitas global tidak hanya untuk mempersiapkan kemungkinan krisis, tetapi juga untuk mengadaptasi metode penelitian dan inovasi terbaru, termasuk kemajuan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Saat melakukan penelitian dan inovasi, penting untuk terhubung dengan tren global guna memberikan pandangan yang beragam. Berikut adalah hasil evaluasi kesenjangan kebijakan serta infrastruktur IPTEK di daerah

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tidak bisa dipisahkan dari dinamika serta perkembangan global yang sangat pesat. Dengan demikian, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah terhadap tren global merupakan langkah strategis untuk mempertahankan daya saing dan relevansi arah pembangunan. Pemerintah daerah berusaha menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, digitalisasi, dan inovasi ramah lingkungan yang sejalan dengan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan revolusi industri 5.0, di mana keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi fokus utama.

Dalam ranah ekonomi, Kabupaten Banyumas berupaya menyesuaikan pengembangan sektor unggulannya supaya dapat beradaptasi dengan perubahan global. Sektor-sektor seperti pertanian pintar, pariwisata digital, dan ekonomi kreatif yang berorientasi ekspor menjadi perhatian utama dalam pengembangan kawasan. Pemerintah daerah mengajak pelaku usaha dan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti e-commerce, sistem pembayaran online, serta promosi melalui media sosial, sehingga produk-produk lokal Banyumas dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Inisiatif ini pun memperkuat posisi Banyumas dalam rantai pasok global yang berlandaskan inovasi dan pengetahuan

Penyesuaian terhadap kemajuan global juga dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi internasional dan kerjasama antar daerah. Pemerintah Kabupaten Banyumas secara proaktif membangun kerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi internasional untuk memperluas jangkauan pengetahuan dan mempercepat alih teknologi. Program pertukaran penelitian, pelatihan global, serta keterlibatan dalam forum inovasi internasional merupakan bagian dari strategi untuk memperluas pengetahuan aparatur dan masyarakat mengenai praktik terbaik di dunia. Langkah ini mendukung Banyumas dalam mempercepat penerapan teknologi baru dan inovasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Selanjutnya penyesuaian dengan kemajuan global di Kabupaten Banyumas akan terus difokuskan pada peningkatan kemampuan adaptif daerah untuk menghadapi perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia. Pemerintah bertekad untuk menciptakan komunitas yang paham digital, kreatif, dan fokus pada keberlanjutan. Dengan meningkatkan konektivitas global tanpa mengorbankan identitas lokal, Banyumas

memiliki potensi untuk berkembang secara inklusif dan kompetitif di tengah gelombang globalisasi, serta menjadi contoh sukses penerapan IPTEK yang berlandaskan kearifan lokal di tingkat internasional

Tabel 22. Analisis Kesenjangan Penyelarasan dengan Perkembangan Global

No	Indikator	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi saat ini
1	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penyelarasan dan pemanfaatan masalah internasional untuk penelitian dan inovasi di bidang	Kerjasama internasional baru di lakukan oleh Lembaga Riset di Perguruan tinggi di lingkungan Kabupaten Banyumas, padahal Kabupaten Banyumas memiliki potensi dalam pengembangan riset dalam bidang panas bumi, perubahan iklim, hutan rakyat. Selain itu pengembangan gula kelapa, gula semut sebagai PUD Kabuapten Banyumas belum banyak dikaji.
2	Penguatan kerjasama internasional	Kegiatan penelitian dan inovasi di daerah melibatkan kerja sama internasional.	produk gula kristal kelapa sangat diminati di pasar Eropa, Amerika, dan negara lain. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Banyumas, namun tidak ada riset dan Kerjasama internasional untuk membangun produk tersebut.

Selanjutnya Analisis kesenjangan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara kondisi awal ekosistem riset dan inovasi di daerah dengan kondisi akhir yang diharapkan. Kondisi awal dan kondisi akhir mencakup penilaian terhadap produk-produk unggulan yang ada di daerah serta permasalahan utama yang dihadapinya. Melalui analisis kesenjangan, dapat dilihat sejauh mana ekosistem riset dan inovasi saat ini sudah berkembang, apa saja kekuatan dan kelemahannya, serta peluang yang belum dimanfaatkan. Dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir yang diharapkan, dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan upaya perbaikan. Tabel 23 menunjukkan analisis kesenjangan kondisi kajian saat ini dan kondisi akhir Produk Unggulan Daerah dan Tabel 24 menunjukkan analisis kesenjangan kondisi kajian saat ini dan kondisi akhir permasalahan utama daerah.

Tabel 23. Analisis Kesenjangan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Akhir Produk Unggulan Daerah

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Produk Unggulan ke 1: Pengembangan Gula Kelapa			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada kebijakan daerah yang mendukung pengembangan industri gula kelapa	Terbitnya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan industri gula kelapa	Perlu diterbitkan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan industri gula kelapa
Penataan basis data riset dan inovasi	Belum ada sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> industri gula kelapa	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> industri gula kelapa	Perlu dibuat dan dibangun sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> industri gula kelapa
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Infrastruktur bagi pengembangan industri gula kelapa telah ada, namun perlu perbaikan dan peningkatan	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan industri gula kelapa	Perlu dibangun secara bertahap dan berkelanjutan infrastruktur yang representatif bagi pengembangan industri gula kelapa

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Belum ada anggaran pengembangan industri gula kelapa dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Tersedianya anggaran pengembangan industri gula kelapa dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Perlu disusun dan direalisasikan anggaran pengembangan industri gula kelapa dari hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada sertifikasi indikasi geografis gula kelapa khas Banyumas	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis gula kelapa khas Banyumas	Perlu disusun dokumen dan didaftarkan sertifikasi indikasi geografis gula kelapa khas Banyumas
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan industri gula kelapa dengan pihak-pihak terkait masih belum intensif	Terlaksananya kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan industri gula kelapa dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan <i>stakeholder</i> serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)	Perlu dikuatkan kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan industri gula kelapa
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung dalam pengembangan industri gula kelapa yang tepat bagi pelaku usaha gula kelapa Banyumas masih perlu ditingkatkan dalam jumlah dan kualitas	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan industri gula kelapa yang tepat bagi pelaku usaha gula kelapa Banyumas	Perlu peningkatan jumlah dan mutu pada sarana pendukung untuk pengembangan industri gula kelapa bagi pelaku usaha gula kelapa Banyumas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa belum dilaksanakan	Terwujudnya implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa	Perlu dilaksanakan implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa
Peningkatan difusi inovasi	Difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa belum dilaksanakan optimal	Peningkatan jumlah dan mutu difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa	Perlu meningkatkan jumlah dan mutu difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran gula kelapa

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran gula kelapa belum dilaksanakan secara efisien dan konsisten serta berkelanjutan	Pelaksanaan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen gula kelapa dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran gula kelapa	Perlu dilaksanakan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye gula kelapa belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan	Pelaksanaan promosi dan kampanye gula kelapa secara rutin dan berkelanjutan dari aspek budaya, produksi, <i>branding</i> dan pemasaran	Perlu dilakukan promosi dan kampanye gula kelapa secara rutin dan berkelanjutan
Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada kegiatan terkait apresiasi prestasi atas hasil karya terkait pengembangan industri gula kelapa pada pelaku usaha	Pelaksanaan apresiasi prestasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan industri gula kelapa pada pelaku usaha	Perlu dilaksanakan lomba inovasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan industri gula kelapa pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum ada perusahaan pemula gula kelapa sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, <i>branding</i> dan pemasaran	Pengembangan perusahaan pemula gula kelapa sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, <i>branding</i> dan pemasaran	Perlu dibentuk, dibina dan dikembangkan perusahaan pemula berbasis riset gula kelapa
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum ada <i>database</i> dan sistem informasi terkait gula kelapa dari aspek hulu hingga hilir	Pengembangan <i>database</i> dan sistem informasi terkait gula kelapa dari aspek hulu hingga hilir	Perlu dikembangkan <i>database</i> dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal tentang gula kelapa dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Belum diterapkan Ipteks berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir	Penerapan Ipteks berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir	Perlu diterapkan teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha gula kelapa dari hulu ke hilir

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
dan/atau mengatasi permasalahan daerah			
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum dibentuk klaster industri gula kelapa	Pembentukan klaster gula kelapa dari hulu ke hilir secara bertahap dan berkelanjutan	Perlu dibentuk klaster industri gula kelapa secara bertahap dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum diterapkan kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan industri gula kelapa	Pelaksanaan implementasi kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat	Perlu diterapkan kebijakan yang saling berkesesuaian melalui sinergi dan kolaborasi antar lembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan industri gula kelapa
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Belum diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi gula kelapa berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK	Penerapan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi gula kelapa berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK	Perlu dikembangkan dan diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi gula kelapa berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerjasama internasional	Sudah ada inisiasi dan kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> dan pemasaran gula kelapa, namun perlu ditingkatkan	Pelaksanaan inisiasi dan kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> dan pemasaran gula kelapa	Perlu dikuatkan kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> dan pemasaran gula kelapa
Produk Unggulan ke 2: Pengembangan Durian			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada kebijakan daerah yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan durian	Terbitnya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan durian	Perlu diterbitkan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan durian
Penataan basis data riset dan inovasi	Belum ada sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> budidaya dan pengolahan durian	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> budidaya dan pengolahan durian	Perlu dibuat dan dibangun sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> budidaya dan pengolahan durian
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Infrastruktur bagi pengembangan budidaya dan pengolahan durian	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi	Perlu dibangun secara bertahap dan berkelanjutan infrastruktur yang representatif bagi

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	telah ada, namun perlu perbaikan dan peningkatan	pengembangan budidaya dan pengolahan durian	pengembangan budidaya dan pengolahan durian
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Belum ada anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan durian dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Tersedianya anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan durian dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Perlu disusun dan direalisasikan anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan durian dari hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada sertifikasi indikasi geografis durian khas Banyumas	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis durian khas Banyumas	Perlu disusun dokumen dan didaftarkan sertifikasi indikasi geografis durian khas Banyumas
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Ada kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian dengan dengan pihak-pihak terkait, namun masih belum intensif	Terlaksananya kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan <i>stakeholder</i> serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)	Perlu dikuatkan kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian yang tepat bagi pelaku usaha durian Banyumas sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan dalam jumlah dan kualitas	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan durian yang tepat bagi pelaku usaha durian Banyumas	Perlu peningkatan jumlah dan mutu pada sarana pendukung untuk pengembangan budidaya dan pengolahan durian bagi pelaku usaha durian Banyumas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran durian belum dilaksanakan	Terwujudnya implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran durian	Perlu dilaksanakan implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran durian
Peningkatan difusi inovasi	Difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi	Peningkatan jumlah dan mutu difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait	Perlu meningkatkan jumlah dan mutu difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	dan pemasaran durian belum dilaksanakan optimal	pengembangan produksi dan pemasaran durian	pengembangan produksi dan pemasaran durian
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran durian belum dilaksanakan secara efisien dan konsisten serta berkelanjutan	Pelaksanaan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen durian dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran durian	Perlu dilaksanakan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan terkait budidaya dan pengolahan durian
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye durian belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan	Pelaksanaan promosi dan kampanye durian secara rutin dan berkelanjutan dari aspek budaya, produksi, <i>branding</i> dan pemasaran	Perlu dilakukan promosi dan kampanye durian secara rutin dan berkelanjutan
Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada kegiatan terkait apresiasi prestasi atas hasil karya terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian pada pelaku usaha	Pelaksanaan apresiasi prestasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian pada pelaku usaha	Perlu dilaksanakan lomba inovasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum ada perusahaan pemula durian sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, <i>branding</i> dan pemasaran	Pengembangan perusahaan pemula durian sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, <i>branding</i> dan pemasaran	Perlu dibentuk, dibina dan dikembangkan perusahaan pemula berbasis riset durian
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum ada <i>database</i> dan sistem informasi terkait durian dari aspek hulu hingga hilir	Pengembangan <i>database</i> dan sistem informasi terkait durian dari aspek hulu hingga hilir	Perlu dikembangkan <i>database</i> dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal tentang durian dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Belum diterapkan Ipteks berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha durian dari hulu ke hilir	Penerapan Ipteks berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha durian dari hulu ke hilir	Perlu diterapkan teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha durian dari hulu ke hilir

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
dan/atau mengatasi permasalahan daerah			
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum dibentuk klaster budidaya dan pengolahan durian	Pembentukan klaster durian dari hulu ke hilir secara bertahap dan berkelanjutan	Perlu dibentuk klaster industri durian secara bertahap dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum diterapkan kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian	Pelaksanaan implementasi kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat	Perlu diterapkan kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan budidaya dan pengolahan durian
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Belum diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi durian berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK	Penerapan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi durian berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK	Perlu dikembangkan dan diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi durian berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerjasama internasional	Belum ada inisiasi dan kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> durian lokal Banyumas	Pelaksanaan inisiasi dan kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> dan pemasaran durian	Perlu diinisiasi kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> durian khas Banyumas
Produk Unggulan ke 3: Pengembangan Kopi			
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada kebijakan daerah yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan kopi	Terbitnya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan kopi	Perlu diterbitkan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan budidaya dan pengolahan kopi
Penataan basis data riset dan inovasi	Belum ada sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> budidaya dan pengolahan kopi	Tersedianya sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> budidaya dan pengolahan kopi	Perlu dibuat dan dibangun sistem informasi berbasis digital tentang <i>database</i> budidaya dan pengolahan kopi
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Infrastruktur bagi pengembangan budidaya dan pengolahan kopi telah ada, namun perlu perbaikan dan peningkatan	Tersedianya infrastruktur yang representatif bagi pengembangan budidaya dan pengolahan kopi	Perlu dibangun secara bertahap dan berkelanjutan infrastruktur yang representatif bagi pengembangan budidaya dan pengolahan kopi

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Belum ada anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Tersedianya anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dari hulu ke hilir periode 2025-2029	Perlu disusun dan direalisasikan anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dari hulu ke hilir periode 2025-2029
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada sertifikasi indikasi geografis kopi khas Banyumas	Terbitnya sertifikasi indikasi geografis kopi khas Banyumas	Perlu disusun dokumen dan didaftarkan sertifikasi indikasi geografis kopi khas Banyumas
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Ada kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dengan pihak-pihak terkait, namun masih belum intensif	Terlaksananya kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dengan pemerintah daerah lain, akademisi (perguruan tinggi dan SMK), pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian terkait, pusat-pusat riset (BRIN), dunia usaha dan dunia industri, BUMN, swasta, dan <i>stakeholder</i> serta pemangku kepentingan lainnya (BPOM, eksportir, investor)	Perlu dikuatkan kolaborasi, kerjasama dan sinergi dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi yang tepat bagi pelaku usaha kopi Banyumas sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan dalam jumlah dan kualitas	Tersedianya sarana pendukung dalam pengembangan budidaya dan pengolahan kopi yang tepat bagi pelaku usaha kopi Banyumas	Perlu peningkatan jumlah dan mutu pada sarana pendukung untuk pengembangan budidaya dan pengolahan kopi bagi pelaku usaha kopi Banyumas
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi belum dilaksanakan	Terwujudnya implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi	Perlu dilaksanakan implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengembangan produksi dan pemasaran kopi
Peningkatan difusi inovasi	Difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran kopi belum dilaksanakan optimal	Peningkatan jumlah dan mutu difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran kopi	Perlu meningkatkan jumlah dan mutu difusi Ipteks dan keterampilan teknis terkait pengembangan produksi dan pemasaran kopi

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran kopi belum dilaksanakan secara efisien dan konsisten serta berkelanjutan	Pelaksanaan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM riset dan inovasi, produsen kopi dan pihak-pihak lain terkait pengembangan produksi, pengelolaan usaha dan pemasaran kopi	Perlu dilaksanakan diseminasi dalam bentuk alih teknologi, bimtek, dan pendampingan secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan terkait budidaya dan pengolahan kopi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye kopi belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan	Pelaksanaan promosi dan kampanye kopi secara rutin dan berkelanjutan dari aspek budaya, produksi, <i>branding</i> dan pemasaran	Perlu dilakukan promosi dan kampanye kopi secara rutin dan berkelanjutan
Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada kegiatan terkait apresiasi prestasi atas hasil karya terkait pengembangan budidaya dan pengolahan kopi pada pelaku usaha	Pelaksanaan apresiasi prestasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan budidaya dan pengolahan kopi pada pelaku usaha	Perlu dilaksanakan lomba inovasi secara rutin dan berkelanjutan terkait pengembangan budidaya dan pengolahan kopi pada pelaku usaha
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum ada perusahaan pemula kopi sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, <i>branding</i> dan pemasaran	Pengembangan perusahaan pemula kopi sub usaha budidaya, pascapanen dan pengolahan, <i>branding</i> dan pemasaran	Perlu dibentuk, dibina dan dikembangkan perusahaan pemula berbasis riset kopi
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum ada <i>database</i> dan sistem informasi terkait kopi dari aspek hulu hingga hilir	Pengembangan <i>database</i> dan sistem informasi terkait kopi dari aspek hulu hingga hilir	Perlu dikembangkan <i>database</i> dan sistem informasi terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal tentang kopi dari aspek hulu hingga hilir
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Belum diterapkan Ipteks berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir	Penerapan Ipteks berbasis teknologi tepat guna dan kearifan lokal pada pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir	Perlu diterapkan teknologi terbaru dan kearifan lokal pada pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum dibentuk klaster budidaya dan pengolahan kopi	Pembentukan klaster kopi dari hulu ke hilir secara bertahap dan berkelanjutan	Perlu dibentuk klaster industri kopi secara bertahap dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum diterapkan kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan budidaya dan pengolahan kopi	Pelaksanaan implementasi kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat	Perlu diterapkan kebijakan yang saling melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesesuaian antar lembaga di daerah dan pusat terkait pengembangan budidaya dan pengolahan kopi
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Belum diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi kopi berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK	Penerapan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi kopi berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK	Perlu dikembangkan dan diterapkan proses produksi tanpa limbah dan proses produksi kopi berbasis <i>green technology</i> serta proses dengan minimal ERK
Penguatan kerjasama internasional	Belum ada inisiasi dan kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> kopi lokal Banyumas	Pelaksanaan inisiasi dan kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> kopi khas Banyumas	Perlu diinisiasi kerjasama internasional khususnya dalam <i>branding</i> kopi khas Banyumas

Tabel 24. Analisis Kesenjangan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Akhir Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Prioritas 1. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Regulasi pengembangan ekonomi kreatif, destinasi dan event berbasis riset	Belum ada roadmap riset spesifik sektor, dan kebijakan masih umum sektor pariwisata	Tersusunnya roadmap riset spesifik sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, serta kebijakan kreatif dan pariwisata yang	Perlu disusunnya riset spesifik sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, serta kebijakan kreatif dan pariwisata yang

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		sudah berbasis riset	sudah berbasis riset
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
SDM inovasi desa wisata dan ekraf, inkubasi kreatif	SDM kreatif tumbuh, tetapi belum sistematis berbasis riset	SDM kreatif tumbuh dan sistematis berbasis riset	Terciptanya sistem riset yang melembaga untuk mendukung SDM kreatif
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Kolaborasi pentahelix (kampus, komunitas, industri, pemda, dan media)	Kolaborasi ada, belum terstruktur dan berkelanjutan	Kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan	Terwujudnya kelembagaan dan mekanisme kemitraan riset yang berkelanjutan
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Kompetisi inovasi kreatif, dan kurasi produk lokal berbasis riset	Event ada, pendaftaran KI dan riset produk masih rendah	Event Krenova disertai dengan peningkatan pendaftaran KI dan riset produk	Pelrunya peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam riset produk dan pendaftaran KI
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Sinkronisasi riset dengan desa wisata dan ekraf	Banyak riset kampus belum link dengan kebutuhan desa/UMKM	Terkoneksinya riset kampus dengan kebutuhan desa/UMKM	Terwujudnya integrasi antara hasil riset dan kebutuhan praktis lapangan
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Standar global pariwisata, digital tourism, Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis	Sudah promosi, standar global dan Kekayaan Intelektual belum masif	Peningkatan standar global dan Kekayaan Intelektual secara masif disertai penguatan promosi	Perlunya peningkatan adopsi standar global dan perlindungan KI
Prioritas 2: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Kebijakan riset infrastruktur hijau, lab	Infrastruktur laboratorium dan data	Terintegrasinya infrastruktur laboratorium	Terwujudnya keterpaduan antar sistem

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
lingkungan, dan data geospasial	lingkungan belum terintegrasi optimal	dan data lingkungan	laboratorium dan data lingkungan
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Tenaga teknis riset lingkungan dan infrastruktur	Tenaga teknis riset minim dan belum terlembaga di OPD	Tenaga teknis riset meningkat dan terlembaga di OPD	Terwujudnya peningkatan tenaga teknis riset dan terlembaga di OPD
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Kemitraan riset lingkungan antara universitas, NGO, dan komunitas	Kemitraan insidental dan belum jadi agenda riset bersama	Kemitraan strategis dan terbentuknya agenda riset bersama	Terwujudnya agenda riset bersama lintas institusi
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Budaya inovasi <i>green-tech</i> di masyarakat dan komunitas	Gerakan lingkungan tumbuh tetapi belum berbasis riset terapan	Gerakan lingkungan tumbuh berbasis riset terapan	Perlunya peningkatan riset terapan untuk mendukung gerakan lingkungan
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Integrasi riset lingkungan ke perencanaan pembangunan	Sebagian riset belum menjadi dasar kebijakan teknis	Pemanfaatan hasil riset menjadi dasar kebijakan teknis	Perlunya peningkatan utilisasi hasil riset dalam kebijakan pembangunan
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Standar <i>green infrastructure</i> , dan <i>carbon management</i>	Wacana <i>green infrastructure</i> mulai masuk, tetapi implementasi terbatas	Implementasi <i>green infrastructure</i> pada setiap aspek kehidupan	Perlunya implementasi kebijakan ramah lingkungan
Prioritas 3: Ketahanan Pangan			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Roadmap riset pangan daerah dan infrastruktur riset pertanian	Riset sporadis, pusat data pangan dan demplot belum	Riset dilakukan secara keberlanjutan, serta pusat	Perlunya peningkatan kelembagaan riset pangan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	terlembaga kuat	data pangan dan demplot terlembaga kuat	dan pusat data daerah
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Penyuluh/peneliti pangan, dan pusat inovasi pertanian	Penyuluh ada, namun riset terapan dan diseminasi masih terbatas	Penyuluh meningkat peran dan kinerjanya, serta riset terapan dan diseminasi semakin meningkat	Perlunya peningkatan peran penyuluh dalam riset terapan
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Kerja sama dengan BRIN, perguruan tinggi, dan offtaker pangan	Pilot riset ada, belum berlanjut ke rantai pasok sistematis	Pilot riset dan berlanjut ke rantai pasok sistematis	Perlunya peningkatan kesinambungan riset ke hilir rantai pasok
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Inovasi di kelompok tani dan pangan lokal	Inovasi tumbuh di kelompok tani, tetapi belum terdokumentasi riset	Inovasi tumbuh di kelompok tani disertai dokumentasi riset dan inovasi	Terwujudnya dokumentasi dan publikasi hasil riset dan inovasi
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Keterpaduan riset dengan kebijakan pangan dan offtaker	Hilirisasi lemah, tetapi belum menjadi rantai ekosistem pangan	Hilirisasi yang kuat dan menjadi rantai ekosistem pangan	Perlunya penguatan sistem hilirisasi inovasi pangan
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
Standar pangan global, <i>traceability</i> , dan sertifikasi ekspor	Beberapa produk ekspor, tetapi standar global belum merata	Meningkatnya produk ekspor disertai pemerataan standar global	Perlu terwujudnya standar mutu global yang terintegrasi
Prioritas 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE berjalan, namun data riset sektoral belum	SPBE dapat dioptimalkan daya gunanya disertai	Perlunya peningkatan integrasi data

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
(SPBE) berbasis data riset, infrastruktur big data	terintegrasi penuh	integrasi data riset sektoral	riset antar sektor
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perencanaan berbasis bukti	Kapasitas meningkat namun tidak merata antar OPD	Kapasitas meningkat disertai pemerataan antar OPD	Perlunya pemerataan kapasitas antar perangkat daerah
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Kemitraan inovasi pelayanan publik dan digital government	Mulai berjalan, tetapi ekosistem inovasi digital belum matang	Dapat optimal berjalan disertai penguatan ekosistem inovasi digital	Perlunya peningkatan ekosistem inovasi digital pemerintah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Budaya inovasi birokrasi & kompetisi inovasi OPD	Partisipasi naik, namun kualitas inovasi masih perlu peningkatan)	Partisipasi naik disertai peningkatan kualitas inovasi	Perlunya optimalisasi kualitas hasil inovasi
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
Perencanaan berbasis <i>evidence</i> dan riset lintas OPD	Sudah mulai berjalan, integrasi lintas OPD masih sektoral	disertai integrasi lintas OPD	Perlunya mewujudkan sistem koordinasi lintas OPD berbasis riset
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
GovTech, open data, dan interoperabilitas	SPBE berkembang, tetapi interoperabilitas data belum optimal	SPBE meningkat disertai optimalisasi interoperabilitas data	Perlunya penguatan integrasi dan interoperabilitas antar sistem digital pemerintah

BAB V. STRATEGI KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Sebagai upaya Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas, strategi kebijakan riset dan inovasi yang tepat diperlukan. Strategi kebijakan dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas meliputi tiga hal utama yaitu strategi pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, strategi penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, dan kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah.

A. Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM melalui Produk Unggulan Daerah (PUD)

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM melalui Produk Unggulan Daerah (PUD) menjadi salah satu strategi penting bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk unggulan daerah serta mendorong transformasi ekonomi menuju nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi-strategi daerah dan penentuan arah kebijakan daerah yang mendukung Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas melalui produk unggulan daerah perlu dilakukan.

Menurut Keputusan Bupati Nomor 185 tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Banyumas, Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Banyumas terdiri dari gula kelapa, durian, kopi, kambing perah, minyak atsiri, dan kayu olahan. Untuk mengakselerasi program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, tiga PUD yaitu gula kelapa, durian,

kopi diprioritaskan untuk diintervensi kebijakan dari enam PUD yang ada. Ringkasan kondisi terkini dari tiga PUD terpilih yang akan dikembangkan di periode Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Gula kelapa

Sentra kelapa tersebar di Cilongok, Pekuncen, Kemranjen, Somagede dan beberapa tempat lainnya. Gula kelapa tersedia dalam bentuk cetak dan kristal dan saat ini telah dikembangkan gula kelapa dalam bentuk cair. Pasar gula kelapa cetak yaitu lokal dan nasional sedangkan pasar gula kelapa kristal adalah ekspor. Banyumas menyumbang devisa terbesar untuk ekspor gula kelapa secara nasional. Perlu upaya untuk menjadikan gula kelapa yang memiliki cita rasa khas ini sebagai komoditas indikasi geografis Banyumas.

2. Durian

Sentra durian Banyumas ada di Kemranjen, Banyumas, dan Cilongok dengan varian yang dikembangkan berupa varian durian lokal dan non lokal. Saat ini durian diperjualbelikan dalam bentuk durian segar dan kuliner durian (es durian dengan berbagai varian bentuk). Hilirisasi dari produk durian baru satu produk diversifikasi berupa dodol durian oleh satu pelaku usaha. Produk diversifikasi durian ini sudah memiliki sertifikasi dan pasar skala nasional. Dodol durian dipasarkan sampai Bali dengan pengiriman rutin. Produk ini saat ini sedang berproses menuju kelayakan produk ekspor.

3. Kopi

Sentra kopi Banyumasa berada di Baturaden dan Gumelar dengan varian yang dikembangkan berupa Robusta dan Arabica. Hingga saat ini sebagian kopi dijual dalam bentuk *green bean*. Belum ada pelaku usaha Banyumas yang memproduksi *roasted bean* atau kopi bubuk menggunakan peralatan yang modern untuk

menghasilkan kopi dengan kualitas seduhan yang baik. Sebagian besar pengolahan kopi sangrai dan kopi bubuk masih dilaksanakan secara tradisional. Keterbatasan jumlah produksi kopi menyebabkan jangkauan pasar penjualan Kopi Banyumas juga terbatas. Peluang yang dimiliki produk kopi adalah maraknya kedai kopi di Banyumas sebagai ekosistem yang mendukung pengembangan dan inovasi kopi dari hulu ke hilir.

Berdasarkan PUD yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membuat Strategi Daerah dan Arah Kebijakan PUD yang akan dilaksanakan seperti disajikan dalam Tabel 25.

Tabel 25. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM melalui Produk Unggulan Daerah (PUD)

No.	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1	Penyusunan kebijakan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM melalui Produk Unggulan Daerah (PUD) Gula Kelapa, Durian, dan Kopi	1. Menyusun kebijakan-kebijakan terkait pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM melalui PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi 2. Melakukan sinkronisasi kebijakan yang telah ditetapkan dengan kebijakan pemerintah pusat
2	Merintis, mengembangkan, dan menguatkan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi pemerintah daerah dengan akademisi (perguruan tinggi, sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan), dunia usaha dan dunia industri, pusat-pusat riset daerah dan nasional, pemerintah pusat, BUMN, pihak swasta, kelompok masyarakat, pelaku usaha; serta kerjasama yang bersifat regional dan internasional dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM melalui Produk Unggulan Daerah (PUD) Gula Kelapa, Durian, dan Kopi	Kerjasama, sinergi, dan kolaborasi dalam a. Pengembangan pusat-pusat inovasi bagi UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi b. Pengembangan kluster-kluster inovasi bagi UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi c. Pengembangan riset dan inovasi bagi UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi baik riset dasar, riset terapan, maupun riset pengembangan d. Penerapan riset dan inovasi yang telah dikembangkan bersama dari PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi kepada UM-IKM dan masyarakat di sentra komoditas/ produk dan pelaku usaha terkait e. Diseminasi dan transfer Ipteks terkait PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi bagi pengembangan UM-IKM f. Pembinaan dan pendampingan penerapan teknologi hasil riset dan inovasi PUD Gula

No.	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		Kelapa, Durian, dan Kopi yang telah dikembangkan melalui pelatihan dan bimtek kepada UM-IKM dan masyarakat g. Hilirisasi riset dan inovasi yang telah dikembangkan dari PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi kepada UM-IKM dan masyarakat h. Komersialisasi hasil riset dan inovasi kepada masyarakat, pelaku usaha, ataupun dunia usaha dan dunia industri i. Pengembangan perusahaan pemula dan UM-IKM berbasis riset untuk mendukung pengembangan PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi
3	Penyediaan anggaran daerah untuk pelaksanaan, pengembangan, implementasi, hilirisasi, dan komersialisasi riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi	Penyediaan anggaran untuk: a. Pendirian pusat riset b. Pendirian kluster riset c. Perencanaan teknis riset dan inovasi periode 2025-2029 d. Pelaksanaan riset dan inovasi (riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan) e. Diseminasi dan transfer ipteks f. Pelatihan dan bimtek hasil riset dan inovasi g. Hilirisasi hasil riset dan inovasi h. Komersialisasi hasil riset dan inovasi i. Pembangunan infrastruktur riset dan inovasi j. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi k. Penyediaan mesin, peralatan, bahan produksi dan bahan analisis untuk pelaksanaan dan pengembangan riset dan inovasi l. Penyediaan fasilitas lain pendukung riset dan inovasi: sertifikasi dan pengurusan HKI PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi m. Pengembangan kapasitas SDM untuk pelaksanaan, pengembangan, hilirisasi, dan komersialisasi riset dan inovasi n. Pengembangan sistem informasi dan digitalisasi riset dan inovasi: penyusunan database riset dan inovasi, branding dan marketing online, pengembangan teknologi tepat guna berbasis IOT o. Branding dan promosi UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi kepada investor, DUDI, dan pasar lain skala nasional dan internasional

No.	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
	Membangun, mengembangkan dan menguatkan pusat dan kluster riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi	1. Pendirian pusat-pusat riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi 2. Pendirian kluster-kluster riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi 3. Pelaksanaan riset dan inovasi (riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan) 4. Hilirisasi hasil riset dan inovasi dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi
5	Penyediaan infrastruktur, sarana prasarana, mesin dan peralatan, bahan pendukung, dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi	1. Pembangunan infrastruktur riset dan inovasi 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi 3. Penyediaan mesin, peralatan, bahan produksi dan bahan analisis untuk pelaksanaan dan pengembangan riset dan inovasi 4. Penyediaan fasilitas lain pendukung riset dan inovasi: pengurusan dan sertifikasi (organik, ISO, P-ITR, halal, MD, sertifikasi indikasi geografis, sertifikasi HKI hak cipta/paten/merek/desain industri) dari PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi 5. Pengembangan sistem informasi dan digitalisasi riset dan inovasi: penyusunan database riset dan inovasi, branding dan marketing online, pengembangan teknologi tepat guna berbasis IOT 6. Branding dan promosi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi kepada investor, DUDI, dan pasar lain skala nasional dan internasional
6	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, inovator pemda dan pengguna hasil riset dan inovasi atau UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi	1. Pengembangan kapasitas SDM untuk pelaksanaan, pengembangan, hilirisasi, dan komersialisasi riset dan inovasi 2. Diseminasi dan transfer Ipteks terkait PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi kepada UM-IKM 3. Pembinaan dan pendampingan penerapan teknologi hasil riset dan inovasi PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi yang telah dikembangkan melalui pelatihan dan bimtek kepada UM-IKM 4. Pembinaan dan pendampingan pengelolaan implementasi, dan hilirisasi hasil riset dan inovasi PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi (pengelolaan produksi, SDM, keuangan, pemasaran lokal/nasional/ekspor) kepada UM-IKM 5. Pengembangan perusahaan pemula berbasis

No.	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		riset dari PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi 6. Lomba inovasi daerah (Krenova) terkait riset dan inovasi dari PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi yang bermanfaat bagi UM-IKM 7. Apresiasi prestasi inovator dan pelaku usaha serta industri yang mengembangkan PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi dari hulu hingga hilir

Strategi dan arah kebijakan menunjukkan komitmen dan upaya yang komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi. Strategi dan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan riset dan inovasi; pengembangan kerjasama; penyediaan anggaran; pengembangan pusat dan kluster inovasi; penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, mesin dan fasilitas pendukung lain; dan peningkatan kapasitas SDM riset dan inovasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mendukung strategi dan arah kebijakan pengembangan PUD pada Tabel 25 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan Upaya Komprehensif

Langkah-langkah yang disusun dalam Tabel 25 tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi. Dengan menyusun kebijakan yang mendukung inovasi, membangun kerjasama lintas sektor, pengembangan riset dan sarana prasarananya, dan fokus pada pengembangan SDM serta fasilitasi anggaran untuk pengembangan riset dan inovasi, menunjukkan keseriusan

pemerintah dalam memajukan UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi di tahun 2025-2029.

2. Kolaborasi lintas sektor

Melalui upaya untuk mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Pelaku Usaha, pemerintah menciptakan kerangka kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kolaborasi lintas sektor ini dapat memperkuat pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang beragam.

3. Inovasi

Fokus pada pengembangan pusat inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi digital menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya inovasi dalam meningkatkan daya saing UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi. Dengan memperhatikan tren teknologi dan mengoptimalkan pemanfaatan digital, diharapkan UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi dapat terus berkembang dan bersaing di pasar.

4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Daya Saing

Melalui implementasi strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Tabel 25., diharapkan akan terjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memperkuat dan meningkatkan daya saing UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi, Kabupaten Banyumas dapat memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi

melalui langkah-langkah di atas diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja UM-IKM yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

B. Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

Ekosistem riset dan inovasi perlu dikembangkan dalam rangka mengatasi isu strategis dan permasalahan prioritas daerah. Isu strategis di Kabupaten Banyumas telah teridentifikasi sebanyak 7 permasalahan prioritas yang kemudian diklasifikasikan dalam empat bidang yaitu (i) Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, (ii) Tata Kelola Pemerintahan, (iii) Infrastruktur, dan (iv) Ketahanan Pangan. Identifikasi terhadap prioritas tersebut perlu dilakukan demi terwujudnya akselerasi pembangunan daerah. Melalui pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi diharapkan permasalahan prioritas di daerah dapat teratasi secara efektif. Tabel 26 menunjukkan strategi penyelesaian isu strategis dan permasalahan prioritas daerah.

Tabel 26. Strategi Penyelesaian Isu Strategis dan Permasalahan Prioritas Daerah

No.	Bidang Permasalahan	Permasalahan Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Kualitas Produk belum optimal	1) Pembaruan dan Diversifikasi Produk (Inovasi Konten) 2) Akselerasi <i>Branding</i> dan <i>Storytelling</i> 3) Standardisasi dan Sertifikasi Produk	1) Mendorong inovasi produk Ekraf yang terintegrasi dengan destinasi wisata 2) Mengembangkan narasi dan <i>branding</i> identitas Banyumas yang kuat dan menerapkannya secara konsisten dalam semua materi promosi dan pengalaman wisatawan

No.	Bidang Permasalahan	Permasalahan Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
				3) Mendorong sertifikasi dan standardisasi kualitas produk UMKM/IKM Ekraf (misalnya, sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia/SNI) dan sertifikasi kebersihan/kesehatan destinasi pariwisata (<i>Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability/CHSE</i>).
		Kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan Ekraf masih lemah	1) Optimalisasi Peran Komite Ekonomi Kreatif (KEK) 2) Penyusunan Rencana Induk Ekraf Definitif 3) Pemberian Insentif Kelembagaan 4) Optimalisasi regulasi terkait Ekraf	1) Mengaktifkan dan memperjelas status KEK sebagai badan koordinasi utama Ekraf (sesuai model Pentahelix), dengan dukungan <i>organizational support</i> dan pendanaan yang pasti dari Pemerintah Kabupaten Banyumas 2) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (RIPE-Krafda) yang definitif, komprehensif, dan <i>bottom-up</i> (berdasarkan masukan komunitas), yang dijadikan acuan tunggal bagi semua program OPD 3) Memberikan pengakuan resmi dan insentif kepada komunitas kreatif dan inkubator (<i>Creative Hub</i>) yang aktif, menjadikan mereka mitra strategis pemerintah, bukan sekadar pelengkap

No.	Bidang Permasalahan	Permasalahan Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
				4) Memperkuat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Inovasi, <i>branding</i> , dan komersialisasi produk perlu ditingkatkan	1) Peningkatan Inovasi Produk dan Destinasi Wisata 2) Penguatan <i>Branding</i> dan Citra Daerah 3) Peningkatan Komersialisasi dan Perluasan Pasar	1) Menciptakan produk kreatif dan destinasi wisata yang berbeda dan bernilai tambah 2) Membangun citra merek kolektif yang kuat untuk produk-produk Ekraf dan Pariwisata Banyumas 3) Membuka dan memanfaatkan saluran penjualan yang lebih luas dan modern melalui pemanfaatan teknologi dan informasi
		Keterbatasan kompetensi SDM Ekraf dan Pariwisata	1) Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Terstruktur 2) Sertifikasi dan Standardisasi Kompetensi 3) Penguatan Peran Komunitas dan Kelembagaan Lokal	1) Memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan subsektor unggulan 2) Meningkatkan profesionalisme dan pengakuan resmi terhadap kemampuan SDM 3) Memberdayakan struktur di tingkat akar rumput (komunitas dan desa wisata)
2.	Tata Kelola Pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang belum kolaboratif	1) Peningkatan partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak (<i>stakeholder</i>) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan	1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 2) Mengembangkan forum komunikasi dan konsultasi antara

No.	Bidang Permasalahan	Permasalahan Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
			pengembangan UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi 2) Pengembangan dan pengintegrasian infrastruktur digital pada instansi pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta 3) Mengimplementasikan sistem <i>e-governance</i> untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi
3.	Infrastruktur	Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1) Peningkatan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang terpadu 2) Pengembangan pembangunan pemukiman yang optimal 3) Peningkatan efisiensi penyediaan lahan pemukiman yang selaras dengan perencanaan tata ruang	1) Mengembangkan infrastruktur dan sistem sanitasi yang berkelanjutan 2) Mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan seperti taman kota, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda 4) Memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan penerapan kebijakan <i>green building</i>
		Ketahanan daerah terhadap mitigasi iklim dan bencana belum optimal	1) Peningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi bencana dan penanggulangan bencana 2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana 3) Pengembangan teknologi sistem <i>early warning system</i> yang terintegrasi	1) Mengembangkan dan memperluas jaringan jalur evakuasi bencana di daerah rawan 2) Membangun dan mengintegrasikan sistem <i>early warning system</i> secara holistik di wilayah rawan bencana 3) Melakukan pelatihan dan simulasi bencana secara rutin bagi masyarakat

No.	Bidang Permasalahan	Permasalahan Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
4.	Ketahanan Pangan	Peningkatan alih fungsi lahan	1) Peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap alih fungsi lahan serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 2) Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan serta diversifikasi tanam dan peningkatan layanan irigasi masyarakat	1) Menetapkan zonasi lahan yang ketat dan melakukan pengawasan terhadap implementasinya 2) Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lahan 3) Mengembangkan kebijakan insentif bagi penggunaan lahan secara berkelanjutan

C. Kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk UM-IKM

Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah menjelaskan bahwa ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah. Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah kondisi yang melatarbelakangi berkembangnya riset dan penggunaan hasil riset bagi pembangunan di daerah. Kerangka ekosistem riset dan inovasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari elemen elemen.

Keenam elemen riset dan inovasi yang dimaksud yaitu Elemen Kebijakan dan Infrastruktur, Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung, Elemen Kemitraan, Elemen Budaya, Elemen Keterpaduan, serta Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global. Untuk mewujudkan pengembangan ekosistem riset dan

inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas, keenam elemen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1) Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

- a. Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah,
- b. Penataan basis data riset dan inovasi,
- c. Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi,
- d. Pengelolaan kebun raya daerah,
- e. Penyediaan anggaran riset dan inovasi, dan
- f. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

2) Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

- a. Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan
- b. Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

3) Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi

- a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan,
- b. Peningkatan difusi inovasi, dan
- c. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi.

4) Elemen Budaya Riset dan Inovasi

- a. Promosi dan kampanye inovasi,
- b. Apresiasi prestasi inovasi,
- c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, dan
- d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.

5) Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

- a. Prakarsa pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah,
- b. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi UM-IKM berbasis PUD Gula Kelapa, Durian, dan Kopi
- c. Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

6) Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global

- a. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas,
- b. Penguatan kerja sama internasional.

BAB VI. PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Peta jalan riset dan inovasi merupakan rencana aksi jangka panjang yang menjamin bahwa semua upaya penelitian dan pengembangan di daerah terintegrasi dan bertujuan tunggal yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan dan pemanfaatan Iptek dan inovasi. Sesuai tema RIPJPID Kabupaten Banyumas tahun 2025 – 2029, peta jalan riset dan inovasi diarahkan pada pengembangan ekosistem riset untuk UM-IKM dan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*). Peta jalan riset dan inovasi ini disusun dengan mempertimbangkan tujuan, analisis potensi, isu strategis, analisis kesenjangan, dan strategi yang akan dilakukan.

A. Peta Jalan Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas

Peta Jalan Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas diprioritaskan pada tiga produk unggulan yaitu gula kelapa, durian, dan kopi. Ketiga produk unggulan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pencapaian prioritas pembangunan di Kabupaten Banyumas. Peta jalan riset dan inovasi dari masing – masing produk unggulan tersebut diuraikan seperti berikut ini.

1. Peta Jalan Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM Berbasis Gula Kelapa

Kabupaten Banyumas memiliki peran yang sangat strategis dalam industri gula kelapa nasional, di mana sentra produksi tersebar hampir di seluruh wilayah, kecuali kawasan perkotaan Purwokerto. Data menunjukkan bahwa Banyumas menyumbang devisa terbesar untuk ekspor gula kelapa secara nasional, menandakan kematangan volume dan efisiensi

produksi yang tinggi. Produk gula kelapa yang tersedia saat ini meliputi bentuk cetak, kristal, dan gula cair, dengan kecenderungan produksi yang terus meningkat.

Meskipun memiliki keunggulan kuantitas dan kontribusi ekspor, tantangan pengembangan bergeser dari isu volume ke isu standardisasi, diferensiasi nilai, dan hilirisasi. Gula kelapa Banyumas diakui memiliki cita rasa khas, suatu atribut yang harus diupayakan untuk diakui secara legal sebagai komoditas Indikasi Geografis (IG). Pendaftaran IG ini merupakan mekanisme formal yang krusial untuk menangkap nilai premium di pasar internasional, dan menghubungkan produk lokal yang unik dengan tuntutan pasar global. Peta jalan ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kualitas, transformasi teknologi, dan optimalisasi ekosistem riset, yang teridentifikasi menghadapi tantangan seperti minimnya anggaran riset dan inovasi pada RPJMD, terbatasnya produktivitas SDM peneliti, dan belum optimalnya kolaborasi serta komersialisasi hasil riset.

Arah kebijakan strategis dari pengembangan gula kelapa di Kabupaten Banyumas adalah menjadi *Global Sustainable Coconut Sugar Hub* yang berbasis pada inovasi terintegrasi dan kearifan lokal. Untuk mencapai arah kebijakan strategis ini, sasaran kunci yang terukur ditetapkan pada akhir periode 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Gula Kelapa Banyumas harus terdaftar dan diakui sebagai Indikasi Geografis Nasional.
- b. Peningkatan volume ekspor produk berstandar green technology sebesar 20% melalui adopsi proses produksi minimal ERK.

- c. Tersedianya minimum 5 Perusahaan Pemula Berbasis Riset Gula Kelapa yang telah terinkubasi, menghasilkan produk hilirisasi bernilai tambah.
- d. Terlaksananya pemanfaatan riset dan inovasi yang mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi dan memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

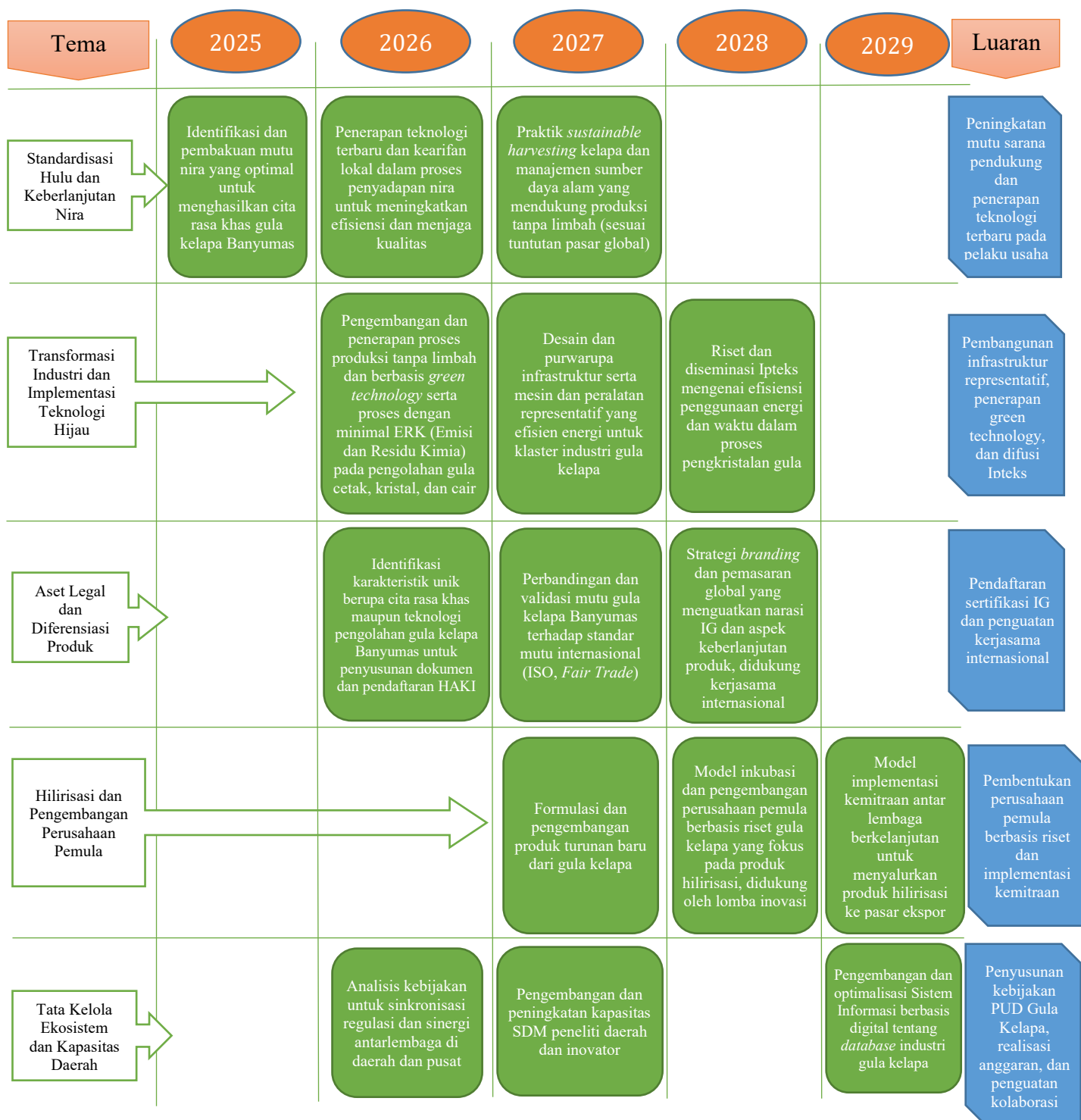
Untuk mewujudkan arah kebijakan strategis dan sasaran kunci, peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk gula kelapa di Kabupaten Banyumas selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Gambar 60. Gambar 60 menunjukkan bahwa peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk gula kelapa memiliki lima tema yaitu:

- i. Standardisasi Hulu dan Keberlanjutan Nira
- ii. Transformasi Industri dan Implementasi Teknologi Hijau
- iii. Aset Legal dan Diferensiasi Produk
- iv. Hilirisasi dan Pengembangan Perusahaan Pemula
- v. Tata Kelola Ekosistem dan Kapasitas Daerah

Tema riset standardisasi hulu dan keberlanjutan nira berfokus pada pengamanan kualitas bahan baku (nira) dan implementasi praktik budidaya yang berkelanjutan sebagai fondasi untuk produk ekspor premium. Fokus riset tema ini meliputi identifikasi dan pembakuan mutu nira yang optimal untuk menghasilkan cita rasa khas gula kelapa Banyumas (mendukung IG); penerapan teknologi terbaru dan kearifan lokal dalam proses penyadapan nira untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas; dan praktik *sustainable harvesting* kelapa dan manajemen sumber daya alam yang mendukung produksi tanpa limbah (sesuai tuntutan pasar global). Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah peningkatan

mutu sarana pendukung dan penerapan teknologi terbaru pada pelaku usaha.

Tema riset transformasi industri dan implementasi teknologi hijau krusial untuk memastikan gula kelapa Banyumas memenuhi standar lingkungan dan efisiensi produksi yang diperlukan oleh pasar internasional, khususnya terkait praktik *green technology*. Fokus riset tema ini meliputi pengembangan dan penerapan proses produksi tanpa limbah dan berbasis *green technology* serta proses dengan minimal ERK (Emisi dan Residu Kimia) pada pengolahan gula cetak, kristal, dan cair; Desain dan purwarupa infrastruktur serta mesin dan peralatan representatif yang efisien energi untuk klaster industri gula kelapa; dan diseminasi Ipteks mengenai efisiensi penggunaan energi dan waktu dalam proses pengkristalan gula. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah pembangunan infrastruktur representatif, penerapan *green technology*, dan difusi Ipteks.



Gambar 60. Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berbasis Produk Gula Kelapa

Tema riset aset legal dan diferensiasi produk merupakan prioritas utama yang fokus pada pengamanan legalitas dan

branding produk untuk menangkap nilai premium. Fokus riset tema ini meliputi identifikasi karakteristik unik (cita rasa khas) gula kelapa Banyumas untuk penyusunan dokumen dan pendaftaran sertifikasi Indikasi Geografis (IG); perbandingan dan validasi mutu gula kelapa Banyumas terhadap standar mutu internasional (ISO, *Fair Trade*); dan strategi *branding* dan pemasaran global yang menguatkan narasi IG dan aspek keberlanjutan produk, didukung kerjasama internasional. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah pendaftaran sertifikasi IG dan penguatan kerjasama internasional.

Tema riset hilirisasi dan pengembangan perusahaan pemula bertujuan mengatasi belum optimalnya upaya komersialisasi dan hilirisasi hasil riset dengan menciptakan produk turunan bernilai tambah tinggi. Fokus riset tema ini meliputi formulasi dan pengembangan produk turunan baru dari gula kelapa (misalnya, pemanis fungsional, bahan baku industri makanan/minuman, gula kelapa bubuk dengan solubility tinggi); model inkubasi dan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset gula kelapa yang fokus pada produk hilirisasi, didukung oleh lomba inovasi; dan model implementasi kemitraan antar lembaga yang konsisten dan berkelanjutan untuk menyalurkan produk hilirisasi ke pasar ekspor. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah pembentukan perusahaan pemula berbasis riset dan implementasi kemitraan.

Tema riset tata kelola ekosistem dan kapasitas daerah mendukung keberhasilan seluruh tema riset melalui penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM). Fokus riset tema ini meliputi analisis kebijakan untuk sinkronisasi regulasi dan sinergi antarlembaga di daerah dan pusat demi mengamankan

alokasi anggaran riset dan inovasi 2025–2029; pengembangan dan optimalisasi Sistem Informasi berbasis digital tentang database industri gula kelapa; dan pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM peneliti daerah dan inovator untuk mengatasi terbatasnya produktivitas SDM Peneliti. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah penyusunan kebijakan PUD Gula Kelapa, realisasi anggaran, dan penguatan kolaborasi.

2. Peta Jalan Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM Berbasis Durian

Kabupaten Banyumas memiliki beberapa wilayah sentra produksi durian yang signifikan, meliputi kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Banyumas, dan Kedungbanteng. Durian yang dihasilkan mencakup varian lokal dan non-lokal. Saat ini, sebagian besar hasil panen durian dijual dalam bentuk segar, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku kuliner (seperti es durian dengan berbagai varian). Meskipun permintaan pasar untuk durian segar masih sangat besar dan luas, pengembangan hilirisasi produk turunan durian di Banyumas masih berada di tahap awal. Saat ini, hanya terdapat satu pelaku usaha utama yang fokus pada pengolahan, dengan produk andalan dodol durian yang telah memiliki sertifikasi dan pasar skala nasional, bahkan sedang diupayakan kelayakannya untuk ekspor.

Peta jalan ini disusun untuk mengatasi kesenjangan antara potensi hulu (budidaya) dan realisasi hilirisasi (nilai tambah). Tantangan utama dalam pemanfaatan riset dan inovasi serupa dengan komoditas unggulan lainnya, yakni Minimnya Anggaran riset dan inovasi pada RPJMD, Terbatasnya Produktivitas SDM Peneliti, dan Belum Optimalnya Upaya Komersialisasi dan

Hilirisasi Hasil Riset. Transformasi strategis harus diwujudkan melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi berbasis enam pilar, yang dijamin oleh penetapan durian sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD).

Sama halnya dengan gula kelapa, pengembangan durian di Banyumas perlu didukung melalui Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM yang berbasis pada PUD Durian. Pengamanan regulasi ini penting untuk memastikan Realisasi Anggaran Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Durian dari Hulu ke Hilir untuk periode 2025–2029.

Kerangka kerja peta jalan ini mengintegrasikan secara eksplisit enam elemen ekosistem riset dan inovasi: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah, Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi, Kemitraan Riset dan Inovasi, Budaya Riset dan Inovasi, Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah, dan Penyelarasan dengan Perkembangan Global. Pendekatan ini bertujuan memanfaatkan peluang strategis seperti dukungan kebijakan regulasi dan optimalisasi Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas (SIAPPMAS).

Arah kebijakan strategis pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk durian di Kabupaten Banyumas adalah menjadi *Regional Durian Innovation Hub* yang unggul dalam budidaya berkelanjutan dan hilirisasi produk bernilai tambah tinggi. Sasaran kunci yang terukur pada akhir periode 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Durian khas Banyumas harus terdaftar dan diakui sebagai Indikasi Geografis Nasional.
- b. Meningkatnya porsi volume produksi yang diolah menjadi produk turunan (hilirisasi) sebesar 25%.

- c. Tersedianya minimum tiga Perusahaan Pemula Berbasis Riset Durian yang telah terinkubasi.
- d. Terlaksananya pemanfaatan riset dan inovasi yang mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi dan memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan analisis kondisi dan sasaran kunci yang ingin dicapai, peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk durian dapat dilihat pada Gambar 61. Gambar 61 menunjukkan bahwa peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk durian memiliki enam tema yaitu:

- i. Penguatan Infrastruktur Digital dan Implementasi Teknologi Hijau Berkelanjutan untuk Klaster UM-IKM
- ii. Akselerasi Sertifikasi Indikasi Geografis dan Inkubasi Bisnis Berbasis Riset
- iii. Kemitraan Penta-Helix mendorong investasi dalam Teknologi Pengolahan Pascapanen dan Komersialisasi Produk Durian
- iv. Penciptaan Budaya Inovasi Durian yang Responsif
- v. Peningkatan Koherensi Program RISET DAN INOVASI melalui Sinkronisasi Kebijakan Sektoral dan Pembangunan Pusat/Klaster Riset Terpadu
- vi. Peningkatan Standar Mutu Internasional dan Inisiasi Kerjasama Global untuk Memperkuat Branding

Tema riset penguatan infrastruktur digital dan implementasi teknologi hijau berkelanjutan untuk klaster UM-IKM berfokus pada pembangunan fondasi fisik dan regulasi untuk mendukung riset dan inovasi. Fokus riset tema ini meliputi pengembangan dan fungsionalitas Sistem Informasi (SI) Digital Terpadu untuk basis data budidaya dan pengolahan

durian, mengintegrasikan kearifan lokal; dan pengembangan dan penerapan proses produksi tanpa limbah dan berbasis teknologi hijau (*green technology*) untuk pengolahan produk turunan durian. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah memastikan ketersediaan fondasi dana dan teknologi.

Tema riset akselerasi sertifikasi indikasi geografis dan inkubasi bisnis berbasis riset bertujuan untuk memperkuat SDM, legalitas produk, dan menciptakan inovator baru. Fokus riset tema ini meliputi identifikasi karakteristik mutu, rasa, aroma, dan keunikan varietas lokal durian untuk mendukung pendaftaran Sertifikasi Indikasi Geografis (IG); pengembangan produk hilirisasi durian baru (misalnya, pasta durian beku, bubuk durian, atau snack bernilai tinggi) melalui Inkubasi Perusahaan Pemula Berbasis Riset; dan metode Diseminasi dan Alih Teknologi yang efisien dan konsisten kepada UM-IKM terkait budidaya dan pengolahan. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah legalitas produk dan penciptaan inovator baru.



Gambar 61. Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berbasis Produk Durian

Tema riset kemitraan penta-helix mendorong investasi dalam teknologi pengolahan pascapanen dan komersialisasi produk durian mengoptimalkan kolaborasi untuk menarik investasi dan memperluas jangkauan pasar. Fokus riset tema ini meliputi strategi penguatan Kolaborasi Penta-Helix (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, media) yang terukur, khususnya untuk menarik investasi swasta dalam teknologi pengolahan pascapanen; dan model Implementasi Kemitraan Produksi dan Pemasaran yang konsisten dan berkelanjutan. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah peningkatan kerjasama dan perluasan jangkauan pasar.

Tema riset Penciptaan Budaya Inovasi Durian yang Responsif berfokus pada penciptaan iklim internal yang kondusif bagi inovasi dan menghargai kearifan lokal. Fokus riset tema ini meliputi reformasi Kultural Birokrasi untuk membuat aspek administratif dan birokratis Riset dan Inovasi menjadi lebih mudah dan efisien; strategi mendorong Penerapan Teknologi Terbaru yang disandingkan dengan Kearifan Lokal pada pelaku usaha durian; dan model Program Insentif dan Penghargaan yang efektif untuk mendorong pelaku usaha berinovasi. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah Penciptaan iklim internal yang kondusif bagi inovasi.

Tema riset peningkatan koherensi program riset dan inovasi melalui sinkronisasi kebijakan sektoral dan pembangunan pusat/klaster riset terpadu memastikan semua program riset dan inovasi berjalan selaras dan memiliki dampak kolektif. Fokus riset tema ini meliputi sinkronisasi Regulasi Sektoral antarlembaga di daerah dan pusat untuk pengembangan budidaya dan pengolahan durian; dan model

tata kelola dan operasional Pusat dan Klaster Riset Terpadu untuk UM-IKM berbasis PUD Durian yang berfungsi sebagai pusat alih teknologi. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah Keelarasan program riset dan inovasi dan berdampak kolektif.

Tema riset peningkatan standar mutu internasional dan inisiasi kerjasama global untuk memperkuat branding mengarahkan riset dan inovasi untuk mencapai daya saing dan pengakuan di pasar internasional. Fokus riset tema ini meliputi standar mutu ekspor dan sertifikasi internasional yang relevan untuk produk olahan durian; dan strategi branding dan pemasaran internasional untuk durian khas Banyumas, memanfaatkan sertifikasi IG dan aspek keberlanjutan (*green technology*). Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah Peningkatan daya saing dan pengakuan di pasar internasional.

3. Peta Jalan Riset dan Inovasi dalam Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM Berbasis Kopi

Kabupaten Banyumas memiliki sentra produksi kopi yang tersebar di beberapa kecamatan, meliputi Tambak, Pekuncen, Karanglewas, Gumelar, dan Ajibarang, dengan varian utama robusta dan arabica. Pasar kopi yang masif, ditandai dengan maraknya kedai kopi lokal, menjadi peluang besar untuk pengembangan industri dari hulu ke hilir. Namun, pengembangan industri kopi Banyumas menghadapi tantangan kritis dalam hilirisasi. Saat ini, sebagian besar kopi dijual dalam bentuk *green bean*. Lebih lanjut, belum ada pelaku usaha di Banyumas yang memproduksi roasted bean atau kopi bubuk menggunakan peralatan yang representatif untuk menghasilkan kualitas seduhan yang baik; pengolahan kopi sangrai dan

bubuk sebagian besar masih dilakukan secara tradisional. Keterbatasan produksi juga membatasi jangkauan pasar kopi Banyumas. Selain itu, komoditas kopi di Banyumas juga mengalami penurunan produktivitas.

Peta jalan ini dirancang untuk melakukan intervensi riset dan inovasi yang berfokus pada peningkatan produktivitas hulu, standarisasi pengolahan pascapanen, dan pengembangan *branding* premium untuk mengatasi kendala tradisional tersebut. Pengembangan kopi harus dilembagakan melalui penyusunan kebijakan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) Kopi. Kebijakan ini akan menjamin terbitnya kebijakan daerah yang mendukung budidaya dan pengolahan kopi, serta memastikan realisasi anggaran pengembangan budidaya dan pengolahan kopi dari hulu ke hilir untuk periode 2025–2029.

Kerangka kerja peta jalan ini menggunakan enam pilar ekosistem riset dan inovasi yaitu kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, kemitraan riset dan inovasi, budaya riset dan inovasi, keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi di daerah, dan penyelarasan dengan perkembangan global. Pendekatan ini diperlukan untuk mengatasi tantangan yang bersifat struktural dan kultural, seperti minimnya anggaran riset dan inovasi pada RPJMD, terbatasnya produktivitas SDM peneliti, dan hambatan kultural kelitbangan dalam birokrasi.

Arah kebijakan strategis pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk durian di Kabupaten Banyumas adalah menjadi *Central Java Specialty Coffee Hub* yang berbasis pada peningkatan mutu, standarisasi pascapanen, dan *branding* global. Sasaran kunci yang terukur pada akhir periode 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Kopi khas Banyumas harus terdaftar dan diakui sebagai Indikasi Geografis Nasional.
- b. Meningkatnya volume produksi roasted bean dan bubuk yang diproduksi dengan peralatan representatif sebesar 50%.
- c. Tersedianya minimum tiga Perusahaan Pemula Berbasis Riset Kopi yang telah terinkubasi, fokus pada pengolahan produk *specialty* dan turunan kopi.
- d. Terlaksananya pemanfaatan riset dan inovasi yang mengandung pembaharuan dan memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan analisis kondisi dan sasaran kunci yang ingin dicapai, peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk kopi dapat dilihat pada Gambar 62. Gambar 62 menunjukkan bahwa peta jalan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM berbasis produk kopi memiliki enam tema yaitu:

- i. Optimalisasi Kebijakan, pengembangan infrastruktur, dan Sistem Informasi
- ii. Akselerasi Sertifikasi Indikasi Geografis dan Inkubasi Bisnis Berbasis Riset
- iii. Kemitraan Penta-Helix mendorong investasi dalam rantai usaha produk kopi dan jangkauan pasar
- iv. Penciptaan Budaya Inovasi Durian yang Responsif
- v. Penguatan tata kelola pengembangan riset dan inovasi dan Pembangunan Pusat/Klaster Riset Terpadu
- vi. Peningkatan Standar Mutu Internasional dan Inisiasi Kerjasama Global untuk Memperkuat Branding

Tema riset optimalisasi kebijakan, pengembangan infrastruktur, dan sistem informasi berfokus pada membangun

fondasi regulasi, fiskal, dan fisik untuk mendukung inovasi di seluruh rantai nilai kopi. Fokus riset tema ini meliputi efektivitas kebijakan dan penyusunan rekomendasi optimalisasi peran pemerintah dalam peningkatan kinerja budidaya dan pengolahan kopi; kajian kelayakan dan desain pembangunan klaster industri kopi yang representatif; dan desain, pengembangan, dan implementasi sistem informasi berbasis digital (database). Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah Mengatasi minimnya anggaran, keterbatasan infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi administrasi dan database.

Tema riset akselerasi sertifikasi indikasi geografis dan inkubasi bisnis berbasis riset bertujuan untuk memperkuat SDM, legalitas produk, dan menciptakan inovator baru. Fokus riset tema ini meliputi Identifikasi karakteristik unik (profil *cupping*, aroma, proses tradisional) kopi khas Banyumas untuk mendukung pendaftaran Sertifikasi Indikasi Geografis (IG); pengembangan modul bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan yang efisien, konsisten, dan berkelanjutan bagi petani dan pengolah kopi; dan Kajian pasar dan formulasi produk turunan kopi bernilai tambah tinggi yang didukung riset terapan. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah penguatan SDM, legalitas produk, dan menciptakan pengusaha baru.



Gambar 62. Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Berbasis Produk Kopi

Tema riset kemitraan penta-helix mendorong investasi dalam rantai usaha produk kopi dan jangkauan pasar fokus untuk membangun kolaborasi multi-pihak untuk akselerasi inovasi dan perluasan pasar kopi. Fokus riset tema ini meliputi model kerjasama pentahelix yang efektif dalam pengembangan budidaya, pengolahan, hingga pemasaran kopi; dan kajian kemitraan strategis dengan *buyer* nasional/internasional, kedai kopi *specialty*, eksportir, dan platform *e-commerce* untuk memperluas jangkauan pasar kopi. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah peningkatan jumlah kerjasama dan perluasan jangkauan pasar.

Tema riset penciptaan budaya inovasi kopi yang responsif berfokus pada peningkatan mentalitas inovatif dan mempermudah proses riset dan inovasi di daerah. Fokus riset tema ini meliputi reformasi kultural birokrasi untuk membuat aspek administratif dan birokratis riset dan inovasi menjadi lebih mudah dan efisien; pemanfaatan kearifan lokal dalam praktik budidaya atau pengolahan kopi tradisional yang diintegrasikan dengan teknologi modern; dan pengembangan model lomba inovasi dan sistem pemberian penghargaan yang efektif untuk memotivasi pelaku riset dan inovasi di daerah. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah penciptaan iklim kelitbangan yang kondusif bagi riset dan inovasi.

Tema riset penguatan tata kelola pengembangan riset dan inovasi dan pembangunan pusat/klaster riset terpadu memastikan sinkronisasi dan sinergi program riset dan inovasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Fokus riset tema ini meliputi kajian harmonisasi kebijakan terkait pengembangan industri kopi; dan Desain dan evaluasi model klaster riset dan inovasi yang efektif untuk UM-IKM berbasis PUD Kopi.

Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah keselarasan program, kebijakan riset dan inovasi dan terbentuknya klaster.

Tema riset peningkatan standar mutu internasional dan inisiasi kerjasama global untuk memperkuat branding memastikan produk kopi Banyumas memenuhi standar dan tuntutan pasar global. Fokus riset tema ini meliputi pengembangan kerjasama dengan lembaga atau perusahaan internasional untuk promosi dan distribusi kopi di pasar global; adopsi standar mutu internasional dalam seluruh tahapan budidaya, pengolahan pascapanen, hingga penyajian kopi; kaji terapan proses produksi tanpa limbah berbasis *green technology*; dan Pengembangan strategi *branding* dan kampanye pemasaran internasional untuk kopi Banyumas. Kebutuhan yang terpenuhi dari tema riset dan inovasi ini adalah peningkatan daya saing, pengakuan pasar internasional, dan produksi ramah lingkungan.

B. Peta Jalan Riset dan Inovasi untuk Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) menetapkan empat kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) pada empat bidang yaitu ekonomi kreatif dan pariwisata, infrastruktur, ketahanan pangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peta jalan riset dan inovasi untuk kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) untuk masing – masing bidang dapat diuraikan seperti berikut ini.

1. Kajian *Evidence Based Policy* Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Kebijakan Berbasis Bukti (EBP) adalah suatu pendekatan dalam penyusunan kebijakan publik yang memanfaatkan data,

penelitian, dan analisis ilmiah sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Dalam kerangka ekonomi kreatif dan pariwisata, di Kabupaten Banyumas, pendekatan ini krusial untuk memastikan bahwa kebijakan daerah bersifat tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan fokus pada hasil. Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi budaya, alam, dan ekonomi kreatif yang beragam memerlukan kebijakan yang didasarkan pada data yang akurat agar pengembangannya tepat sasaran dan berkelanjutan

Kajian ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis pada EBP memerlukan data yang lengkap mengenai potensi sub-sektor ekonomi kreatif, karakteristik wisatawan, pilihan pasar, serta dampak sosial-ekonomi dari kegiatan pariwisata. Penelitian lokal dan survei berkala menjadi sumber utama dalam menganalisis tren serta peluang baru. Sebagai contoh, informasi mengenai pertumbuhan kunjungan wisata alam di Baturraden atau meningkatnya ketertarikan pada kuliner tradisional Banyumas bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas untuk investasi, promosi, dan pengembangan infrastruktur. Dengan cara itu, kebijakan yang muncul tidak hanya mengikuti tren, melainkan didasarkan pada bukti konkret di lapangan

Kebijakan Berbasis Bukti mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif dalam penyediaan serta pemanfaatan data. Di Banyumas, institusi seperti universitas. Lembaga pendidikan dapat berkolaborasi dalam riset kebijakan lokal melalui pemetaan potensi ekonomi kreatif, analisis kelayakan pariwisata, hingga pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Pemerintah daerah bisa berfungsi sebagai penghubung untuk mengintegrasikan hasil riset tersebut ke

dalam kebijakan publik. Kolaborasi ini menghasilkan siklus inovasi kebijakan di mana penelitian berfungsi sebagai masukan, kebijakan berperan sebagai instrumen, dan evaluasi menjadi sumber pembelajaran.

Melalui penerapan Kebijakan Berbasis Bukti, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Banyumas dapat diarahkan dengan lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan yang berasal dari data dan penelitian akan memperkuat daya saing wilayah, meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif, serta menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan. Di masa mendatang, Banyumas memiliki kesempatan untuk menjadi contoh daerah yang menerapkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang didasarkan pada bukti (*evidence-driven governance*), di mana setiap kebijakan dirumuskan berdasarkan data, analisis, dan evaluasi yang tepat untuk mendukung pembangunan daerah yang inovatif dan inklusif

2. Kajian Evidence Based Policy Infrastruktur

Kabupaten Banyumas memiliki variasi geografi yang luas mulai dari area urban/perkotaan seperti Purwokerto hingga kawasan pedesaan dan pegunungan seperti Baturraden, Pekuncen, dan Gumelar. Ketidakmerataan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi) masih menjadi penghalang utama bagi arus pergerakan masyarakat dan distribusi ekonomi. Analisis infrastruktur dasar diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan antarwilayah dan merancang strategi pemerataan pembangunan agar semua kecamatan mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas publik dan layanan dasar.

Sarana infrastruktur dasar yang memadai seperti jalan produksi, jaringan listrik, dan sistem air bersih menjadi landasan penting untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri kecil menengah, dan pariwisata Banyumas. Studi mengenai infrastruktur dapat mendukung pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang paling berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan investasi. Dengan informasi yang tepat, Banyumas mampu menarik minat investor serta pelaku bisnis baru berkat fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan efektif

Banyumas merupakan kawasan yang memiliki risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan di sejumlah area. Analisis infrastruktur dasar yang penting untuk mengevaluasi ketahanan fasilitas publik terhadap risiko tersebut serta memastikan sistem drainase, jaringan air, dan fasilitas umum dibangun dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dan penyesuaian iklim. Penelitian ini juga bisa menjadi landasan untuk pengembangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa mendatang.

3. Kajian Evidence Based Ketahanan Pangan

Kajian pangan di Kabupaten Banyumas memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan sumber pangan bagi masyarakat. Sebagai daerah agraris dengan luas lahan pertanian yang cukup besar, Banyumas menyumbang produksi penting seperti padi, singkong, kelapa, dan sayuran. Namun, tekanan terhadap lahan produktif akibat urbanisasi dan alih fungsi lahan memunculkan kebutuhan akan kajian ilmiah untuk menilai ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Kajian ini menjadi dasar bagi

pemerintah dalam merancang kebijakan yang mampu menjaga kemandirian pangan di tingkat lokal.

Arus utama dan cara pandang dalam penelitian pangan Banyumas menganggap pangan lokal sebagai sumber daya ekonomi daerah. Produk unggulan seperti gula kelapa, kopi, dan durian Banyumas tidak hanya mengandung nilai gizi dan nilai sosial budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikembangkan melalui inovasi dan hilirisasi. Penelitian tentang pangan harus menyelidiki secara detail rantai nilai komoditas ini dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran sehingga Banyumas dapat meningkatkan penghasilan petani sekaligus memperkuat posisi di pasar pangan regional dan nasional.

Perubahan iklim menjadi tantangan signifikan yang berdampak pada hasil pertanian di Banyumas. Perubahan pola tanam, cuaca ekstrem, dan berkurangnya ketersediaan air mengancam sistem pangan di daerah wilayah Kabupaten Banyumas. Oleh sebab itu, studi tentang pangan harus melibatkan analisis risiko iklim serta strategi adaptasi yang berbasis penelitian, seperti pengembangan varietas yang tahan terhadap kekeringan, sistem irigasi mikro, dan pemanfaatan teknologi pertanian presisi. Metode ilmiah ini akan mendukung Banyumas dalam mempertahankan kestabilan produksi dan ketahanan pangan secara berkelanjutan

Pandangan ke depan menegaskan bahwa studi tentang pangan di Kabupaten Banyumas perlu difokuskan pada pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dan mandiri. Dengan kata lain, tidak hanya menekankan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang mendukung petani kecil, inovasi

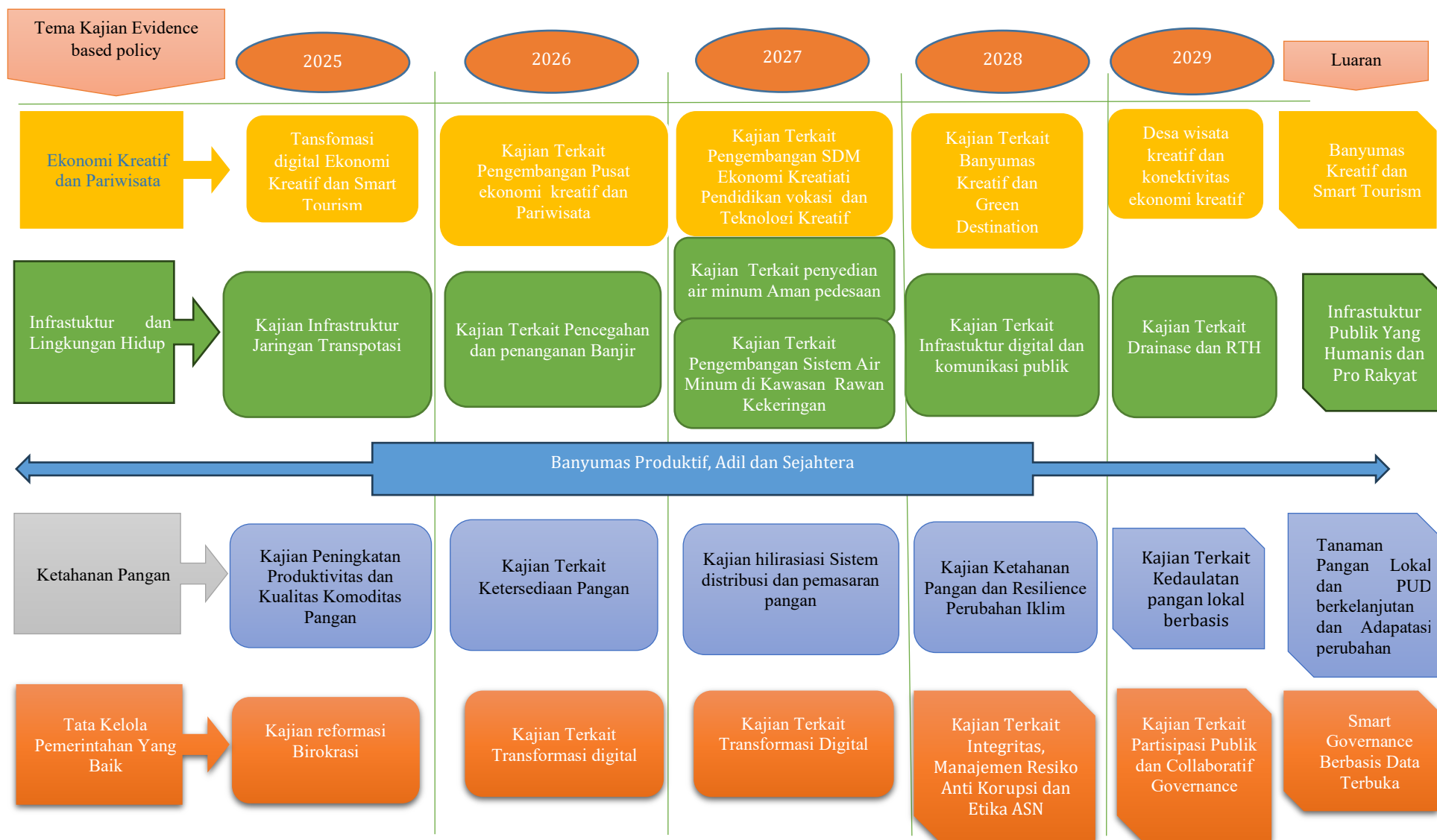
teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, Banyumas memiliki kesempatan untuk menjadi contoh daerah mandiri pangan berbasis lokal di Jawa Tengah, sekaligus praktik baik pembangunan pangan yang inklusif dan berorientasi masa depan.

4. Kajian Evidence Based Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Penelitian mengenai pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Banyumas sangat diperlukan sebagai landasan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang efektif tidak hanya dilihat dari kinerja birokrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara adil, transparan, dan berfokus pada hasil. Dengan penelitian yang mendalam, pemerintah bisa memahami sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan

Pemerintahan yang baik menjadikan masyarakat sebagai mitra yang aktif dalam proses pembangunan. Penelitian tentang tata kelola pemerintahan di Banyumas penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat berperan dalam proses perencanaan dan pengawasan program daerah. Dengan melibatkan publik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini pun bisa membantu pemerintah dalam merancang model kolaborasi baru antara birokrasi, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk mendorong pembangunan yang partisipatif dan inklusif

Pelaksanaan tata kelola yang baik tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang didasarkan pada bukti. Studi ini berfungsi penting dan mendasar dalam menyajikan data dan analisis ilmiah untuk penyusunan kebijakan daerah. Dengan kajian yang berdasar data, pemerintah Banyumas dapat menghindari keputusan yang reaktif dan menggantinya dengan kebijakan yang strategis, terukur, serta fokus pada hasil jangka panjang. Ini juga mendukung agenda reformasi birokrasi menuju pengelolaan yang modern dan responsif terhadap perubahan



Gambar 63. Peta jalan Riset dan Inovasi Kabupaten Banyumas Evidence Based Policy Tahun 2025-2029

BAB VII. RENCANA AKSI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Rencana aksi Riset dan Inovasi dalam RIPJPID di Kabupaten Banyumas merupakan rencana aksi tahunan. Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah memuat program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

A. Program dan Target Tahunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

Bagian ini berisi penjabaran terhadap sasaran strategis dan fokus kebijakan penyelesaian permasalahan prioritas daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan tahunan secara rinci. Program dan target tahunan dari Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*) dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini.

Tabel 27. Program dan Target Tahunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

No.	Program/ Kegiatan	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Kode SIPD	Nama Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
1.	Riset untuk merespon isu-isu aktual periode 2025-2029	Melaksanakan riset dalam kurun waktu 2025-2029 dengan tema sesuai isu yang muncul pada kurun waktu tsb, dan sesuai penugasan kepala daerah	5.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2.	Membudayakan inovasi daerah di lingkungan pemerintah daerah	Budaya inovasi di PD dengan mendorong satu PD satu inovasi per tahunan. Perlu program/kegiatan pembagian peran antara Bapperida	5.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

		(sebagai koordinator) dan semua OPD sebagai area inovasi daerah			
--	--	---	--	--	--

Untuk mendukung program dan kegiatan pada Tabel 27, usulan judul kajian atau riset dari Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Judul Kajian Usulan Tahun 2026-2029

No.	Tema	Judul Kajian	Tahun				OPD Terkait
			2026	2027	2028	2029	
1.	Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Kajian Peningkatan Daya Saing Destinasi Wisata			√		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) melalui Ekonomi Kreatif	√				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Kajian Sentra Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah (UM-IKM) di Kabupaten Banyumas	√				Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Bagian Perekonomian Setda
		Analisis Strategi Hilirisasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Banyumas		√			Bagian Perekonomian Setda
		Kajian Kelayakan dan Rantai Nilai Produk Ekonomi Kreatif		√			Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
		Kajian Nilai Tambah dan Dampak Ekonomi Seni Pertunjukan Di Kabupaten Banyumas			√		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
		Strategi dan Model Pengembangan <i>Creative Hub</i> di Kabupaten Banyumas			√		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
		Kajian Pemetaan Warisan Budaya Tak Benda				√	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
		Kajian Analisis Lokasi Strategis shelter PKL				√	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Tema	Judul Kajian	Tahun				OPD Terkait
			2026	2027	2028	2029	
2.	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Pemetaan Aksesibilitas dan Kapasitas Jalan bagi Pengembangan PUD di Kabupaten Banyumas		√			Dinas Pekerjaan Umum
		Model Penentuan Kebutuhan Pembangunan Prasarana Persampahan (Kebutuhan, Lokasi, Tipe Prasarana) Berbasis IT		√			Dinas Pekerjaan Umum
		Pencegahan dan Penangan Banjir	√				Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum
		Kajian Evaluasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			√		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kajian Infrastruktur digital dan komunikasi publik			√		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Analisis Ketersediaan Sumber Air dan Kelayakan Pengembangan SPAM pada Kawasan Rawan Kekeringan				√	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kajian Implementasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Kabupaten Banyumas				√	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Analisis Rencana Tapak (<i>Block Plan</i>) Kawasan Peruntukan Industri Randegan-Parungkamal Kabupaten Banyumas Tahun 2026				√	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peta Lahan Investasi, Sebaran Potensi dan Peluang Investasi Wilayah	√				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Tema	Judul Kajian	Tahun				OPD Terkait
			2026	2027	2028	2029	
		Kajian Pemetaan Wilayah Kondisi Air untuk Sektor Perikanan	√				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan data ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan	√				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Pertanian
		Investment Project Ready to Offer (IPRO) Hilirisasi Kelapa, Durian dan Kopi		√			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kajian Pemetaan dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani Muda		√			Dinas Pertanian
		Kajian Kesesuaian Wilayah Pengembangan Kawasan Peternakan di Kabupaten Banyumas			√		Dinas Pertanian
		Kajian Penanganan Penyakit dalam Budidaya Ikan Tawar (Gurami)				√	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Kajian Produktivitas Nira Berbagai Varietas Kelapa Di Kabupaten Banyumas				√	Dinas Pertanian
		Pemetaan Lahan Tepat Komoditas untuk Optimalisasi Produktivitas Pertanian				√	Dinas Pertanian
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengembangan Smart City (Kota Cerdas) di Kabupaten Banyumas	√				Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kajian Perencanaan Pemanfaatan Aset Daerah	√				Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2038		√			Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Tema	Judul Kajian	Tahun				OPD Terkait
			2026	2027	2028	2029	
		Kajian Rasio NJOP terhadap Nilai Pasar dan Batas Minimal NJOP Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan		√			Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Kajian Penguatan Integritas dan Etika ASN			√		Setda Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Resiko dan Anti Korupsi			√		Setda Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Kajian Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi SPBE				√	Setda Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH			8	8	8	8	

B. Program dan Target Tahunan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas

Bagian ini berisi penjabaran terhadap sasaran strategis dan fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas melalui Pengembangan Produk Unggulan Daerah dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Program dan target tahunan pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas secara rinci sebagaimana Tabel 29 berikut ini.

Tabel 29. Program dan Target Tahunan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM di Kabupaten Banyumas

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Pengembangan dan fungsionalitas Sistem Informasi (SI) Digital Terpadu untuk basis data	Basis data yang terintegrasi dengan program satu data Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan UM-IKM dan riset dan inovasi terkait UM-IKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.20.02	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0010					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Evaluasi kebijakan dan penyusunan rekomendasi optimalisasi peran pemerintah dalam peningkatan kinerja pengembangan PUD	Evaluasi regulasi yg menghambat dan menerbitkan regulasi baru terkait pengembangan PUD dan UM-IKM	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03					Setda. Bagian Hukum
				Program Riset dan Inovasi Daerah	5.05.03	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	5.05.03.2.02.0022					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
		Pengembangan modul bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan	Menyusun dan menerbitkan modul bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan bagi UM-IKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pengembangan model tata kelola dan operasional Pusat atau Klaster Riset Terpadu untuk UM-IKM berbasis riset yang berfungsi sebagai pusat alih teknologi	Berupa perancangan tata kelola, penyediaan fasilitas riset, penguatan kemitraan, dan transfer teknologi untuk mendukung UM-IKM agar lebih inovatif dan berdaya saing	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	3.31.02.2.01.0004					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
						Prasarana Industri						
		Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun Skema anggaran untuk pengembangan UM- IKM terutama yang terkait PUD	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat, khususnya UM-IKM dan Pemerintah Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004					
		Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Menyediakan infrastruktur dasar riset dan inovasi dalam pengembangan UM-IKM (membangun/ revitalisasi/ kolaborasi dg perguruan tinggi (PT): pusat inovasi/ inkubator; ruang publik kreatif: RTH yg ditambah fasilitas WiFi dan gazebo)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.11.04	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pembangunan sarana Komposting limbah Organik Komoditas Unggulan	Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11	Kegiatan Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01					Dinas Lingkungan Hidup
			Pembangunan Instalasi Pengelola Air Limba (IPAL) pengelolaan Gula Kelapa	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan hidup	2.11.03	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01					Dinas Lingkungan Hidup

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
		Pengembangan desain dan purwarupa infrastruktur serta mesin dan peralatan representatif yang efisien energi untuk klaster UM-IKM	Perancangan dan pembuatan infrastruktur serta peralatan hemat energi yang mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi UM-IKM	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan,
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pengembangan Klaster UM-IKM berbasis PUD dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi	Pembentukan klaster UM-IKM yang terintegrasi dengan produk unggulan daerah untuk memperkuat daya saing melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
				Program Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian/ Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.01.03.2.01.0003					Setda. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2.	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM peneliti daerah dan inovator	Peningkatan kemampuan peneliti dan inovator daerah melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kompetensi	Program Riset dan Inovasi Daerah	5.05.03	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	5.05.03.2.02.0011					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Pengembangan kultural birokrasi untuk membuat aspek administratif dan birokratis riset dan inovasi menjadi lebih mudah dan efisien	Penyederhanaan budaya kerja birokrasi agar proses administratif riset dan inovasi lebih mudah, cepat, dan efisien	Program Riset dan Inovasi Daerah	5.05.03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5.05.03.2.01.004					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi	Pengembangan model implementasi kemitraan antar lembaga berkelanjutan untuk menyalurkan produk hilirisasi ke pasar ekspor	Pembentukan kemitraan antar lembaga secara berkelanjutan untuk memperluas penyaluran produk hilirisasi ke pasar ekspor	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
				Program Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian / Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.0002					Setda. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
		Pengembangan model tata kelola pusat riset terpadu yang melibatkan multipihak	Perancangan tata kelola pusat riset terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi riset dan inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	5.05.03	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi daerah	5.05.03.2.02.0014					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Pengembangan kemitraan strategis dengan buyer nasional/ internasional, pelaku usaha, eksportir, dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar	Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas akses dan jangkauan pasar produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02	Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.01.02.2.04					Setda. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
				Program Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian / Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.0002					
4.	Budaya Riset dan Inovasi	Praktik sustainable harvesting dan manajemen sumber daya alam yang mendukung produksi tanpa limbah	Penerapan panen berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung produksi yang ramah lingkungan dan tanpa limbah	Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11	Kegiatan Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01					Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	3.27.05.2.01					Dinas Pertanian
			Pemanfaatan limbah organik dari komoditas unggulan untuk budidaya maggot dan pupuk kompos sebagai bentuk praktek sirkular ekonomi	Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11	Kegiatan Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01					Dinas Lingkungan Hidup
			Melaksanakan bimbingan teknis budidaya, fasilitasi bantuan benih dan pupuk, pendampingan dan monev petani	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.01	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	3.27.02.2.01					Dinas Pertanian
					3.27.02	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu)	2.06.003					Dinas Pertanian

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
						Daerah Kabupaten/Kota Lain						
					3.27.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.02.002					Dinas Pertanian
					3.27.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.03.001					Dinas Pertanian
			Pemetaan dan survei lahan organic dan menerbitkan rekomendasi lahan organic untuk keperluan ekspor	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.01	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme keenangan kabupaten/ kota	3.27.02.2.02					Dinas Pertanian
		Penerapan teknologi terbaru dan kearifan lokal dalam proses pemanenan dan pengolahan PUD	Pemanfaatan teknologi modern dan kearifan lokal dalam pengolahan PUD untuk meningkatkan	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
		untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas	efisiensi dan menjaga kualitas hasil			menjadi Usaha Kecil						
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Formulasi dan pengembangan produk turunan baru dari PUD dan UM-IKM	Perancangan dan pengembangan produk turunan baru untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing UM-IKM	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Pengembangan model program insentif dan	Penyusunan skema insentif dan penghargaan untuk	Program Riset dan Inovasi Daerah	5.05.03	Fasilitasi dan pembinaan untuk	5.05.03.2.02.0012					Badan Perencanaan Pembangunan,

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
		penghargaan yang efektif untuk mendorong pelaku usaha berinovasi	mendorong pelaku usaha lebih aktif berinovasi			apresiasi prestasi Inovasi						Riset dan Inovasi Daerah
		Diseminasi dan alih teknologi yang efisien dan konsisten kepada UM-IKM terkait budidaya dan pengolahan	Penyebaran dan transfer teknologi secara efisien dan berkelanjutan kepada UM-IKM dalam budidaya dan pengolahan	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5.	Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah	Harmonisasi kebijakan terkait pengembangan PUD dan UM-IKM	Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan baik antara pusat dan daerah maupun antar OPD	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penguatan model inkubasi dan pengembangan perusahaan pemula	Pengembangan sistem inkubasi untuk mendukung pertumbuhan dan kemandirian perusahaan pemula	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
		Pengembangan model insentif dan sinkronisasi kelembagaan riset dalam pengembangan UM-IKM	Penyusunan skema insentif dan penyaluran riset untuk mendukung pengembangan UM-IKM	Program Riset dan Inovasi Daerah	5.05.03	Fasilitasi dan pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	5.05.03.2.02.0001					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan global	Perbandingan dan validasi mutu PUD Banyumas terhadap standar mutu internasional (ISO, Fair Trade)	Pengujian dan perbandingan mutu PUD Banyumas dengan standar internasional untuk meningkatkan daya saing global	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Penguatan branding dan pemasaran global dengan menguatkan narasi kekayaan intelektual (Indikasi	Penguatan branding dan pemasaran global melalui pemanfaatan kekayaan intelektual dan prinsip keberlanjutan produk	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
		Geografis, HAKI, Paten) dan keberlanjutan produk				menjadi Usaha Kecil						
			Branding produk dengan sistem produksi yang sustainable yang menggunakan kompos organik dari limbah produk itu sendiri	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01					Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan dan penerapan proses produksi ramah lingkungan dan teknologi hijau sesuai tuntutan global	Penerapan proses produksi ramah lingkungan dan teknologi hijau untuk memenuhi standar dan tuntutan pasar global	Program Pengembangan UMKM	2.17.08	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	3.31.02.2.01.0004					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
						Sarana dan Prasarana Industri						
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Proses produksi unggulan dengan mengedepankan upaya tanggungjawab terhadap Food Loss and Waste pencapaian SDGs No. 2 dan 12	Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11	Kegiatan Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01					Dinas Lingkungan Hidup
		Adopsi standar mutu internasional dalam seluruh tahapan budidaya, pengolahan pascapanen, hingga penyajian dari PUD	Penerapan standar mutu internasional pada setiap tahap budidaya, pengolahan, dan penyajian produk PUD untuk meningkatkan kualitas dan daya saing	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.1.01					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Elemen Ekosistem	Program/Kegiatan Sub Elemen Ekosistem	Ruang Lingkup Program/ Kegiatan	Nama Program Perangkat Daerah		Kegiatan/ Subkegiatan		Tahun (202x)				OPD Penanggungjawab
				Nama Program	Kode	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	6	7	8	9	
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.31.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003					

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai landasan utama dalam pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Banyumas. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Banyumas dirancang untuk memberikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan rencana aksi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan arah kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029. Tema yang diambil dalam RIPJPID ini adalah Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk UM-IKM.

Dalam RIPJ PID Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa produk unggulan daerah yang akan dikembangkan secara intensif dalam periode 2025-2029. Produk-produk tersebut mencerminkan potensi ekonomi lokal dan meliputi gula kelapa, durian, kopi, minyak atsiri, kambing perah, dan kayu olahah. Prioritas produk unggulan yang dikembangkan pada tahun 2025-2029 adalah gula kelapa, durian, dan kopi. Pengembangan produk-produk ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi daerah tetapi juga untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya lokal. Setiap produk unggulan dipilih berdasarkan potensi pengembangan yang berkelanjutan dan kemampuannya untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029. Untuk menyelesaikan permasalahan utama tersebut, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) tahun 2025-2029 menetapkan empat kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) pada empat bidang yaitu ekonomi kreatif dan pariwisata, infrastruktur dan lingkungan, ketahanan pangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Harapannya adalah tujuan pembangunan Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029 dapat diakselerasi dengan RIPJPID ini.

Proses pengembangan produk unggulan daerah dan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) dianalisis melalui kerangka Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah. Kerangka ini terdiri dari enam elemen penting, yaitu kebijakan infrastruktur riset dan inovasi, yang mengatur bagaimana riset dan inovasi diintegrasikan ke dalam kebijakan Pembangunan. kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi lokal dalam mendukung penelitian dan pengembangan, kemitraan riset dan inovasi, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas untuk menciptakan solusi inovatif bagi masalah lokal, budaya riset dan inovasi yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan eksperimen dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, keterpaduan riset dan inovasi di daerah yang memastikan bahwa hasil-hasil riset terintegrasi secara langsung ke dalam kebijakan dan program Pembangunan, serta penyelarasan dengan perkembangan global yang berarti riset dan inovasi di Banyumas harus mengikuti tren dan standar internasional untuk memastikan relevansi dan daya saing di tingkat global.

Setelah mengelaborasi tantangan dan peluang, analisis kesenjangan, dan strategi kebijakan riset dan inovasi di Kabupaten Banyumas, Peta jalan riset dan inovasi disusun dan merupakan rencana aksi jangka panjang yang menjamin bahwa semua upaya penelitian dan pengembangan di daerah terintegrasi dan bertujuan tunggal yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan dan pemanfaatan Iptek dan inovasi. Sesuai tema RIPJPID Kabupaten Banyumas tahun 2025 – 2029, peta jalan riset dan inovasi diarahkan pada pengembangan ekosistem riset untuk UM-IKM dan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*). Peta jalan riset dan inovasi ini disusun dengan mempertimbangkan tujuan, analisis potensi, isu strategis, analisis kesenjangan, dan strategi yang akan dilakukan.

Sebagai perwujudan dari peta jalan riset dan inovasi yang dibuat, Rencana aksi Riset dan Inovasi disusun dalam rencana aksi tahunan. Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah memuat program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Implementasi RIPJPID di Kabupaten Banyumas akan berjalan optimal bila didukung oleh kelembagaan yang kuat dan koordinatif, integrasi dengan dokumen perencanaan dan anggaran, kolaborasi *quadruple helix*, ekosistem inovasi dan digitalisasi yang terbangun, fokus pada isu daerah, pendanaan dan insentif inovasi, serta monitoring dan evaluasi berbasis data dan indikator. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Banyumas berpotensi menjadi kabupaten berdaya saing tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO